

Milik Depdikbud
Tidak Diperdagangkan

KUMPULAN BUKLET HARI BERSEJARAH

I

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1994





**KUMPULAN
BUKLET HARI BERSEJARAH
I**

Tim Penyusun :

**Ayatrohaedi
Tawalinuddin Haris
Sri Sutjatiningsih
G.A. Ohorella
Wiwi Kuswiah
Kasijanto
Mughtaruddin Ibrahim
Shalfiyanti
Espita Riama**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
JAKARTA
1994**

KUMPULAN BUKLET HARI BERSEJARAH

Tim Penyusun : Ayatrohaedi
Tawalinuddin Haris
Sri Sutjatningsih
G.A. Ohorela
Wiwi Kuswiah
Kosijanto
Mughtaruddin Ibrahim
Shalfiyanti
Espita Riama

Penyunting : Gamar Azayni Ohorela

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Diterbitkan oleh : Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
Jakarta 1994

Cetakan Pertama 1994

Dicetak Oleh : CV. Dwijaya Karya

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Karya-karya sejarah dengan pelbagai aspek yang dikaji dan ditulis melalui Projek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Projek IDSN) dimaksudkan untuk disebarluaskan ke tengah-tengah masyarakat. Adapun tujuannya ialah untuk memberikan bahan informasi kesejarahan kepada masyarakat. Dengan demikian diharapkan banyak pihak akan dapat menambah pengetahuannya tentang sejarah, baik yang menyangkut akumulasi fakta maupun proses terjadinya peristiwa. Di samping itu para pembaca juga akan memperoleh nilai-nilai kesejarahan, baik yang mengenai kepahlawanan, kejuangan, maupun perkembangan budaya yang terungkap dari paparan yang terdapat dalam karya-karya sejarah itu.

Kami menyadari bahwa buku karya-karya Projek IDSN ini tentu tidak luput dari pelbagai kelemahan bahkan mungkin kesalahan-kesalahan. Namun demikian kami ingin meyakinkan kepada pembaca bahwa kelemahan atau kesalahan itu pastilah tidak disengaja.

Berdasarkan keterangan di atas, kami sangat berterima kasih kepada pembaca jika sekiranya bersedia untuk memberikan kritik-kritik terhadap karya-karya Projek IDSN ini. Kritik-kritik itu pasti akan sangat berguna bagi perbaikan karya-karya projek ini di kemudian hari.

Kepada penulis yang telah menyelesaikan tugasnya dan kepada semua pihak yang ikut serta, baik langsung maupun tidak langsung dalam mewujudkan karya-karya Proyek IDSN ini sebagaimana adanya di tangan pembaca, kami sampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Edi Sedyawati

NIP. 130 202 962

PENGANTAR

Buku *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah* ini merupakan salah satu hasil kegiatan penelitian dan penulisan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (Proyek IDSN) tahun 1991/1992 dan tahun 1992/1993.

Hari bersejarah yang dimaksud dalam buku ini adalah momentum atau tonggak sejarah yang terpenting dalam berbagai aspek kehidupan sosial budaya dan politik bangsa Indonesia. Peringatan dan perayaan "hari bersejarah" biasanya dilaksanakan oleh instansi pusat serta instansi-instansi terkait lainnya yang menangani aspek-aspek sosial budaya dan politik. Misalnya, peringatan Hari Olahraga Nasional dilaksanakan oleh Kantor Menteri Negara dan Olahraga serta instansi-instansi terkait lainnya.

Uraian mengenai hari bersejarah dalam buku ini difokuskan pada latar belakang sejarahnya. Hal ini dimaksudkan agar para peminat sejarah terutama generasi muda dapat mengetahui serta memanfaatkannya sebagai bahan kajian lebih lanjut di masa yang akan datang.

Dalam tahun 1991/1992 dan tahun 1992/1993 telah berhasil diteliti dan ditulis berbagai macam hari bersejarah yang uraiannya pun relatif cukup banyak, karena itu Proyek IDSN kemudian menerbitkannya dalam dua buku, yaitu *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah I* dan *Kumpulan Buklet Hari Bersejarah II*. Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat meningkatkan semangat pengabdian kita terhadap nusa, bangsa, dan negara.

Kepada semua pihak yang ikut serta dalam proses penyelesaian karya ini hingga penerbitannya disampaikan terima kasih.

Jakarta, Januari 1995

**Pemimpin Proyek Inventarisasi
dan Dokumentasi Sejarah Nasional**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G.A. Ohorella', with a horizontal line underneath the name.

Dra. G.A. Ohorella

PENGANTAR

Perjalanan panjang sejarah Perjuangan bangsa Indonesia telah diisi dengan berbagai peristiwa bersejarah. Demikian pentingnya peristiwa tersebut maka sehingga dianggap sebagai “tonggak sejarah”. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat berupa penyelenggaraan suatu kegiatan, lahirnya sebuah organisasi, pertempuran atau perjuangan jasadi, maupun kelahiran seseorang, yang kemudian berperan besar dalam perjalanan perjuangan bangsa Indonesia.

Saat ini mungkin ada sebagian orang yang telah mengetahui beberapa peristiwa sejarah. Namun demikian tidak sedikit yang belum mengetahuinya. apa lagi makna suatu peristiwa bersejarah. Salah satu penyebabnya adalah masih sangat terbatasnya sumber informasi kesejarahan mengenai peristiwa-peristiwa bersejarah.

Guna lebih memahami dan menghayati peristiwa bersejarah, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah surat keputusan yang berhubungan dengan arti pentingnya suatu peristiwa bersejarah. Dengan surat keputusan tersebut diharapkan peristiwa bersejarah tidak lagi hanya menjadi milik sebagian kelompok, daerah, maupun lingkungan tertentu saja, tetapi menjadi peristiwa yang bersifat nasional dan keberadaannya mengikat seluruh bangsa Indonesia, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesadaran sejarah seluruh bangsa Indonesia. Dalam surat keputusan pemerintah, peristiwa bersejarah itu disebut sebagai “hari bersejarah”.

Dalam rangka peningkatan kesadaran sejarah tersebut, kami telah menyusun sebuah naskah dalam bentuk Buklet Hari Bersejarah. Naskah dimaksud memuat sepuluh judul hari bersejarah, yaitu : Hari Palang Merah Indonesia, Hari Kesehatan Nasional, Hari Pramuka, Hari Krida Pertanian, Hari Ibu, Hari Pendidikan Nasional, Hari Anak Nasional, Hari Koperasi Nasional, Hari Lahir Lembaga Kearsipan di Indonesia, Hari Lahir Museum di Indonesia, Hari Kejaksaan, Hari Kepolisian Republik Indonesia, Hari Keuangan, Hari Bank, Hari Bhakti TNI-AU, Hari Kavaleri, Hari Kereta Api, Hari Listrik di Indonesia.

Kami menyadari bahwa naskah ini masih terdapat kekurangan-kekurangan karena keterbatasan kemampuan dan data yang tersedia. Oleh sebab itu kami mengharapkan koreksi serta masukan dari para pembaca demi kesempurnaan naskah ini.

Semoga naskah ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca dalam upaya menanamkan dan meningkatkan kesadaran sejarah serta memberi petunjuk bagi kajian selanjutnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Sambutan Direktur Jenderal Kebudayaan	v
Pengantar	vii
Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
Pendahuluan	1
Hari Palang Merah Indonesia	3
Hari Kesehatan Nasional	18
Hari Pramuka	32
Hari Krida Pertanian	48
Hari Ibu	65
Hari Pendidikan Nasional	79
Hari Anak Nasional	92
Hari Koperasi Nasional	103

PENDAHULUAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek di lingkungan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain mengerjakan penulisan Hari-hari Bersejarah.

Hari-hari Bersejarah yang diperingati setiap tahun oleh instansi-instansi terkait merupakan dokumentasi yang erat hubungannya dengan peristiwa bersejarah dan nilainya dianggap penting bagi perkembangan selanjutnya. Oleh sebab itu untuk lebih meningkatkan kesadaran guna memahami dan menghayati arti peristiwa bersejarah yang didalamnya terkandung nilai-nilai perjuangan dan keluasan wawasan ke masa depan. Untuk lebih mengingat kembali akan pentingnya peristiwa bersejarah, maka dalam tahap pertama penulisan hari Bersejarah ini diawali dengan Hari Palang Merah Indonesia di mana simbol palang berwarna merah merupakan lambang dan arti rasa kemanusiaan dan mempunyai peranan besar pada masa perjuangan. Selanjutnya Hari Kesehatan Nasional bagi bangsa Indonesia wajib melaksanakan, memajukan kesejahteraan umum serta untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu kesehatan. Begitu pula dari sekian banyak peristiwa penting yang diperingati oleh bangsa Indonesia adalah Hari Krida Pertanian yang selalu diperingati setiap tanggal 21 Juni merupakan suatu hari peringatan bagi masyarakat pertanian, yaitu

masyarakat Indonesia yang kehidupannya tergantung pada pemanfaatan tanah dan air, baik usaha pangan, perkebunan perikanan maupun usaha kehutanan. Semua ini ditunjang oleh adanya gerakan Pramuka di mana kegiatannya dipusatkan dalam bidang pendidikan, cinta pembangunan pertanian dan pembangunan desa secara lebih nyata dan intensif. Itulah yang diberi nama Hari Pramuka dan baru diperkenalkan pada 14 Agustus 1961. Sebagaimana kita ketahui bangsa Indonesia setiap 22 Desember selalu memperingati Hari Ibu. Hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum ibu. Dan 2 Mei yang merupakan lahirnya perintis pendidikan Nasional ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Kesejahteraan anak mengandung makna yang mendalam, itulah yang dikemukakan Presiden RI dalam ceramah berkala tentang kesejahteraan anak, di mana 23 Juli selalu dirayakan sebagai Hari Anak Nasional. Dan 12 Juli selalu diperingati sebagai Hari Koperasi dimana kelangsungan hidup berkoperasi dapat menunjang kesejahteraan masyarakat luas.

Atas dasar itu maka kegiatan Inventarisasi dan dokumentasi peristiwa-peristiwa sejarah khususnya tentang hari-hari bersejarah, diharapkan dapat memupuk kesadaran sejarah dan kesadaran berbangsa di kalangan masyarakat luas, terutama bagi generasi muda dalam rangka membina kesatuan dan persatuan bangsa.

HARI PALANG MERAH INDONESIA

Bila kita menyebut Palang Merah Indonesia, kita akan teringat sebuah simbol palang berwarna merah atau bulan sabit berwarna merah di atas dasar putih. Sebuah lambang yang menyadarkan kita tentang arti rasa kemanusiaan, saling mengasihi dan membantu sesama manusia. Namun yang mempunyai peranan sangat besar dalam masa perjuangan bangsa Indonesia. Tanggal 17 September, berdasarkan ketetapan Presiden RIS tahun 1948, selalu diperingati sebagai hari lahirnya Palang Merah Indonesia. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang jasa-jasa petugas Palang Merah Indonesia selama masa perjuangan bangsa Indonesia, dan juga untuk memperingati rasa kemanusiaan dan kasih sayang untuk menolong sesama bangsa Indonesia. Peringatan ini juga menyadarkan kita sebagai makhluk Tuhan sudah seharusnya kita hidup saling berdampingan dan saling tolong menolong sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, Pancasila. Hal ini juga merupakan wujud dari pengamalan sila ketiga Pancasila, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab."

Kepalangmerahan terbentuk dari situasi sulit di atas dunia seperti peperangan, bencana alam dan kekurangan paham. Mula pertama kali terbentuknya palang merah terjadi pada abad ke-19, atas prakarsa seorang berkebangsaan Swiss, Jean Henry Dunant. Pada tahun 1859, ia dihadapkan pada suatu kenyataan yang mengerikan dalam perang Prancis-Sardinia, yang menelan korban 40.000 jiwa. Pada tanggal 24

Juni 1859 pecah perang antara Pasukan Austria di Solferino, Italia Utara. Ribuan korban tewas dan terlantar tanpa ada yang menolong atau menanganinya. Henry Dunant yang melihat sendiri korban-korban kekejaman perang Solferino ini, tersentuh hatinya dan berusaha untuk mengumpulkan tenaga-tenaga sukarela dari penduduk setempat untuk mengurus korban perang. Di tengah-tengah penderitaan perang inilah kemudian lahir jiwa kepalangmerahan. Suatu sikap yang mengutuk kebengisan sesama manusia, yang menghendaki agar manusia menjunjung tinggi rasa peri kemanusiaan. Ucapan Henry Dunant yang terkenal adalah : “kita semua saudara, dan semua penderitaan wajib mendapat perawatan yang sama,” dengan tanpa membedakan mana kawan atau lawan. Dengan sikap ini, Henry Dunant mulai meletakkan batu pertama untuk membentuk suatu wadah organisasi kepalangmerahan.¹⁾

Pengalaman selama perang di Solferino menolong dan merawat korban yang luka-luka oleh Henry Dunant dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul, *Un Souvenir de Solferino* (Kenangan di Solferino). Buku ini mengisahkan tentang kondisi akibat perang dan mengusulkan agar segera dibentuk satuan tenaga sukarela yang bernaung di bawah satuan lembaga yang memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terluka di medan perang.²⁾ Tujuan buku tersebut tentu saja bukan hanya untuk mengetuk pintu hati manusia, tetapi juga untuk mewujudkan impiannya untuk membentuk suatu organisasi untuk menolong penderitaan orang lain. Buku tersebut berhasil menyentak perhatian dunia dan berhasil membuka hati empat orang terkemuka Swiss, Jenderal Dufour, Dr. Maunoir, Dr. Appia dan Hakin Moynier, untuk membentuk suatu komisi. ini kemudian dikenal sebagai komisi Jenewa yang kemudian menjadi Komite Internasional Palang Merah (KIPM) atau internasional Committee of the Red Cross, yang berkedudukan di Jenewa Swiss. Atas prakarsa Komisi ini kemudian diadakan suatu konferensi yang dihadiri 16 negara, dan berhasil membentuk badan “Palang Merah Internasional” pada bulan Oktober 1863.

Pada tahun 1864 diselenggarakan suatu konferensi internasional di Jenewa yang membahas tentang perbaikan nasib tentara yang terluka di medan perang. Pada konferensi inilah diresmikan lambang pelindung

bagi para petugas/penolong di medan perang, yaitu palang berwarna merah di atas dasar putih. Selanjutnya, Komite tersebut memiliki banyak anggota sukarelawan. Ketika tahun 1970 meletus perang antara Prusia dan Prancis, mereka terjun ke medan perang merawat semua orang yang terluka tanpa diskriminasi.³

Selain komite Internasional Palang Merah (Internasional Committee of the Red Cross), kemudian dibentuk pula Liga Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang juga merupakan bagian dari Badan Palang Merah dunia. Kedua organisasi ini yang didirikan pada tanggal 8 Mei 1919 merupakan federasi Perhimpunan Palang Merah Internasional, dengan tujuan untuk mempererat dan mengkoordinir perhimpunan Palang Merah sedunia.

Lalu apakah definisi palang merah itu sendiri? Palang Merah dapat didefinisikan sebagai sesuatu perkumpulan yang anggota-anggotanya memberi pertolongan dengan sukarela berdasarkan atas rasa kemanusiaan, dengan tidak membedakan ras, bangsa, golongan, agama dan politik dan ideologi. Palang Merah merupakan organisasi independen yang tidak terikat dengan kepentingan pemerintahan suatu negara yang terlepas dari kepentingan politik.⁴⁾

Dalam menjalankan misinya palang merah yang merupakan Gerakan kemanusiaan ini berpedoman pada Tujuh Prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional, yang disahkan dalam Konferensi Internasional Palang Merah ke-20 di Wina Austria pada tahun 1965. Adapun tujuh prinsip dasar itu adalah sebagai berikut :

- (1) Kemanusiaan, yaitu keinginan untuk memberi pertolongan tanpa diskriminasi secara nasional maupun internasional.
- (2) Tidak berpihak, yaitu tidak membedakan antara kebangsaan, warna kulit, agama, tingkatan dalam masyarakat (kedudukan sosial) atau pendapat politik.
- (3) Bersikap NETRAL, dalam arti tidak boleh memihak/berpihak kepada suatu golongan dalam suatu permasalahan, atau melibatkan diri di dalam pertentangan yang bersifat politis, rasial, keagamaan atau ideologi.

- (4) Bebas dalam arti harus selalu memelihara otonominya sehingga selalu mampu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Palang Merah.
- (5) Kesukarelaan, bahwa Palang Merah adalah suatu organisasi pemberi bantuan sukarela yang tidak mendasarkan diri dengan cara apapun untuk berkeinginan mendapat keuntungan.
- (6) Kesatuan, Yaitu di satu negara hanya dapat berdiri satu Perhimpunan Palang Merah
- (7) Palang Merah adalah suatu organisasi yang bersifat semesta, di mana semua perhimpunan mempunyai kedudukan yang sama dan memikul tanggungjawab serta kewajiban yang sama pula.⁵⁾

Jelaslah, dari prinsip-prinsipnya palang merah merupakan badan yang benar-benar murni untuk kemanusiaan. Teks prinsip-prinsip tersebut telah diperbaharui dan tercantum dalam Status Palang Merah Internasional yang telah disahkan melalui Konperensi Internasional Palang Merah ke 25 tahun 1986.

Terbentuknya Badan Palang Merah Internasional menyadarkan negara-negara lain betapa pentingnya membentuk palang merah di negara mereka masing-masing, sehingga di tiap-tiap negara berdirilah Perhimpunan Palang Merah, termasuk juga di Indonesia.

Sejarah kepalangmerahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari usaha bangsa kita dalam perjuangan kemerdekaan. Dalam masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan itulah Palang Merah Indonesia lahir pada tanggal 17 September 1945. Ide untuk membentuk badan kepalangmerahan sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, tapi sulit untuk melaksanakannya dalam iklim penjajahan waktu itu, yang tidak memungkinkan bangsa Indonesia membentuk organisasi palang merah sendiri. Palang Merah yang ada pada waktu itu adalah perhimpunan palang merah buatan Belanda yaitu, *Nederlandsche Roede Kruis Afdeeling Indonesia (N.E.R.K.A.I.)*. Palang Merah ini cenderung hanya menolong orang-orang Belanda saja. Padahal pada saat itu banyak rakyat Indonesia yang sangat membutuhkan pertolongan. Kekejaman penjajahan Belanda saat itu menyebabkan kemiskinan meluas dikalangan bangsa Indonesia, bahkan tidak sedikit yang meninggal karena kelaparan. Keadaan itu memotivasi bangkitnya

bankitnya juga kepalangmerahan yang sudah ada pada bangsa Indonesia saat itu untuk mengantisipasi penderitaan sebagaimana rakyat Indonesia. Mereka siap untuk menghimpun tenaga dan harta benda mereka untuk membantu saudara-saudara mereka yang membutuhkan pertolongan. Bentuk kegiatan ketika itu tidak dalam suatu organisasi, karena mereka belum berani mengutarakan keinginan mereka untuk membentuk suatu organisasi palang merah sendiri. Barulah dalam tahun 1938 dua orang putra Indonesia, dr. Senduk dan dr. Bahder Djohan dengan gagah berani merancang pembentukan Badan Palang Merah. Untuk rakyat Indonesia, Ide dan usaha mereka ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat, khususnya dari kalangan cerdik padai.

Rancangan tersebut diajukan ke tengah-tengah Konfransi NERKAI, walaupun akhirnya rancangan tersebut ditolak Pemerintah Belanda, karena rakyat Indonesia dianggap belum mengerti tentang perikemanusiaan dan dikhawatirkan mengganggu situasi politik. Namun penolakan ini tidak memadamkan jiwa kepalangmerahan yang telah ada. Pemerintah Belanda telah salah menilai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang tidak mengenal perikemanusiaan, tetapi justru sebaliknya dan bahkan mempunyai peradaban yang tinggi, dan dalam diri bangsa Indonesia telah tertanam jiwa kemanusiaan untuk menolong sesamanya. Oleh karena itu, kedua orang dokter muda tersebut tidak menerima alasan Belanda. Menurut mereka Indonesia mampu membentuk kepalanga merahan sendiri. Selain itu, bangsa Indonesia juga ingin membuka mata dunia tentang keadaan bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beradab.

Dengan alasan tersebut, maka ketika jaman penduduk Jepang, Dr. Senduk sekali lagi berusaha membentuk badan palang merah. Namun usaha Dr. Senduk untuk membentuk palang merah sekali lagi mengalami kegagalan, karena Pemerintah Jepang selalu menghalang-halangi usaha tersebut. Baru setelah kita berada dalam alam kemerdekaan, apa yang menjadi cita-cita selama ini untuk dapat membentuk wadah yang dapat menghimpun bantuan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, terutama orang-orang yang menjadikorban pertempuran menjadi kenyataan.

Palang Merah Indonesia atau lebih dikenal dengan PMI terbentuk pada tanggal 17 September 1945. Terbentuknya badan kemanusiaan ini tepat sebulan setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, setelah sebelumnya pada tanggal 3 September 1945, Presiden Rerpublik Indonesia, Soekarno, memerintahkan Dr. Boentaran Martoadmodjo, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet I untuk membentuk perhimpunan palang merah Indonesia. Berdasarkan perintah tersebut, kemudian Dr. Boentaran membentuk panitia kecil yang terdiri dari 5 orang yaitu Dr. Bahder Johan, Dr. Djoemhana, Dr. Marzoeke, Dr. Sitanala dan Dr. Mochtar sebagai ketua. Setelah mengalami berbagai proses, akhirnya tepat sebulan setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, terbentuklah Palang Merah Indonesia yang diketuai oleh Dr. Mohmmad Hatta. Pengurus besar perhimpunan tersebut bertempat di Hotel di Pavillon, Jl. Rijswijk 27 Jakarta (Hotel Majapahit sekarang : Kompleks perkantoran Sekretariat Negara bagian barat). Sebagaimana Palang Merah Internasional, maka Palang Merah Indonesia juga mempunyai cita-cita merelisasikan perikemanusiaan, dimana manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat martabatnya sebagai mahluk Tuhan yang Maha Esa, yang sama derajatnya, hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama dan kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial dan warna kulit.

Dengan terbentuknya Palang Merah Indonesia, berarti kini kita tidak perlu lagi tergantung pada palang merah yang dibentuk Belanda, yang pada kenyataan dalam beberapa hal yang berusaha megadu domba bangsa kita. Sejak saat itu Indonesia dapat lebih cepat memberi pertolongan kepada saudara-saudaranya yang membentuk pertolongan, terutama prajurit-prajurit korban pertempuran. Apalagi tidak lama setelah itu Belanda kembali mengijakkan kakinya di bumi Indonesia untuk merebut kembali kemerdekaan yang kita peroleh, sehingga hampir di setiap daerah terjadi pertempuran menentang Belanda seperti pertempuran Surabaya, pertempuran lima hari di Semarang, Bandung lautan Api dan lain sebagainya. Dalam suasana seperti itu sudah tentu Palang Merah Indonesia sangat dibutuhkan. Untuk itu, kemkudian dibentuk cabang-cabang palang merah di hampir setiap daerah di Indonesia.

Dengan terbentuknya Palang Merah Indonesia di hampir setiap daerah ternyata menimbulkan antusias seluruh rakyat. Pada waktu itu banyak dari masyarakat yang turut bergabung dalam perhimpunan kemanusiaan ini. Baik pria maupun wanita, di desa atau di kota dengan sukarela mengulurkan tangan untuk menolong mereka yang menjadi korban pertempuran, baik yang luka ataupun yang meninggal. Dengan giat dan tak mengenakan lelah anggota Palang Merah Indonesia melakukan perjalanan ke pelosok-pelosok desa untuk membantu penduduk yang mengalami kelaparan. Bahkan untuk mempermudah menolong mereka kemudian dibentuk mobile colonne yaitu pasukan palang merah pertama yang beraanggotakan para mahasiswa kedokteran. Prinsip mereka pada waktu itu, jika tidak dapat turut langsung memegang senjata, mereka akan menggabungkan diri dalam bagian-bagian palanga merah baik yang di kantor-kantor cabang, maupun yang di rumah-rumah sakit. Peranan yang paling menonjol pada waktu itu adalah Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK), pengungsian, dan dapur umum.

Selain sibuk dengan kegiatan-kegiatan tersebut, Palang Merah Indonesia juga giat mencari dana bantuan untuk disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dalam kegiatan ini, selain mencari dana dari para dermawan, Palang Merah Indonesia juga berusaha mencari dana bantuan dari Komite Internasional Palang Merah (KIPM) dan palang merah-palang merah negara lain. Pada mulanya usaha Palang Merah Indonesia ini ditolak oleh Komite Internasional Palang Merah dan badan palang merah negara-negara lain, karena Palang Merah Indonesia belum diakui sebagai organisasi. Namun melihat kegiatan dan kegigihan para anggota Palang Merah Indonesia dalam menjalankan tugasnya telah merubah sikap mereka, sehingga kemudian datanglah bantuan dari Komite Internasional Palang Merah dan beberapa organisasi palang merah negara-negara lain seperti Malaysia dan India berupa obat-obatan, makanan dan uang.

Sementara itu ditengah kesibukannya menghadapi persoalan korban pertempuran, Palang Merah Indonesia juga harus menghadapi sikap Belanda yang terus menentang keberadaan Palang Merah Indonesia. Dalam setiap kesempatan Belanda selalu berusaha menghalangi kegiatan Palang Merah Indonesia. Mereka tidak hanya mengacaukan

kegiatan-kegiatan dengan melakukan pembakaran terhadap mobil-mobil Palang Merah Indonesia yang tampak oleh mereka, tetapi tentara Belanda juga berusaha mengosongkan dan membakar tempat-tempat yang menjadi markas Palang Merah Indonesia. Akibat perbuatan Belanda tersebut banyak markas-markas Palang Merah Indonesia yang harus berpindah tempat termasuk markas Besar Palang Merah Indonesia, yang semula berada di jalan Rijswijk 27 pindah ke rumah sakit Salemba.

Walaupun harus menghadapi tekanan-tekanan Belanda yang ingin melenyapkan Palang Merah Indonesia, tidaklah menyurutkan semangat juang Palang Merah Indonesia. Semangat juang mereka tetap berkobar-kobar untuk menolong bangsanya dari penderitaan walaupun mereka harus berpindah-pindah markas. Bahkan di tengah-tengah tekanan Belanda, Palang Merah Indonesia terus berusaha menyempurnakan organisasinya. Melalui kongres kongresnya, Palang Merah Indonesia berusaha meninjau dan kegiatan-kegiatan dan program kerja mereka untuk menyempurnakan organisasi, baik yang di pusat maupun di cabang.

Kongres Palang Merah Indonesia pertama diadakan di kota Yogyakarta pada pada 16--17 Oktober 1946. Di dalam kongres ini diputuskan untuk memindahkan markas besar dari Jakarta ke Yogyakarta. Keputusan ini diambil karena keadaan kota Jakarta yang semakin gawat, dimana hampir setiap sudut kota sudah diduduki Belanda, sehingga sulit bagi Palang Merah Indonesia untuk bergerak. Dengan demikian keputusan untuk memindahkan markas besar Palang Merah Indonesia ke Yogyakarta segera di laksanakan sedangkan di Jakarta di bentuk suatu perwalian pusat yang dipimpin oleh Dr. Bahder Johan.

Untuk memperkuat keberadaan Palang Merah Indonesia, pada kongresnya yang ke-2 13--14 Oktober 1948 di Yogyakarta, diputuskan bahwa 17 September diperingati sebagai hari berdirinya Palang merah Indonesia. Berdasarkan keputusan tersebut, maka selanjutnya setiap 17 September diadakan peringatan lahirnya Palang Merah Indonesia.

Pada saat diselenggarakannya Kongres Palang Merah Indonesia ke II situasi negara belum berubah. Pada tanggal 16 Desember 1948

Belanda menyerang kota Yogyakarta, sehingga akibat serangan tersebut, kedudukan Palang Merah Indonesia yang sudah sulit menjadi semakin sulit. Karena Kota Yogyakarta sudah dikuasai Belanda dan para pemimpin pemerintah telah ditawan mereka, maka oleh Belanda dan para pemimpin pemerintahan telah ditawan mereka, maka oleh Belanda Pemerintah Republik Indonesia dianggap sudah tidak ada. Dengan keadaan yang demikian, maka otomatis Palang Merah Indonesia pun juga dianggap sudah tidak ada dan dilarang melakukan kegiatannya. Padahal semangat Palang Merah Indonesia masih berkobar-kobar untuk menolong orang-orang yang menjadi korban pertempuran. Palang Merah Indonesia kemudian melakukan pendekatan dengan *Nederlandsch Roode Kruis Afdeling Indonesia (NERKAI)* dengan tujuan agar NERKAI memperlunak sikapnya. Tetapi setelah keputusan mengenai hal tersebut dikeluarkan, Palang Merah Indonesia sudah melakukan kegiatannya kembali.

Pada akhir Desember 1949 terjadi perubahan keadaan didalam pemerintahan di Indonesia, sehubungan dengan masalah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Setelah perundingan-perundingan sebelumnya mengalami kegagalan, akhirnya melalui perundingan *Konperensi Meja Bundar*, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Perubahan keadaan tersebut membawa perubahan pula pada Palang Merah Indonesia. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949, ibukota Republik Indonesia yang sempat pindah ke Yogyakarta pada permulaan Januari 1946, kembali ke Jakarta. Bersamaan dengan itu *Pengurus Besar Palang Merah Indonesia* juga kembali ke Jakarta.

Dengan diakuinya kedaulatan Republik Indonesia ini, berarti Belanda tidak mempunyai hak lagi untuk turut campur dalam segala bentuk kegiatan di Indonesia. Dan berarti pula, segala bentuk organisasi buatan Belanda yang berada di Indonesia harus segera dihilangkan termasuk organisasi kepalang merahanan milik Belanda, *Nederlandsch Rood Kruis Afdeling Indonesia (NERKAI)*. Setelah Republik Indonesia diakui secara *de Jure* oleh masyarakat internasional, maka pada 16 Januari 1950, Pemerintah menerbitkan Surat Keputusan Presiden No. 25 yang mengukuhkan Palang Merah Indonesia (selanjutnya lebih dikenal sebagai PMI) sebagai satu-satunya

organisasi kepalangmerahan di Indonesia. Selanjutnya dilakukan serah terima tugas-tugas kepalangmerahan di Indonesia dari *Nederlandsch Roode Kruis Afdeling Indonesia* (NEKAI) kepada Palang Merah Indonesia.⁸⁾

Pada 20 Mei 1950, semua kekayaan dan tugas NERKAI diserahkan pada Palang Merah Indonesia, antara lain adalah Rumah Sakit Kedung Halang di Bogor. Mengingat latar belakang sejarah tersebut maka hingga kini Rumah Sakit Umum Kedung Halang tetap menjadi milik Palang Merah Indonesia dan dikenal dengan nama Rumah Sakit Umum Palang Merah Indonesia Bogor. Rumah sakit tersebut merupakan satu-satunya rumah sakit milik Palang Merah Indonesia. Sejalanjutnya dengan perkembangan zaman, maka untuk menegaskan gambaran tugas bagi PMI, pada 29 November 1963 terbit kepres No. 246 tentang Perhimpunan Palang Merah Indonesia.⁹⁾

Akhirnya cita-cita Palang Merah Indonesia dan Juga bangsa Indonesia untuk mempunyai palang merah sendiri tanpa campur tangan Belanda dapat terwujud. Kini Palang Merah Indonesia menjadi satu-satunya badan yang menjalankan kepalang merahan, Palang Merah Indonesia dapat leluasa melakukan tugasnya sesuai dengan Konvensi Jenewa.¹⁰⁾ dan falsafah negara Pancasila, tanpa ada yang menghalangi. Usaha Palang Merah Indonesia selanjutnya adalah bagaimana agar Palang Merah Indonesia dapat diakui sebagai bagian dari Palang Merah Indonesia Internasional. Karena sebelumnya walaupun secara de yure Palang Merah Indonesia sudah diakui dunia Internasional yang terlihat melalui bantuan yang diberikan Komite Internasional Palang Merah dan palang merah negara-negara lain, namun secara de fakto keberadaannya belum diakui. Pada tanggal 5 Juni 1950, Palang Merah Indonesia akhirnya secara resmi diakui oleh Komite Internasional Palang Merah di Jenewa. Pada tanggal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia ikut menandatangani Konvensi Jenewa. Kemudian pada 15 Juni 1950, Palang Merah Indonesia diakui Internasional Komite Palang Merah sebagai Perhimpunan Palang Merah Nasional. Dan pada tahun yang sama, tepatnya 16 Oktober 1950, Palang Merah Indonesia diterima sebagai anggota Liga Perhimpunan Palang Merah sebagai anggota yang ke-68.

Masih dalam kaitannya dengan pengakuan dunia internasional, pada tanggal 10 September 1958, Republik Indonesia menjadi peserta/ penandatanganan Konvensi Jenewa berdasarkan Undang-undang No. 59 tahun 1958. Dengan demikian Palang Merah Indonesia telah memasuki gelanggang Internasional sebagai suatu perhimpunan yang dapat menjadi ukuran derajat bangsa dan negara yang diwakilinya, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Kini Palang Merah Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain dalam menjalankan misi kemanusiaannya. Lalu bagaimana perkembangan dan kegiatan Palang Merah Indonesia selanjutnya setelah selesai perang kemerdekaan ?

Berakhirnya perang kemerdekaan tidak berarti mengakhiri kegiatan Palang Merah Indonesia dalam melakukan misi kemanusiaan. Setelah berakhirnya perang kemerdekaan kegiatan Palang Merah Indonesia difokuskan pada usaha membantu pemerintah dalam memulangkan warganegara-warganegara Belanda ke negari asalnya, menolong korban bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran serta kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang lainnya. Di samping itu, Palang Merah Indonesia juga disibukan dengan membantu pemerintah menolong korban-korban pergolakan dalam negeri antara lain, PRRI di Sumatera dan pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku. Untuk itu Palang Merah Indonesia telah membangun pos-pos kesehatan di stasiun-stasiun kereta api yang membantu proses pemulangan warganegara Belanda ke negara asalnya. Sedangkan untuk menolong korban bencana alam, selesai membangun pos-pos kesehatan di lokasi bencana, Palang Merah Indonesia juga mengirim bahan makanan dan pakaian. Begitu juga untuk menolong korban pergolakan-pergolakan daerah.

Kegiatan Palang Merah Indonesia yang lain yaitu mengadakan pengelolaan sumbangan daerah. Kegiatan tersebut ditunjukan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan darah. Karena sebagaimana kita ketahui hampir setiap hari banyak orang yang meninggal dunia akibat kekurangan darah yang disebabkan kecelakaan, operasi dan lain-lain. Di sisi lain banyak pula masyarakat yang sebenarnya darah dapat disumbangkan. Melihat keadaan yang demikian, maka Palang Merah Indonesia pada tahun 1950 mengadakan

suatu wadah pengelolaan dana yang dinamakan Dinas Dermawan Darah yang akan menerima sumbangan darah dan memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Ternyata kegiatan ini banyak menarik perhatian masyarakat, sehingga banyak dari masyarakat yang bersedia mendonorkan darahnya.¹¹⁾ Kemudian didirikan Lembaga Pusat Tranfusi Darah pada tahun 1969, yang akan mengelola urusan tranfusi dan menyalurkan persediaan darah dari para donor kepada mereka yang membutuhkan.

Pada 1 Maret 1950, Palang Merah Indonesia membentuk Palang Merah Pemuda atau yang sekarang dikenal dengan nama Palang Merah Remaja. Palang Merah remaja ini merupakan bagian dari Palang Merah Indonesia. Anggota dari organisasi tersebut terdiri dari pemuda-pemuda yang berusia di bawah 18 tahun, dengan tujuan untuk menanamkan benih jiwa kepalang merahan sejak dini, sehingga sejak muda dalam diri mereka tertanam rasa kesetiakawanan sosial, rasa kemanusiaan dan rasa mencintai sesamanya, menghindari penyakit dan meringankan penderitaan sesuai dengan apa yang diajarkan kepada mereka sebagai anggota kepalang merahan.

Di dunia internasional, selain aktif di dalam konperensi-konperensi yang diadakan Palang Merah Internasional seperti Konperensi Jenewa, Konperensi Liga Perhimpunan Palang Merah atau Konperensi Internasional Perawatan Keluarga, Palang Merah Indonesia yang kini sudah mempunyai hak kewajiban yang sama dengan palang merah negara-negara lain, juga aktif memberi bantuan kepada bangsa-bangsa lain yang mengalami bencana alam atau perang.

Atas pemerintah-pemerintah, Palang Merah Indonesia turut memberi bantuan kepada para pengungsi Vietnam yang berada di Pulau Galang. Di Pulau Galang, Palang Merah Indonesia membangun tempat-tempat penampungan, memberi bantuan makanan, pakaian dan obat-obatan. Bahkan selanjutnya kemudian atas bantuan Pemerintah Australia, Palang Merah Indonesia mendirikan rumah sakit Palang Merah Indonesia di Pulau Galang. Bekerja dengan Komite Internasional, Palang Merah Indonesia juga membantu melaksanakan penyampaian berita keluarga dan pencarian keluarga yang hilang.

Dengan demikian berarti kini dapat dikatakan bahwa Palang Merah Indonesia telah mampu pula membantu penderitaan bangsa-

bangsa lain, walaupun sesungguhnya negarakita sendiri masih sangat membutuhkan bantuan Palang Merah Indonesia. Namun karena sifat bangsa kita yang tidak mementingkan diri sendiri dan juga jiwa palang merah telah tertanam dalam diri bangsa kita, sehingga tidak mengurangi keinginan palang merah kita untuk menolong bangsa-bangsa lain yang mengalami penderitaan.

Selanjutnya dari tahun ke tahun Palang Merah Indonesia terus mengembangkan diri dan mempergiat kerja mereka dalam menjalankan misi kemanusiaan yang diembankan kepadanya. sebagai satu-satunya badan kepalang merahan Indonesia, Palang Merah Indonesia terus berusaha memasyarakatkan Palang Merah Indonesia demi menanamkan rasa cinta kemanusiaan pada mereka. Melalui serangkaian kegiatan seperti menerbitkan perangko bergambar palang merah, pemutaran film-film kepalang merahan, penerbitan bulletin palang merah sebagai sarana penyebar luasan pengetahuan kepalang merahan, serta penyebaran poster, kalender, stiker, buklet dan lain-lain, diharapkan jiwa kepalang merahan dapat menyatu dengan hati rakyat.

Demikian sekelumit perjalanan panjang yang telah dilalui Palang Merah Indonesia. Dalam Kurun waktu tersebut, telah banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi Palang Merah Indonesia, terutama pada awal berdirinya badan kemanusiaan tersebut, karena ternyata tidak mudah bagi bangsa kita untuk mewujudkan cita-cita mulia demi kemanusiaan. Hanya dengan modal ketekunan, ketabahan keikhlasan, akahitnya Palang Merah Indonesia dapat bertahan hingga sekarang ini. Dari sebuah organisasi partikelir dengan tempat dan peralatan yang sangat sederhana, Palang merah Indonesia dapat mengembangkan diri menjadi organisasi berskala nasional dan satu-satunya di Indonesia, dan malah menjadi badan yang diakui dunia internasional.

Keberadaan Palang Merah Indonesia disaat negara sedang terancam kedaulatannya dan peranannya yang menonjol pada saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan membuktikan, bahwa Palang Merah Indonesia mampu menjalankan misi kemanusiaan yang diembankan kepadanya. Palang merah Indonesia dapat memenuhi panggilan bangsanya yang sedang terancam keamanan dan kedaulatannya, dan sekaligus Palang Merah Indonesia juga dapat

menunjukkan pada dunia luar bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa berpelembagaan kemanusiaan dan bangsa yang cinta akan kematian.

Melalui semua kegiatan dan perjuangan yang telah dilakukannya, Palang Merah Indonesia telah mencatat sejarah tersendiri di dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sehingga dapatlah dikatakan bahwa pasang surut perjuangan Palang Merah Indonesia sejalan dengan pasang surut perjuangan bangsa Indonesia. Kemajuan yang dicapai Palang Merah Indonesia pun tidak lepas dari kemajuan bangsa Indonesia.

Dengan memperhatikan fakta-fakta dan menghayati perjuangan yang telah Palang Merah Indonesia dan tokoh-tokoh pendahulu yang menjadi pendiri Palang Merah Indonesia, rasanya tidak mungkin bagi kita untuk mendapat begitu saja melupakan perjuangan yang telah dilakukan Palang Merah Indonesia. Kini Menjadi tugas kita sebagai generasi muda untuk meneruskan perjuangan tersebut. Karena itu melalui peringatan hari lahirnya Palang Merah Indonesia kita terus berjuang yang telah dilakukan Palang Merah Indonesia baik didalam negeri maupun di dunia internasional. Dan Melalui peringatan tersebut, kita tanamkan rasa kemanusiaan, kesetiakawanan sosial dan rasa mencintai sesamanya, karena "kita semua saudara" atau *Inter Arma Caritas* sesuai dengan yang diucapkan Henry Dunant, bapak palang merah dunia menjadi semboyan palang merah.

Catatan

- 1) Markas Daerah PMI DKI Jakarta, buku kepalangmerahan, hlm. 4
- 2) Lembaga inilah yang kelak merupakan cikal bakal lahirnya gerakan palang merah. Henry Dunant juga mengusulkan agar dicetuskan suatu perjanjian internasional yang bertujuan melindungi para korban perang, petugas kesehatan dan rumah sakit. Markas Besar Palang Merah Indonesia, 45 Tahun Palang Merah Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 4.
- 3) Markas Besar Palang Merah Indonesia, Ibid.
- 4) Markas Daerah PMI, DKI Jakarta, Apakah Palang Merah itu? Jakarta, 1988, hlm. 1.
- 5) Markas Besar Palang Merah Indonesia, PalangMera Internasional. Jakarta, 1983, hlm. 1.

- 6) Markas Besar Palang Merah Indonesia, *Sejarah Palang Merah Indonesia*, 17 September 1945 - 31 Desember 1952. Jakarta, 1953, hal. 3. Ibid.
- 8) Markas Besar Palang Merah Indonesia, Op.cit., hlm. 7.
- 9) Ibid
- 10) Konvensi Jenewa adalah suatu konvensi yang berisi tentang peraturan peringatan penderitaan prajurit-prajurit dan masyarakat sipil yang luka dan sakit di medan perang. konvensi tersebut merupakan hasil pertemuan 16 negara yang diadakan pada tanggal 22 Agustus 1864 di Jenewa, dan selalu diperbaharui sesuai dengan keadaan. Lihat Markas Palang Merah Indonesia, *Buku Kepala Merah Merahan*. Jakarta, 1983, hal. 33.
- 11) 2800 dermawan pada tahun 1969, Markas Besar Palang Merah Indonesia, *45 Tahun Berdirinya Palang Merah Indonesia*, Jakarta, 1990, hlm. 14.

Daftar Pustaka

- Palang Merah Indonesia, *Apakah Palang Merah Itu?*, Jakarta, 1988.
 Markasa Besar Palang Merah Indonesia, *Buku Kepala Merah*.
 Jakarta, 1988.
- Markas Besar Palang Merah Indonesia, *Empat Puluh Lima Tahun Palang Merah Indonesi..* Jakarta, 1990.
- Markas Besar Palang Merah Indonesia. *Palang Merah Internasional*.
 Jakarta, 1983.
- Markas Besar Palang Merah Indonesia, *Sejarah Palang Merah Indonesia 17 September 1945 -31 desember 1952*. Jakarta, 1952.

HARI KESEHATAN NASIONAL

Dalam Pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945, disebutkan dengan jelas tentang cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus juga merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut, maka kemudian dilaksanakan upaya pembangunan yang dilaksanakan secara berkesinambungan dalam rangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu yang tercakup dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) setiap lima tahun sekali.

Penyelenggaraan pembangunan tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum. Karena itu merupakan tekad bangsa Indonesia, maka seluruh bangsa Indonesia wajib melaksanakan tekad tersebut. Memajukan kesejahteraan umum berarti mewujudkan tingkat kehidupan masyarakat secara optimal, yang memenuhi kebutuhan dasar manusia termasuk kebutuhan akan kesejahteraan.

Memang kesejahteraan bukanlah segala-galanya bagi kehidupan manusia, tetapi kehidupan manusia akan kurang berarti bila ia tidak mempunyai kesehatan yang baik. Karena kesehatan akan memberi

kesegaran, kegairahan serta kekuatan untuk dapat bekerja dan berprestasi sebaik-baiknya. Apabila bagi negara kita yang sedang dalam pembangunan, kesehatan yang baik akan sangat berarti meningkatkan produktivitas kerja yang berdampak pada kesejahteraan dan peningkatan martabat kehidupan. Dengan demikian berarti kesejahteraan merupakan faktor yang cukup penting bagi perkembangan dan kelangsungan hidup suatu bangsa. Tanpa rakyat sehat apalah artinya sebuah bangsa. Ia hanya akan menjadi sebuah bangsa yang tidak berkembang dan terbelakang, karena itu pembangunan kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi suatu bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, selain perlu dilakukan usaha pembangunan kesehatan masyarakat secara berkesinambungan, perlu juga diadakan suatu hari di mana seluruh masyarakat Indonesia diingatkan dan disadarkan tentang pentingnya arti kesehatan bagi diri sendiri dan bagi kemajuan pembangunan bangsa. Untuk itu ditetapkanlah 12 November sebagai Hari Kesehatan Nasional.

Penetapan 12 November sebagai Hari Kesehatan Nasional dilakukan Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1964, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia tanggal 30 Desember 1964, No. 64033/KBB/218. Dipilihnya tanggal 12 November tersebut sebagai Hari Kesehatan Nasional berkaitan dengan peristiwa kampanye pertama pemberantasan penyakit malaria secara nasional pada tahun 1959, yang ditandai dengan penyemprotan insektisida yang pertama kali oleh Presiden Republik Indonesia, yang pertama Soekarno.

Sebagaimana kita ketahui Negara Indonesia adalah suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar yang terdiri Atas berbagai macam suku bangsa dengan bermacam-macam adat istiadat dan tradisi yang tersebar diberbagai pulau di Indonesia secara tidak merata. Dengan tingkat pendidikan serta tingkat sosial ekonomi sebagian besar rakyat yang belum memadai, di samping tingkat perkembangan antara daerah yang berbeda, serta topografi Indonesia yang beriklim tropis, memungkinkan tumbuhnya berbagai penyakit dan memudahkan persebarannya. Penyakit malaria pada waktu itu merupakan wabah utama yang banyak berjangkit di beberapa daerah di Indonesia. Dalam upaya mencegah dan mengatasi penyakit tersebut, diadakan kampanye

pemberantasan penyakit malaria secara nasional. Sebagai tanda dimulainya kampanye, dilakukan penyemprotan insektisida pertama oleh Presiden Soekarno, pada 12 November 1957. Untuk memperingati kegiatan pertama pemberantasan penyakit malaria tersebut, ditetapkan 12 November sebagai Hari Kesehatan Nasional.

Sejak tahun 1973 Hari Kesehatan Nasional selalu diperingati. Dalam setiap peringatan tersebut dipilihlah sebuah tema yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pada tahun yang bersangkutan. Adapun maksud dan tujuannya ialah untuk merangsang upaya pembinaan masyarakat di bidang kesehatan dengan cara memusatkan perhatian masyarakat terhadap tujuan program kesehatan, misalnya pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-20 mengambil tema "Imunisasi Anak Menjamin Generasi Muda Sehat Untuk Membangun". Untuk mencapai tujuan tema tersebut, maka dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional kegiatan-kegiatan difokuskan pada upaya memasyarakatkan imunisasi, baik melalui penerangan-penerangan secara langsung maupun melalui media massa.

Dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-22 yang tema yang dikemukakan adalah "Kesehatan Ibu dan Anak Modal Kesejahteraan Keluarga". Tema tersebut mengandung makna ketahanan dan kesejahteraan keluarga merupakan hal yang menunjang proses kehidupan bangsa. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut maka selama peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-22 kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan banyak divokuskan pada peningkatan kesehatan ibu dan kesehatan anak.

Selain dari kegiatan utama sesuai tujuan dari tema tahun yang bersangkutan, dalam setiap peringatan Hari Kesehatan Nasional diselenggarakan bermacam-macam kegiatan. Di antaranya kegiatan yang bertujuan untuk membangun kesehatan masyarakat, menyadarkan masyarakat tentang pentingnya arti kesehatan dan merangsang masyarakat untuk selalu hidup sehat. Kegiatan-kegiatan tersebut diadakan pada tiap tingkat daerah pemerintah, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa sesuai dengan keadaan tingkat daerah yang bersangkutan. Kegiatan dilakukan atas prakarsa jajaran kesehatan dengan dibantu oleh instansi-instansi terkait, ABRI, Badan Koordinator Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN), Departemen Dalam Negeri serta organisasi-organisasi masyarakat yang formal maupun non-formal.

Dengan demikian dalam beberapa hal pada setiap daerah terdapat perbedaan pelaksanaan seperti penyebaran informasi melalui jumpa pers, wawancara dengan TVRI dan RRI dan atau seminar-seminar kesehatan sesuai dengan tema peringatan. Walaupun demikian kegiatan tersebut bertujuan untuk membangun kesehatan masyarakat dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam setiap peringatan Hari Kesehatan Nasional pada umumnya sebagai berikut:

- (1) Upacara bendera dan resepsi peringatan. Upacara dilaksanakan oleh seluruh jajaran kesehatan di tiap tingkat daerah yang bersangkutan. Untuk tingkat pusat, upacara juga dihadiri Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (2) Penyebaran informasi kesehatan dalam upacara menanamkan kesadaran kesehatan kepada masyarakat. Kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan antara lain berupa pers, wawancara baik di TVRI maupun RRI, pidato Menteri Kesehatan di radio, seminar kesehatan, pemasangan spanduk dan lain sebagainya.
- (3) Kegiatan menggerakkan kesehatan kepada masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggerakkan dan merangsang masyarakat dalam upaya membangun kesehatan. Kegiatan tersebut berupa pendirian dukungan kepada kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, seperti memberi bantuan kepada Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), yang bergerak dalam berbagai gerakan kesehatan antara lain imunisasi, Keluarga Berencana (KB), peningkatan gizi, penanggulangan diare yang masih sering menghinggapi masyarakat serta meningkatkan kesehatan ibu dan anak
- (4) Peningkatan mutu jajaran kesehatan. Kegiatan peningkatan mutu jajaran kesehatan dilakukan dengan memberi penghargaan kepada aparat terbaik dan instansi-instansi yang terlibat dalam dunia kesehatan, seperti para dokter, para juru rawat, bidan, rumah sakit-rumah sakit, apotik, petugas imunisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan gerakan peningkatan kesehatan masyarakat.

Maksud dari kegiatan ini, untuk merangsang mereka agar mau lebih giat lagi bekerja dalam upaya membangun kesehatan masyarakat yang optimal, sebagai bagian dari kesejahteraan umum dalam mencapai tujuan nasional. Penghargaan-penghargaan yang diberikan antara lain, Satya Lencana Karya Satya dari presiden Republik Indonesia bagi pejabat-pejabat yang berjasa dan mengabdikan selama 25 tahun dalam bidang kesehatan, dan Nugraha Karya Husada Tingkat II bagi rumah sakit umum-rumah sakit umum pemerintah yang terbaik.

Demikianlah kegiatan-kegiatan rutin yang selalu diselenggarakan dalam setiap peringatan Hari Kesehatan Nasional. Disamping kegiatan-kegiatan rutin tersebut, pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-22, tanggal 12 November 1986, diresmikan monumen Pembangunan Kesehatan sebagai lambang pembangunan kesehatan masyarakat.

Monumen didirikan di Desa Kringinan, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan Yogyakarta sebagai tempat dibangunnya monumen Pembangunan Kesehatan, karena kota Yogyakarta merupakan kota tempat dimulainya berbagai kegiatan bersejarah di bidang kesehatan, khususnya pembangunan kesehatan nasional. Kegiatan-kegiatan bersejarah tersebut antara lain, perintis kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) sebagai upaya menurut tingkat kematian bayi dan ibu karena melahirkan. Tempat dimulainya pernyataan atau kampanye pertama pemberantasan penyakit malaria pada tahun 1959 serta tempat awal dilaksanakannya program gizi melalui perbaikan menu makanan rakyat.

Kini kita telah memasuki Hari Kesehatan Nasional ke-27 semenjak ditetapkannya Hari Kesehatan Nasional tersebut pada tanggal 30 Desember 1964. Selama kurang waktu tersebut telah banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dalam upaya membangun kesehatan masyarakat, dan telah banyak pula keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai dari kegiatan-kegiatan tersebut yang menunjukkan kegiatan pembangunan kesehatan telah membawa hasil.

Saat ini sarana pelayanan kesehatan pemerintah telah tersebar dan menjangkau seluruh pelosok daerah di Indonesia. Hampir di setiap wilayah yang sangat ini telah terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat

(Puskesmas) dan posyandu-posyandu yang akan melayani kesehatan ibu dan anak. Di samping itu telah pula dibentuk organisasi-organisasi kesehatan di tiap tingkat daerah pemerintahan yang akan memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut menurut administrasi pemerintahan yang dimulai dari tingkat pemerintahan desa sebagai berikut :

- (1) Pada tingkat desa, organisasi upaya kesehatan masyarakat desa merupakan kegiatan integral dari pembangunan desa di bawah naungan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Organisasi LKMD ini merupakan wadah dari pembangunan tingkat desa yang dilakukan secara lintas sektoral. Karena pelayanan kesehatan masyarakat merupakan salah satu dari usaha pembangunan desa, maka pelayanan kesehatan masyarakat menjadi bagian dari tugas (LKMD).
- (2) Di tingkat kecamatan, kegiatan-kegiatan lintas sektoral dikoordinasikan oleh camat. Pada tingkat kecamatan ini, organisasi upaya kesehatan dilaksanakan oleh Pusaht Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dengan satelit-satelitnya yang berupa puskesmas pembantu.

Puskesmas terdiri atas dari unit-unit pelaksana yang sebagian besar tugasnya memberikan pelayanan untuk menyelesaikan masalah-masalah perorangan, terutama program-program desentralisasi. Unit-unit pelaksana dari Puskesmas tersebut adalah, Puskesmas membantu, Balai Penyuluhan (PB) dan Badan Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), yang dikoordinasi, diatur dan diarahkan oleh Puskesmas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit tersebut dalam upaya melaksanakan kesehatan masyarakat, yaitu meyelesaikan masalah-masalah perorangan, masalah-masalah lingkungan serta masalah perubahan tingkah laku.

Sebagai pelaksana program-program dekonsentrasi dilakukan oleh Puskesmas, yang di dalam hal ini tidak hanya bertugas sebagi pusat pelayanan, tetapi juga bertugas sebagai pengembangan wilayah, khususnya Pusat Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD). Untuk itu Puskesmas mempunyai organisasi sebagai berikut.

- (a) Organisasi yang bertugas mengatur fungsi upaya kesehatan secara

langsung terdiri atas (1) mereka yang bertugas mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah perseorangan, (2) mereka yang bertugas mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, (3) mereka yang bertugas mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah perubahan tingkah laku, yang di dalam hal ini termasuk upaya pembangunan kesehatan masyarakat desa dan pembinaan kerja sama lintas sektoral.

(b) Organisasi yang akan bertugas mengatur fungsi upaya kesehatan penunjang, yang dalam hal ini ditampung dalam tata usaha Puskesmas. Pengaturan fungsi tersebut difokuskan pada ; (1) pengaturan pembiayaan, (2) pengaturan pengadaan, khususnya pengadaan oba-obatan, (3) pengaturan administrasi Puskesmas, dan (4) informasi Puskesmas.

(3) Organisasi tingkat kabupaten atau kotamadya

Pada tingkat kabupaten atau kotamadya , karena masalah-masalah yang harus dilayani sudah jauh lebih luas, meliputi masalah-masalah di Puskesmas serta azas-azas pelaksanaannya, maka untuk tingkat ini pengaturan organisasi kesehatan sudah jauh lebih jelas. organisasi upaya kesehatan pada tingkat kabupaten atau kotamadya adalah sebagai berikut.

(a) Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II (Dati II)

Tugas dari dinas kesehatan tersebut, yaitu menyelenggaraan kesehatan lanjutan dan penunjang dari upaya kesehatan tingkat kecamatan. Untuk itu kemudian dibentuk organisasi yang akan menampung (1) rujukan penderita atau pasien dari upaya kesehatan tingkat kecamatan, berupa rumah sakit daerah tingkat II dan laboratorium kesehatan kabupaten, (2) kegiatan-kegiatan desentralisasi yang sebagian besar merupakan kegiatan penyelesaian masalah-masalah perorangan, (3) kegiatan-kegiatan pembantu yang mewadahi kegiatan-kegiatan pemberantasan wabah di lapangan, dan (4) unsur upaya kesehatan penunjang, yang dalam hal ini dapat pula berfungsi sebagai penampung kegiatan-kegiatan latihan.

(b).Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten atau Kotamadya (Dati II). Kantor Departemen Kesehatan ini berfungsi sebagai pengantar dan pembina upaya-upaya kesehatan pada tingkat

kecamatan. Untuk keperluan pelaksanaan tersebut, maka diperlukan suatu organisasi yang akan bertugas sebagai (1) pembina masalah-masalah perorangan, di mana di dalam pembinaan ini juga termasuk membina masalah pada *high risk groups*” (kelompok resiko tinggi), (2) membina masalah-masalah lingkungan, (3) membina masalah-masalah perubahan tingkah laku, termasuk membina upaya pembangunan masyarakat desa, (4) melaksanakan fungsi upaya kesehatan penunjang yang dapat ditampung dalam kegiatan tata usaha. Karena fungsi ini semakin berkembang, maka kegiatan dari fungsi tersebut dibagi dalam beberapa segi kegiatan, yaitu penunjang dalam pembiayaan dan suplay logistik, pengelolaan khusus tentang obat-obatan, pengelolaan tentang ketenagaan, informasi dan perencanaan, dan administrasi umum.

- (4) Pada tingkat provinsi, penanganan masalah kesehatan sama dengan organisasi yang menangani masalah kesehatan pada tingkat kabupaten atau kotamadya, hanya pada tingkat provinsi *sophistikasinya* lebih tinggi dan *differensiasinya* lebih luas. Organisasi yang menangani masalah kesehatan pada tingkat provinsi adalah sebagai berikut.
 - (a) Dinas Kesehatan Daerah Tingkat I, yang bertugas membina pelaksanaan azas desentralisasi dan menunjang pelayanan tingkat kabupaten atau kotamadya. Tugas-tugas dari Dinas Kesehatan tersebut yaitu (1) membina azas pelaksanaan desentralisasi yang meliputi masalah-masalah perorangan atau masalah lingkungan, (2) membina pelaksanaan azas bantuan yang meliputi masalah-masalah terhadap *high risk groups* maupun masalah lingkungan, (3) melaksanakan sistim rujukan, (4) menampung fungsi penunjang dalam bentuk tata usaha yang perlu difokuskan kepada beberapa segi yaitu penunjang dalam pembiayaan, suplai logistik dan pengadaan sarana-sarana fisik, pengelolaan ketenagaan, pengelolaan informasi dan perencanaan, dan administrasi umum.
 - (b) Kantor wilayah Departemen Kesehatan Provinsi. Dalam kantor wilayah ini terdapat organisasi-oraganisasi yang akan bertugas sebagai pembina masalah perorangan dengan *differensiasi* sesuai dengan keperluannya, membina masalah-

masalah "hidh risk groups" dengan differensiasi sesuai dengan keperluannya, membina masalah-masalah lingkungan sosial, budaya, fisik dan biologik, pembina dan pengatur masalah obat dan makanan, pengatur alokasi sumber daya dan mengevaluasinya, pengatur fungsi upaya kesehatan penunjang yang dapat ditampung dalam tata usaha dengan fokus kegiatan kepada pengelolaan ketenangan, administrasi umum, pendidikan dan latihan, dan perizinan, serta pelaksanaan sistim rujukan kantor wilayah dengan bantuan organisasi upaya kesehatan.

- (5) Di tingkat pusat terdapat Departemen Kesehatan sebagai oraganisasi upaya kesehatan tingkat pusat. Fungsi dari Departemen Kesehatan, yaitu merumuskan kebijaksanaan, mengelola pelaksanaan dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan. Setiap lima tahun sekali diadakan peninjauan terhadap organisasi ini dalam upaya penyempurnaan organisasi, sesuai dengan perkembangan di bidang kesehatan berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan dasar sistim kesehatan nasional.

Dalam lingkungan Departemen Kesehatan terdapat unit-unit pelaksana yang akan melaksanakan dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan tugasnya dalam rangka menunjang sebagian tugas pokok satuan organisasi induknya, misalnya Direktorat Jendral Palayanan Kesehatan sebagai organisasi induk unit pelaksana teknis. Sesuai dengan pasal 301 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 125 'Kab 'Bu '75, Direktorat Jendral Palayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Kesehatan melalui usaha penyembuhan penderitaan dan pemulihan keadaan cacat badan dan jiwa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka kegiatan tersebut, maka Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan mempunyai unit-unut yang berupa rumah sakit-rumah sakit, Balai Laboratorium Kesehatan, Balai latihan Kesehatan, Balai Kesehatan Lingkungan dan lain-lain yang langsung memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain keberhasilan-keberhasilan tersebut di atas, beberapa indikator penting dalam kesehatan masyarakat seperti angka kelahiran, usia harapan hidup, angka kematian bayi dan balita, serta tingkat

kesakitan secara umum telah memperlihatkan perbaikan. Angka kematian bayi berhasil diturunkan dari 62 kematian perseribu kelahiran hidup, turun menjadi 50 kematian. Berkat Keluarga Berencana (KB) yang dikampanyekan mulai dari kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok desa antara lain melalui operasi manunggal KB kesehatan yang dilakukan pada setiap Hari Ulang Tahun ABRI dengan mengikut sertakan masyarakat yang terkait secara terpadu, kini pertumbuhan penduduk telah dapat diturunkan dari 2,1 perseribu menjadi 1,9 perseribu. Begitu juga dengan angka kematian ibu bersalin telah mengalami penurunan yang menggembirakan, dan sebaliknya umur rata-rata penduduk kita naik dari waktu ke waktu.

Kini pemerintah telah berhasil melakukan berbagai terobosan dalam bidang kesehatan, misalnya pemanfaatan obat generik pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah. Obat generik ini merupakan obat yang harganya murah, tetapi mutunya hampir setaraf dengan obat yang harganya mahal, sehingga masyarakat yang kurang mampu dapat menjangkaunya. Melakukan kebijaksanaan untuk meningkatkan pendidikan kebidanan dengan jalan membuka pendidikan-pendidikan kebidanan tingkat lanjutan, melaksanakan program imunisasi pada masyarakat sejak bayi masih dalam kandungan, penetapan tenaga-tenaga medis secara nasional, penetapan tenaga-tenaga medis secara merata diseluruh nusantara dan pengembangan manajemen rumah sakit-rumah sakit secara terorganisasi dan lebih baik agar efisien dan mandiri.

Selain itu, pemerintah juga berhasil melakukan terobosan dengan apa yang disebut Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (PJKM). PJKM ini merupakan suatu program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu dalam hal pembiayaan kesehatan, dengan cara melakukan pembiayaan kesehatan secara gotong royong berdasarkan prinsip asuransi. Karena sebagaimana kita ketahui sekarang ini biaya kesehatan semakin mahal. Dengan semakin mahalnya biaya kesehatan, tentunya hal tersebut merupakan beban dari sebagian besar masyarakat Indonesia yang pada umumnya masih berada dalam tarap ekonomi menengah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikembangkanlah program PJKM di berbagai daerah, dan ternyata kegiatan ini mendapat sambutan dari masyarakat luas.

Namun dari semua keberhasilan-keberhasilan tersebut, yang terpenting adalah keberhasilan dalam usaha menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pemeliharaan dan hidup di dalam lingkungan yang sehat. Sekarang ini sebagian besar masyarakat telah banyak yang menyadari pentingnya arti kesehatan bagi diri mereka dan bagi pembangunan bangsa. Banyak dari masyarakat yang telah menjalankan perilaku kehidupan sehat menjaga kebersihan diri sendiri, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat tempat tinggal mereka.

Khusus pada masyarakat desa yang tingkat pendidikan dan pola befikirmya masih sederhana serta kepercayaan yang masih kuat pada leluhur dan adat istiadat mereka, sehingga lebih menyukai datang ketempat-tempat tradisional seperti ke makam-makam leluhur mereka, ke tempat-tempat keramat, ke orang-orang pintar atau dukun dan lain sebagainya bila mereka terserang wabah penyakit. Berkat keberhasilan menanamkan kesadaran kepada mereka, kini mereka mau datang kepusat-pusat pelayanan kesehatan atau ke rumah sakit-rumah sakit bila mereka terserang penyakit. Mereka pun sekarang tidak takut-takut lagi untuk bertanya dan menerima penyuluhan-penyuluhan yang diberikan petugas kesehatan yang datang kedesa mereka.

Begitu pula dengan lingkungan keluarga dan tempat tinggal mereka. Bila dahulu banyak rumah-rumah masyarakat desa yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Sekarang ini rumah-rumah tempat tinggal mereka telah banyak memenuhi syarat kesehatan seperti pengaturan sirkulasi udara di dalam rumah (ventilasi) yang lebih baik, tersedianya jamban (MCK Mandi, cuci, kakus), sanitasi dan pengaturan limbah pembuangan yang lebih baik dan teratur sesuai dengan persyaratan-persyaratan rumah sehat.

Untuk anak-anak usia sekolah yang merupakan modal utama pembanguna bangsa, melalui program-program Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) yang dilaksanakan di sekolah-sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas, dengan tujuan untuk menanamkan kesadaran tentang kesehatan dan bagaimana memelihara hidup sehat sejak dini, telah berhasil menanamkan kesadaran pada mereka tentang arti dan bagaimana hidup yang sehat.

Pada saat ini telah banyak sekolah-sekolah yang secara rutin mengundang tenaga-tenaga medis dan ahli-ahli kesehatan untuk memberikan penyuluhan dan penerangan kesehatan kepada murid-murid mereka, di samping juga mengadakan pemeriksaan kesehatan kepada anak-anak tersebut, seperti pemeriksaan gigi. Melalui program dokter kecil yang dilaksanakan di sekolah-sekolah telah menimbulkan antusias murid-murid tersebut untuk ikut berperan serta menggiatkan kesadaran kesehatan pada lingkungan sekolah mereka atau lingkungan tempat tinggal mereka, sehingga tidak mengherankan bila banyak dari mereka yang tertarik untuk menajadi dokter kecil.

Demikianlah keberhasilan-keberhasilan yang telah diperoleh dalam upaya pembangunan kesehatan. Walaupun berbagai keberhasilan telah dapat dicapai, tetapi tidaklah berarti bahwa upaya pembangunan kesehatan berhenti sampai disini saja. Masih banyak tantangan-tantangan dan hambatan yang harus diahadapi dimasa-masa yang akan datang. Apalagi dalam suasana pembangunan saat ini keseluruhan bidang kesehatan dan merupakan kunci keberhasilan pembangunan.

Sesuai dengan tema-tema yang dipilih dalam setiap peringatan Hari Kesehatan Nasional, menjadi tugas kita sebagai masyarakat Indonesia untuk memasyarakatkan perilaku hidup sehat, sadar kebersihan serta kesehatan lingkungan, karena pada dasarnya kesehatan adalah kebutuhan pokok setiap individu. Oleh karena itu sudah seharusnya bila setiap orang bertanggungjawab atas kesehatan sendiri dan kesehatan lingkungannya. Dan upaya tersebut sudah harus dilakukan sejak usia dini, sejak bayi dalam kandungan, sebab dampaknya akan mendukung peningkatan kualitas manusia dan masyarakat. Di samping itu tersebut juga dapat meningkatkan kreatifitas dan sumber daya manusia yang ada.

. Mengingat masa bayi dan balita merupakan masa yang sangat penting bagi pembentukan dan pertumbuhan dasar-dasar fisik dan kemampuan mental anak, selanjutnya perlu adanya pembinaan kesehatan pada anak-anak usia sekolah dengan tujuan untuk mewujudkan kestabilan fungsi dan pribadi anak. Karena anak-anak merupakan sumber dan kekuatan bagi kelancarah pembangunan selanjutnya. Untuk itu perlu adanya anak-anak yang mempunyai tubuh

yang sehat dan penuh vitalitas, karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat (*Mensana in Corpore Sano*), atau yang dapat pula kita artikan, bahwa di dalam bangsa yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Dan adalah menjadi tanggung jawab kita bersama karena tentunya semakin banyak masalah-masalah kesehatan yang harus dihadapi.

Dengan semakin pesatnya pembangunan fisik di mana-mana, seperti pembangunan pabrik-pabrik, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain, secara tidak langsung akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan. Akibat polusi yang ditimbulkan oleh pembangunan tersebut pada akhirnya akan mengganggu kesehatan masyarakat yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Belum lagi masalah penduduk yang belum mendapat sentuhan perbaikan. Lingkungan pemukiman yang sangat rapat antara satu rumah penduduk dengan rumah yang lain, dan tempat tinggal yang dekat dengan sungai-sungai yang penuh sampah dan limbah industri, merupakan potensi yang mempermudah timbulnya penyakit menular. Demikian pula dengan meningkatnya biaya kesehatan yang menjadi beban masyarakat dan masalah lingkungan kerja yang kadang-kadang tidak memperhatikan faktor kesehatan dan keselamatan kerja para karyawannya. Kelalaiian yang terjadi dalam pekerjaan tentunya akan bisa berakibat menurunnya kemampuan penampilan produktivitas kerja. Padahal sebagai negara yang sedang membangun, kita sangat membutuhkan rakyat dengan tenaga-tenaga yang sehat penuh kesegaran, kegairahan dan kekuatan sebagai modal dasar untuk lancarnya pembangunan. Oleh sebab itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, sebab perilaku hidup sehat merupakan kunci keberhasilan untuk menciptakan generasi penerus yang sehat demi kelangsungan pembangunan bangsa di masa yang akan datang.

Melalui peringatan Hari Kesehatan Nasional, mari kita tanamkan pengertian dan kesadaran tentang pentingnya kesehatan bagi masyarakat dan negara. Dan melalui Hari Kesehatan Nasional ini pula kita tingkatkan usaha-usaha pemeliharaan dan pembangunan kesehatan bagi diri sendiri, lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar kita.

DAFTAR PUSTAKA

1. *Kompas*, 12 November 1991.
2. *Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional Pada Tanggal 12 November 1980*, Jakarta : Departemen Kesehatan, 1980.
3. *Pedoman Pelaksanaan Peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-24 12 November 1988*, Jakarta : Departemen Kesehatan, 1988.
4. *Pidato Presiden Pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional Pada Tanggal 12 November 1986 di Sleman, Yogyakarta*.
5. *Sambutan Presiden Pada Pembukaan Pertemuan ke VIII Para Menteri Kesehatan Negara-negara Anggota WHO Wilayah Asia Tenggara tanggal 3 Oktober 1989*, Jakarta: Departemen Penerangan, 1989.
6. *Sistim Kesehatan Nasional*, Jakarta: Departemen Kesehatan Nasional RI, 1984.

HARI PRAMUKA

Masa Penjajahan

Pengalaman panjang Pramuka atau kepanduan di Indonesia selalu berdampingan dengan bidang pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sejarah perjuangan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Kedua aspek tersebut berjalan bersama seiring, seiring dan sejiwa sejak masa penjajahan Belanda yang menempa pemuda Indonesia menjadi kuat dan tabah. Selain itu sejak dahulu kala rakyat Indonesia terkenal gagah dan berani, pantang menyerah kepada siapapun. Demikianlah semangat kepanduan yang bersemayan dalam dada setiap pemuda Indonesia. Tantangan yang dihadapi selama ini adalah menguasai, memelihara dan mengembalikan semuanya dan kepercayaan pada diri sendiri, untuk menuju masa depan yang lebih baik.

Sehubungan dengan ini perlu direnungkan perjalanan sejarah Indonesia yang pernah menjadi menjadi bangsa besar kuat dan berjaya. Kesadaran berbangsa dan bernegara harus ditanamkan, jiwa patriotisme dan nasionalisme perlu dikobarkan pada setiap dada putra putri Indonesia. Untuk itu perlu adanya usaha yang nyata, antara lain pendidikan, penyuluhan, penerangan dan kepanduan yang dilaksanakan secara tertib, berencana dan berkesinambungan. Sejak berdirinya Budi Utomo (1908) yang mengartikan persatuan dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan, telah menjadi tonggak Sejarah Kebangkitan Bangsa Indonesia. Mulai saat ini bangsa Indonesia

menyingsingkan lengan bajunya, mensiagakan tekadnya, menggalang persatuan putra-putri, serta mengobarkan semangat berjuang demi menghapus penjajahan.

Pada saat pengaruh Budi Utomo ini sedang berkembang, berdirilah kepanduan cabang dari "Nederlands Padvinders Organisatie" (NPO) oleh P.Y. Smits dan Majoor de Yager di Jakarta pada tahun 1912. Organisasi ini diperuntukan bagi para remaja dan pemuda Belanda dan berkembang pesat di beberapa kota besar di Indonesia. Dalam kenyataannya beberapa remaja dan pemuda Indonesia yang termasuk "golongan sosial" tertentu dapat menjadi anggota NPO.

Ketika Perang Dunia I pecah hubungan negara Belanda dan Indonesia menjadi sukarela. Karena itu NPO di Indonesia diberi wewenang oleh kwartir. Karena itu NPO di Indonesia diberi wewenang oleh kwartir besarnya yang berada di Nederland untuk berdiri sendiri dan mempunyai kwartir besar sendiri. Maka pada tanggal 4 September 1914 Cabang NPO di Indonesia menjadi organisasi baru yang bernama "Nederland Indische Padvinders Vereniging" di singkat NIPV. Organisasi ini merupakan organisasi yang eksklusif. Selain remaja dan pemuda Belanda, para pemuda Indonesia dengan "ethische koers" tertentu dalam politik Belanda diperbolehkan menjadi anggota NIPV. Sedangkan dari kacamata para pejuang organisasi kepanduan yang dapat dimasuki pribumi ini merupakan alat yang ampuh bagi perjuangan kemerdekaan. Sejak saat itu timbul pemikiran untuk mendirikan kepanduan sendiri.

Pada tahun 1916 atas prakarsa SP Mangkunegara VII di Surakarta didirikan organisasi Kepanduan Nasional pertama di Indonesia dengan nama "*Javaasne Padvinders Organisatie*" disingkat (JPO). Disamping itu lahir pula kepanduan "*Taruna Kembang*" untuk daerah Kesunanan di bawah pimpinan Pangeran Suryobroto. Selanjutnya Muhammadiyah membentuk organisasi kepanduan ini berdiri "*Padvinder Muhammadiyah*" pada tahun 1918 di Yogyakarta, atas prakarsa K.H. Akhmas Dahlan dan dipelopori oleh pemuda-pemuda Syiraj Dahlan, Sarbini dan kawan-kawan. Pada tahun 1920 R.H. Hajid mengusulkan kepanduan ini diberi nama "Hizbul Wathon" (H.W). Lalu berdiri "Wira Tamtama" merupakan kepanduan dari Serikat Islam dengan A. Zarkasi sebagai promotornya.

Budi Utomo dalam tahun 1920 mendirikan "*Nationale Padvinderij*" dipimpin oleh Daslam Adi Warsito. kemudian jumlah perkumpulan kependuan semakin berkembang. Para pelajar Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pelajar menaruh perhatian terhadap kependuan baik yang bercorak kebangsaan maupun yang bersifat keagamaan. Jong Jawa cabang Mataram/Yogyakarta yang dipimpin oleh Ir. Supardi juga mendirikan Padvinderij. Dalam tahun 1921 kependuan Jong Jawa cabang Mataram tersebut menjadi *Jong Jawa Padvinderij*" Para pimpinnya antara lain Suropto (Prof. Mr. Suropto), Suratno Sastroamijoyo, Rustiman dan Subiono. Bendera pasukannya berwarna merah-putih, ubul-ubul gula kelapa dan kacu lehernya sama warnanya.

Dalam Kongres Jong Jawa V Di Solo tahun 1922 kependuan (Padvinderij) masuk dalam gerakan pemuda Jong Jawa dan diberi nama "Jong Jawa Padvinderij (J.J.P). Selanjutnya tempat-tempat lain yang ada Jong Jawa mendirikan pasukan JJP. Pada umumnya para pemimpin JJP yang pertama, adalah tempat-tempat pernah menjadi anggota pasukan NIPV, diantaranya Muwardi dr. Muwardi yang semasa pernah menjadi "Asistent Treop Leider" dalam NIPV. Pasukan-pasukan JJP kemudian diorganisasikan menjadi satu organisasi kependuan nasional dan Jakarta dipilih menjadi pusatnya. Para pemimpin antara lain Muwardi, Suratno Sastroamijoyo, dan Sugandi. Pada tahun Mahasiswa, membuka padvinderij untuk anak dan remaja Indonesia serta mengganti namanya menjadi "Pemuda Kebangsaan" (PK).

Pada tahun 1923 Jong Jawa cabang Bandung membentuk sebuah panitia terdiri dari M. Tabrani, Oto Subrata, Safrudi, Sumarjo dan Suidani untuk mendirikan pandirikan padvinderij. Dalam upayanya, kepanitiaan ini sepakat untuk mengusulkan persatuan seluruh kependuan putra Indonesia yang ada kemudian meminta pengesahan sebagai anggota Word Scout Association. Akhirnya disetujui untuk membentuk organisasi "Nasutiaon Padvinderij Organisatie" (NPO) dipimpin oleh Safrudin Suryodiputro yang kemudian berganti nama Suryoamidarmo. JJP pusat di Jakarta menyetujui maksud dan tujuan dari NPO untuk mempersatukan kependuan-kependuan di Indonesia. Tahun 1925 Ketua NPO Safrudin menyerahkan kepengurusannya

kepada para sarjana yang mempunyai pandangan politik “non kooperator” agar supaya NPO lebih maju. Ir. Soekarno terpilih sebagai Ketua NPO dan Mr. Sunaryo Wakilnya.

Beberapa anggota NPO diantaranya Sudioni, Simarjo, Abdul Muhni, Ibu Ayati Suditho Joyopuspito dan Emma Puradireja memisahkan diri dari NPO dan mendirikan “Jong Indonesisch nationale Padvinders Organisatie” (JIPO). Pada tahun 1928 NPO dan JIPO digabung menjadi “Indonesisch Nationale padvinder Organisatie” (INPO) dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Mr. Sunaryo. Sebagian anggota JIPO yang tidak ikut bergabung dengan INPO menggantikan nama JIPO menjadi “Pandu Indonesia” (PI) dipimpin Sumarjo dan Sudiani).

Kepanduan yang bercorak agama Pun berkembang dan bertambah. dalam tahun 1926 Wira Tamtama berkembang menjadi “Serikat Islam Afdeling Padvinderij (SIAP) dipimpin Syamsul Rizal, Mahfud Lamba dan Harsono Cokroaminoto. Setelah kemerdekaan RI namanya berubah menjadi “Serikat Islam Angkatan Pandu” (SIAP). Masih dalam tahun yang sama terdiri Nasional Islamieshe Padvinderij (NTIPIJ) dibawa Jong Islamieten Bond (JIB) dipimpin oleh Mr. Kasman Singodimejo, Bustamai dan Sarkiman. Kepanduan “Al Irsyad” di Surabaya dipimpin Ak. arnamun. Demikian pula kepanduab di luar Jawa yang dibentuk oleh para pemuda antara lain “Pandu Pemuda Sumatera” (PPS).

Organisasi kepanduan Indonesia saat itu merupakan tempat pembinaan perjuangan kemerdekaan Inndonesia. Dimana para pemuda memanfaatkan untuk mengorbankan semangat, lalu dibina dan dikembangkan baik watak, kepribadian maupun keterampilan. Sehingga lahirnya kepanduan nasional Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan masyarakat Indonesia sendiri.

Dengan tumbuhnya semangat persatuan dikalangan kepanduan nasional, maka pada tanggal 23 Mei 1928 dilangsungkan pertemuan di Jakarta. Hadir dalam pertemuan tersebut kepanduan seperti Dr. Muwardi dari (JJP), Sumaryo (INPO), dr. Muwardi (JJP/PK), Aruji Karyawinata dan Ramelan (SIAP), Mr. Moh. Rom (NTIPIJ). Pertemuan itu bersepakat untuk mempertinggi derajat dan mutu kepanduan nasional Indonesia serta memperkuat hubungan antara anggota, sehingga dalam satu kota terdapat lebih dari satu organisasi

kepanduan. Pada waktu yang hampir bersamaan di Solo didirikan suatu badan kepanduan bernama “Badan Persatuan Kepanduan Surakarta”, Sementara Yogyakarta didirikan “Badan Persaudaraan Kepanduan Mataram”. Puncak semangat kepanduan timbul setelah Kongres Pemuda Indonesia Pertama di Jakarta pada 30 April sampai dengan 2 Mei 1926. Kengres tersebut bertema “Menggugah Semangat Kerjasama diantara bermacam-macam organisasi pemuda di Tanah Air. Tujuannya adalah supaya dapat mewujudkan dasar pokok untuk lahirnya persatuan Indonesia, sitengah bansa-bangsa di dunia”.

Kegiatan kepanduan tidak hanya melibatkan putra saja, tetapi juga sebagai tempat pendidikan bagi para putra-putri Indonesia. Sejak JJP berdiri tahun 1922 kepanduan putri ikut serta dalam memajukan kepanduan nasional. Para perintis kepanduan putri diantaranya Ibu Suci Simarni, Ibu Surjandari, Imi, Titiék Darsono, Siti Rokhmah, dan Mugarumah. Setelah Kongres Pemuda Indonesia Pertama Mei 1926 kegiatan gerakan kepanduan semakin meningkat.

Dalam mengorbankan semangat persatuan dan perjuangan setiap insan yang basionalis tentu berbaga, keyakinan bahwa kemenangan pasti akan datang dalam kancah perjuangan itu tampil seorang pemuda “pandu Indonesia” Wage Rudolf Supratman. Ia berjuang melalui karya seni, dengan menciptakan lagu-lagu perjuangan.” Indonesia Raya”. Oleh Pemerintah Belanda, lagu tersebut dilarang diperdengarkan terutama di kalangan pemuda. Karena dengan syair lagu yang berbunyi:

Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku
Di sanalah aku berdiri, jadi Pandu Ibuku

Si pengarang bermaksud mengajak setiap warga Indonesia yang berjiwa pandu menjadi pelopor dalam perjuangan bangsanya. Setelah Kongres Wanita Indonesia pertama di Yogyakarta pada bulan Desember 1928, WR Supratman sebagai anggota pemuda Indonesia, kembali Kartini”. Kemudian dalam bulan September 1930 ia membuat sebuah lagu berjudul “KBI” khusus diperuntukan kepada Kepanduan Bangsa Indonesia.

Kepanduan Bangsa Indonesia berdiri antara tahun 1928 --1943, merupakan fusi dari beberapa organisasi pemuda kepanduan. Di antaranya “Pemuda Surya Wirawan” organisasi kpemuda dari Partai

Indonesia Raya (Parindra), Persaudaraan antara pemuda-kpemuda Indonesia (PAPI), Pandu Kebangsaan (PK) Indonesia Nasional Padvinders Organisasi (INPO), Kepanduan Jong Java(JJP) dan Pemuda Pandu Sumatra (PPS). Pelebaran Organisasi-Organisasi tsb adalah berkat usul PPS yang dipimpin Bahder Johan dan Syagaf Yahya.

Pada bulan Februari 1930 Kepanduan Bangsa Indonesia membentuk komisi Persiapan Badan Kepanduan Nasional Badan ini berdiri di atas dasar-dasar yang diambil dari azas-azas Kepanduan Dunia yaitu:

- (1) Kepanduan bermaksud mengajarkan para pemuda tentang segala permainan dan keterampilan mengenai kepanduan.
- (2) Pelajaran tersebut untuk memperhalus perasaan, pikiran, tabiat serta kesehatan.
- (3) Merupakan cabang olahraga bebas dari paksaan.
- (4) Untuk meningkatkan keterampilan menurut keadaan zaman, agar pemuda dapat dengan mudah mengerti dan menerima tugasnya.
- (5) Mempunyai tujuan mendidik pemuda supaya menjadi manusia berbudi luhur, baik, sanggup bekerja keras untuk negara dan bangsa, dan pada dunia pada umumnya.

Kepanduan bermaksud mengajarkan para pemuda (KB) sebagai hasil fungsi organisasi-organisasi kepanduan Indonesia, mempunyai ciri yang hampir sama dengan Indonesia Muda (IM). Dalam tahun 1981 KBI mulai terorganisasi dengan jumlah anggota sebanyak 27 cabang. Sebagai kepanduan yang bersifat kebangsaan, di-wujudkan dengan kain leher Merah Putih dan panji-panji Merah Putih, sedang pakaian seragamnya setengah pandu dan setengah militer

Pada tahun 1931 berdiri pula organisasi kepanduan baru, dengan nama (Kepanduan Rakyat Indonesia) KRI Bersamaan dengan itu Suluh Pemuda Indonesia didirikan di Malang; merupakan perkumpulan pemuda umum terlepas dari IM. dalam tahun yang sama PNI- baru mendirikan Kepanduan ini, diperoleh mengadakan kepanduan Rakyat Indonesia khusus untuk anak rakyat jelata. Kelompok ini, diperbolehkan mengadakan latihan. Tetapi di Jakarta dan Semarang KPI dilarang oleh pemerintah Belanda.

Walaupun ada larangan berkumpul KRI, SPI, PNI terus mengadakan kegiatan Akibat KRI hidup sendiri, karena kepanduan "politik" ini tidak turut dalam perpustakaan yang dibentuk tahun 1938.

Pada 30 April 1938 diadakan Konferensi KBI, SIAP dan HISBUL WATHON. Pada konferensi tersebut mendirikan satu federasi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia" (BPUPKI), Federasi ini akan mengadakan perkemahan umum dan mengundang berbagai kepanduan yang tidak termasuk dalam federasi tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut maka pada bulan Desember 1938 BPUPKI mengadakan perundingan dengan Jawa. Padv. Organisasi (JPO) HW, kepanduan azas Katholik Indonesia (KAKI), Al wathon dan Truno Kembang, Setelah semuanya mufakat, maka segala persiapan untuk keperluan perkemahan dikerjakan oleh BPPKI.

Usaha mempersatukan kepanduan dalam federasi BPPKI berhasil diantaranya yang mengabungkan diri pada bulan Februari 1941 adalah KBI, SIAP, Kepanduan Islam Indonesia, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Al wathony dan KAKI (Kepanduan Azas Khatolik Indonesia). Masih diharapkan masuknya Kepanduan Masehi Indonesia (KMI-Protestan) dan Hizbul Wathon.

Pada tanggal 10 Februari 1941 Badan federasi ini mengadakan konferensi di Solo, dan berhasil memutuskan :

- (1) Semua Kepanduan Indonesia boleh masuk dalam badan federasi
- (2) Untuk penetapan peraturan-peraturan dan pembulatan organisasi dibentuk satu panitia istimewa.
- (3) Merah Putih diakui sebagai bendera persatuan federasi
- (4) Diusahakan agar ada satu macam aba-aba untuk semua kepanduan.
- (5) Perkemahan besar yang dinamakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum atau Parkino akan diadakan dalam bulan Juli 1941 di Yogyakarta dan untuk ini dibentuk satu komite persiapan.
- (6) Parkino hanya boleh diikuti oleh kepanduan-kepanduan Indonesia yang tidak menghubungkan diri dalam NIPV (Nederlands Indische Padvinderasvereniging).
- (7) Pengurus harian BPPKI tetapi terdiri atas wakil-wakil KBI (sebagai ketua), SIAP (sebagai penulis) dan Natipy (sebagai bendahara).

Kemauan bersatu dan menggabungkan diri terdorong oleh rasa kebangsaan, baik dari kalangan pemuda secara umum maupun dikalangan pergerakan politik pada khususnya. KBI berazaskan kebangsaan, tidak berhaluan politik dan tidak menjadi bagian dari suatu partai/badan politik, tetapi tidak melarang pandu-pandunya yang telah berusia 18 tahun ikut dalam pergerakan politik. Pengurus Besar KBI diketuai Suarjo Tirtosupeno, Wakil ketua I Suratno Sastroamijoyo dan Wakil Ketua II Bahder Johan.

Melihat perkembangan usaha kegiatan BPPKI, maka kepanduan lainpun tidak mau ketinggalan dalam usah mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Beberapa organisasi kepanduan mulai berusaha menggalang kesatuann dan persatuan untuk bekerjasama di dalam satu wadah. Akan tetapi usaha tersebut menjadi terhenti karena pergolakan politik dan Perang Asia Timur Raya.

Bulan Maret 1942 balatentara Jepang dengan cepat dapat menaklukan Hindia Belanda dan menguasai seluruh Indonesia. Empat bulan kemudian Pemerintah Jepang mengeluarkan larangan berdirinya segala partai dan organisasi rakyat Indonesia termasuk gerakan kepanduan. Walaupun demikian tetap ada usaha untuk mendirikan kembali organisasi kepanduan. Pada tanggal 6 Februari 1943 pandu-pandu yang telah dibubarkan berhasil mengadakan Perkino II di Jakarta. Hal ini untuk menunjukkan betapa berartinya kepanduan bagi masyarakat. Tetapi rupanya Pemerintah Jepang sudah mempunyai rencana. Gerakan kepanduan Indonesia tetap tidak boleh diadakan dan sebagai gantinya anak-anak dan para pemuda Indonesia dimasukkan dalam gerakan "Seinendan".

Seinendan berdiri hanya untuk kepentingan Jepang sendiri, namun demikian para pemuda yang pernah aktif dalam kepanduan, kemiliteran dan organisasi pemuda lainnya kesempatan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan disiplin keterampilan militer demi persatuan dan patriotisme. Tidak sedikit mantan pandu yang masuk "Peta", Kepolisian dan Heiho digembleng oleh Jepang mengenai bagaimana cara-cara menggunakan senjata dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Penyalahgunaan tenaga kerja dalam "Romusha", dan perampasan kekayaan bangsa Indonesia telah membangkitkan patriotisme yang sangat tinggi dikalangan para pemuda dan pemimpin

bangsa Indonesia dan hal itu menjadi modal utama dalam memerdekakan bangsa dari setiap penjajahan.

Masa Kemerdekaan (Periode 1945--1950)

Setelah proklamasi kemerdekaan, secara serentak rakyat Indonesia baik tua maupun muda aktif dalam pergerakan untuk menghancurkan sisa penjajahan. Segala rintangan yang menghalangi disingkirkan. Pandu-pandu Indonesia baik putra maupun putri ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Negara RI. Di dalam keadaan "revolusi" inilah bangkit kembali semangat kepanduan dan semangat persatuan. Kesempatan ini dipergunakan oleh para pemimpin untuk menghidupkan kembali organisasi kepanduan Indonesia, sesuai dengan kehendak masa. Pandu-pandu Indonesia harus bersatu dalam tekad dan langkah.

Untuk itu maka pada bulan September 1945 bertempat di Gedung "Balai Mataram" Yogyakarta, berkumpul beberapa orang pemimpin pandu dari KBI, SIAP, HW, NATI PIJ, Tri Darma, KAKI dan PK (Pandu Kesultanan). Putusan pertemuan antara lain adalah :

- (a) Membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia.
- (b) Mengajukan pembentukan satu organisasi kepanduan untuk seluruh bangsa Indonesia.
- (c) Membentuk suatu Panitia Kerja untuk melaksanakan anjuran itu.
- (d) Mengadakan selekas mungkin Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia.

Seiring dengan itu Menteri PP dan K Ki Hajar Dewantara menganjurkan supaya para mantan pemimpin kepanduan Indonesia menghidupkan kembali gerakan kepanduan. Pada tanggal 2 September 1945, Menteri PP dan K, Ki Hajar Dewantara menetapkan falsafah dasar dalam sistem pendidikan Nasional yang sampai sekarang dijadikan pula sebagai sistem pendidikan kepanduan kepramukaan, yaitu sistem among :

- Ing ngarso sung tulodo
- Ing madyo mangun karso
- Tut wuri handayani.

Maka diselenggarakan akanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia di Surakarta pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 1945. Kongres dihadiri oleh para pemimpin kepanduan, KBI, HW, SIAP, NATIPIJ, JPO, KAKI, Taruna Kembang, Tri Darma, Al Wathony, Hizbul Islam, Sinar Pandu Kita, Kepandua Rakyat Indonesia dan Pandu Pasundan. Hasilnya dibentuk suatu organisasi kesatuan kepanduan dengan nama "Pandu Rakyat Indonesia", dengan ketua Dr. Muwardi, Komisaris Besar Umum bagian putra Hertog dan Komisaris Besar Umum bagian putri adalah Ny. Suhariyah Sutarman. Keputusan itu diiringi ikrar bersama "janji Ikatan Sakti" yang berbunyi :

- (1) Melebur segenap perkumpulan kepanduan Indonesia dan dijadikan satu organisasi kepanduan Pandu Rakyat Indonesia.
- (2) Tidak akan menghidupkan lagi kepanduan yang lama.
- (3) Tanggal 28 Desember diakui sebagai "Hari Pandu" bagi seluruh Indonesia.
- (4) Mengganti setangan leher yang beraneka warnanya dengan warna "Hitam".

Pandu Rakyat Indonesia dengan "Janji Ikatan Sakti" nya diakui oleh Pemerintah RI sebagai satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan No. 93/Bag. A. tanggal 1 Februari 1947.

Pada tanggal 25 Maret 1947 Presiden RI diangkat sebagai Pelindung Pandu Rakyat Indonesia. Selanjutnya tanggal 22 Agustus 1947 dibentuk Kwartir Besar Pandu Putri, untuk mengurus segala hal mengenai kepanduan putri, dipimpin Ny. Sutariah Sutarman.

Perkembangan Pandu Rakyat Indonesia dalam masa revolusi fisik terganggu oleh agresi militer Belanda dan NICA yang membonceng pada tentara sekutu. Tahun 1947 usaha melanjutkan konsolidasi organisasi Pandu Rakyat Indonesia menghadapi kesukaran, karena Belanda berusaha untuk menenyapkan kemerdekaan dan kedaulatan RI. Dan tahun 1948 merupakan waktu tersulit bagi pimpinan organisasi Pandu Rakyat Indonesia. Keadaan dalam negeri Indonesia tidak menentu dan sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam segala lapangan, termasuk kehidupan organisasi kepanduan. Hubungan cabang-cabang Pandu Rakyat Indonesia dengan daerah-daerah yang

diduduki belanda terputus. Segala kegiatan kepanduan terhenti. Tidak sedikit tokoh-tokoh kepanduan ikut berjuang dengan caranya masing-masing menentang penjajahan Belanda, dan tidak sedikit pandu-pandu yang gugur. Diantaranya dalam merayakan hari ulang tahun ke III RI pada tanggal 17 Agustus 1948, dimana seorang pandu bernama Suprpto yang sedang mengatur tata tertib perayaan tersebut tewas ditembak oleh Belanda di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Ia gugur sebagai Pandu, sebagai Patriot telah membuktikan kecintaannya kepada Ibu Pertiwi.

Setelah pengakuan kedaulatan dan dalam masa pemerintahan RIS Indonesia mulai bangkit lagi. Hubungan antara Kwartir Besar dengan cabang-cabang dan antar cabang mulai normal kembali. Pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950 diselenggarakan Kongres II di Yogyakarta, dengan tujuan mengkaji eksistensi, loyalitas, kekompakan dan keutuhan seluruh anggotanya. Hal itu karena tetap menjalankan kebijaksanaan dan kegiatannya. Keputusan Kongres II PRI diantaranya, untuk memperingati genap 5 tahun tanggal 28 Desember 1950 PRI, dan menerbitkan buku kenang-kenangan "Panca Warsa". Keputusan penting lainnya adalah perubahan gambar emblim PRI. Emblim lama untuk putra dan putri Darma diganti dengan yang baru, yaitu : gambar bedon (ujung tombak untuk putra dan gambar semangsi untuk putri, di tengah-tengah terpampang motif).

Sementara itu usaha-usaha untuk kembali ke negara kesatuan RI mulai dilancarkan dimana-mana. Beberapa Ormas dan Parpol mengulang tradisi lama dengan mendidik lagi "bagian kepanduannya" antara lain, Muhammadiyah dengan HW-nya, NU dengan Pandu Ansornya, Parindra dengan Pandu Suryawirawan-nya, Gol. Katholik dengan Pandu Katholiknya dan Gol. Kristen dengan Pandu Kristen-nya. KBI bangkit kembali bertepatan dengan hari wafatnya Pangeran Diponegoro 8 Januari 1952. Kepanduan yang tergabung dalam Pandu Rakyat Indonesia menyatakan keluar untuk berdiri sendiri, karena pada waktu itu Pandu Rakyat Indonesia bukan satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Dengan demikian dikeluarkan Keputusan Menteri PP dan K Nomor 23441/Kab. 6 September 1951, mencabut pengakuan Pemerintah (Keputusan Menteri PP dan K Nomor 93/

BABA 1 Februari 1947) yang menetapkan PRI sebagai satu-satunya perkumpulan yang menyelenggarakan pendidikan kependuan. Kemudian dengan keputusan Menteri PP dan K Nomor 8977/Kab. 12 Maret 1952, disahkan berdirinya IPINDO (Ikatan Pandu Indonesia) sebagai badan federasi kependuan dan sebagai badan sementara dalam hubungannya dengan Pemerintah RI melalui kementerian PP dan K. Pada tahun 1955 Ipindo berhasil menyelenggarakan Jambore Nasional di Pasar Minggu, Jakarta.

Pada 21 sampai 24 Januari 1957 Ipindo mengadakan seminar Kependuan Nasional Indonesia di Tugu, Bogor di bawah pimpinan Pandu Agung Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Periode 1961-1965. Menjelang tahun 1961 Kependuan Indonesia terpecah menjadi lebih dari 100 organisasi kependuan. Meskipun sebagian organisasi itu terhimpun dalam tiga federasi kependuan putri yaitu IPINDO, POPPINDO (Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia) pada tahun 1954, dan PKPI (Perikatan Kependuan Putri Indonesia). Kemudian tiga federasi tersebut melebur diri menjadi satu federasi yang diberi nama PERKINDO (Persatuan Kependuan Indonesia). Tetapi hanya 60 buah saja dari 100 lebih organisasi kependuan itu yang ikut di dalam Perkindo, dan jumlah anggota secara keseluruhan lebih kurang hanya 500.000 orang.

Gerakan Kependuan Indonesia mengalami kelemahan, hal ini mau dipergunakan oleh pihak komunis sebagai alasan untuk memaksa Gerakan Kependuan di Indonesia menjadi Gerakan Pionier muda seperti terdapat di negara-negara Komunis, tetapi Parkindo menentangnya, dan dengan bantuan Perdana Menteri Juanda, perjuangan mereka berhasil mendapatkan Keputusan Presiden RI No. 238 tahun 1961 tentang Gerakan Pramuka, yang pada tanggal 20 Mei 1961 ditandatangani oleh Ir. Juanda selaku Pejabat Presiden RI, karena Presiden Soekarno sedang berkunjung ke Jepang. Gerakan Pramuka adalah suatu Perkumpulan yang berstatus non-Governmental (bukan badan Pemerintah), dan yang berbentuk kesatuan. Gerakan Pramuka diselenggarakan menurut jalan aturan demokrasi, dengan pengurusnya (Kwartir Nasional, Kwartir Daerah, Kwartir Cabang dan Kwartir Ranting) dipilih di dalam musyawarah. Untuk itu semua yang

tergabung dalam organisasi-organisasi kepanduan di Indonesia, kecuali yang diselenggarakan oleh Komunis, melebur diri dalam gerakan pramuka.

Dengan SK Presiden tersebut Gerakan Pramuka oleh pemerintah ditetapkan sebagai satu-satunya badan di wilayah RI yang diperbolehkan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia. Organisasi lain yang menyerupai ataupun yang sama sifatnya dengan Gerakan Pramuka dilarang. Prinsip dasar metode pendidikan kepramukaan sebagaimana dirumuskan oleh Lord Baden Poowel tetap diterapkan, hanya cara pelaksanaannya yang dirubah, yaitu disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan Nasional Indonesia, kebutuhan regional di daerah-daerah maupun diserasikan dengan kebutuhan lokal di masing-masing desa.

Berdasarkan Keppres No. 447 tahun 1961, tanggal 14 Agustus 1961 jumlah anggota Majelis Pimpinan Nasional (Mapinas), 70 orang, di antaranya ialah Dr. Ir. Soekarno, Presiden RI (ketua), Sultan Hamengku Buwono IX (wakil ketua I), Brijen. TNI dr. Azis Saleh (wakil ketua), dan 67 orang sebagai anggota, sedangkan susunan anggota terdiri atas Sultan Hamengku Bowono IX (Ketua Kwarnas masa bakti 1961-1974), Brigjen TNI dr. Azis Saleh, dan 15 orang sebagai Andalan Nasinal Urusan.

Pada 14 Agustus 1961, organisasi Gerakan Pramuka dengan resmi diperkenalkan kepada rakyat Indonesia. Sekaligus Presiden melantik Mapinas, Kwarnas dan Kwarnari diteruskan dengan penganugerahan tanda penghargaan dan penghormatan berupa Panji Gerakan kepanduan Nasional Indonesia kepada Gerakan Pramuka sebagai Lambang Perjuangan untuk dijunjung tinggi dan dipertahankan kemulyaannya dalam segala lapangan. 14 Agustus kemudian disebut sebagai "Hari Pramuka". Lambang yang digunakan juga sebagai Tanda Pelantikan, berupa Tunas Kelapa Ciptaan Sumardjo Atmodipuro. Setangan leher berwarna merah putih. pakaian seragam, untuk kemeja berwarna putih, untuk rok atau celana berwarna khaki drill. Bendera Gerakan Pramuka yang ditengahnya terdapat lambang tunas kelapa berwarna merah, berlatar belakang putih dengan pinggiran di depan, diatas dan dibawahnya berwarna merah.

Gerakan Pramuka ini ternyata lebih kuat organisasinya, dan memperoleh tanggapan dari masyarakat luas. Semua ini berkat adanya sistem Majelis pembimbing yang dijalankan oleh gerakan Pramuka dari tingkat Nasional sampai tingkat Gugus depan. mengingat kira-kira 80% penduduk Indonesia tinggal di desa dan sebagian besar keluarga petani, maka Kwartir Nasional Gerakan Pramuka semula sudah mengajurkan menyelenggarakan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu tahun 1966 Menteri Pertanian dan Ketua Kwartir nasional Gerakan Pramuka mengeluarkan instruksi bersama, yaitu tentang pembentukan satuan Karya (Saka) Pramuka Tarunabumi. Dimana karya Pramuka Tarunabumi itu dibentuk dan diselenggarakan khusus untuk memungkinkan adanya kegiatan-kegiatan Pramuka di bidang pendidikan cinta pembangunan pertanian dan pembangunan masyarakat desa secara lebih nyata dan intensif. Berikutnya dibentuk pula Karya Pramuka Dirgantara, Karya Bahari, Karya Pramuka Bhayangkara, kemudian dibentuk lagi Wanabakti, ditetapkan dengan Keputusan Kwarnas No. 05 tahun 1984. Saka ini bergerak di bidang kehutanan, Bakti Husada, ditetapkan dengan keputusan No. 53 tahun 1985. Saka ini bergerak di bidang kesehatan. keluarga Berencana (Kencana), ditetapkan dengan keputusan No. 84 tahun 1985. Saka ini bergerak di bidang keluarga berencana. Satuan karya tersebut, terdiri dari pramuka-pramuka penegak (16 sampai dengan 20 tahun), sedangkan pramuka-pramuka siaga dan penggalang (7 sampai 10 tahun) dan (11 sampai 15 tahun) tidak ikut dalam satuan-satuan karya tersebut. tetapi Penegak dan Pandega dalam gugus depannya menjadi instruktur bagi adik-adiknya. Begitu pula dalam menangani masalah anak-anak yang berhenti sekolah di tengah jalan, maka Gerakan Pramuka mengarahkan kepada pendidikan kejuruan, untuk memberi bekal hidup kelak kepada anak-anak, pemuda-pemuda, terutama kepada anak-anak putus sekolah. Untuk itu maka diadakan kerjasama dengan Departemen Perindustrian. Sedangkan untuk meningkatkan kecakapan, keterampilan dan bakti masyarakat diadakan pula kerjasama dengan Palang Merah Indonesia, Bank Indonesia (Tabanas, Tappelpram), Departemen Pekerjaan Umum, Departemen P dan K, departemen Agama dan lain-lain.

Pada 5 Juli sampai 6 Agustus 1964 Kwarnas ikut berpartisipasi

dalam proyek Pembangunan PLTA Jatiluhur, Jawa Barat menyelenggarakan perkemahan besar diberi nama Perkemahan Satya Darma di desa Sukadamai, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pesertanya 2.400 Pramuka Penegak dan Pembina. Tujuannya adalah menggali saluran induk Jatiluhur sepanjang 72 meter lebar 35 meter. Dalam menyongsong peringatan Dasawarsa Konferensi Asia Afrika bandung bulan April 1965 Kwarnas mengadakan kegiatan yang diberi nama "Aksi Gotong Royong". Pelaksanaannya diserahkan kepada Kwarda, Jakarta dan Jawa Barat bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Seni Angkatan Darat. Kegiatannya berupa perbaikan jalan yang rusak akibat turunnya hujan yang turun terus menerus.

Begitulah kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Gerakan Pramuka terus berlanjut sesuai dengan berjalannya kurun waktu, dimana periode berikutnya dalam masa Bakti 1974-1978 Ketua Kwarnas diganti oleh HM Sarbini. Pada 30 Januari 1975 Panitia Formatir yang ditunjuk dengan keputusan Munas 74 No. 05/Munas/1974 tersebut diatas telah menyusun personalia Kwarnas masa bakti 1974--1978 terdiri atas : Letjen TNI M. Sarbini (ketua kwarnas), Ibu Tien Soeharto (wakil ketua I), Letjen TNI Mashudi (wakil ketua II), Letjen TNI Kusno Utomo (ketua harian merangkap sekjen), dan 13 orang Andalan Nasional (anggota).

Perkembangan selanjutnya organisasi Kwarnas dalam masa Bakti 1978-1983, tepatnya 3 Januari 1979 dengan keputusan MUNAS 78 No. 07/Munas?78 berhasil menyusun personalia Kwarnas yang terdiri atas : Letjen TNI (Purn) mashudi (ketua kwarnas) Letjen TNI (Purn) H. Soedirman (wakil ketua), Letjen TNI (Purn) H. Kusno Utomo (wakil ketua), Ibu Tien Soeharto (wakil ketua), Dr. WP Napitupulu (wakil ketua), Mayjen TNI (Purn) Soedarsono Mertoprawiro (sekretaris jenderal), dan 21 orang Andalan nasional (anggota).

Tujuan semula Gerakan Pramuka sebagaimana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat tercapai, yaitu membentuk sikap dan prilaku kearah yang positif, menambah pengetahuan dan pengalaman, serta menguasai keterampilan dan kecakapan sehingga menjadi manusia yang berkepribadian Indonesia dan percaya kepada

kemampuan diri sendiri, sanggup dan mampu membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan masyarakat bangsa dan negara, maka satuan Karya Pramuka perlu dikembangkan untuk memperoleh manusia-manusia terampil guna melaksanakan pembangunan.

Daftar Pustaka

1. Patah Tumbuh Hilang Berganti : *75 Tahun Kepanduan dan kepramukaan*, Kwartir nasional gerakan Pramuka, Jakarta.
2. Drs. Susanto Tirtoprojo SH, *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*, PT Pembangunan jakarta, 1961.
3. *Sejarah Organisasi Pembinaan dan Kegiatan Olahraga Indonesia* (berupa naskah belum diterbitkan) hal. 30.
4. Mr. A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* Pustaka Rakyat, Jakarta, 1949.
5. *Kursus Orientasi Gerakan Pramuka*. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, jakarta, 1983.

HARI KRIDA PERTANIAN

Salah satu dari sekian banyak peristiwa penting yang diperingati oleh bangsa Indonesia adalah Hari Krida Pertanian. Hari Krida Pertanian yang diperingati setiap tanggal 21 Juni merupakan suatu hari peringatan bagi masyarakat pertanian, yaitu masyarakat Indonesia yang kehidupannya tergantung pada pemanfaatan tanah dan air, baik usaha pangan, perkebunan, perikanan maupun usaha kehutanan.

Sebagaimana kita semua ketahui, sektor pertanian yang terdiri dari usaha tani, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan merupakan sektor penting di dalam perekonomian negara kita. Bidang usaha tani misalnya. Bidang ini merupakan sumber penghasil pangan utama masyarakat Indonesia. Hampir sebagian masyarakat Indonesia mempunyai mata pencaharian pokok bertani. Karena itu tidaklah mengherankan bila negara kita dikenal sebagai negara agraris, yaitu negara yang sebagian besar mata pencaharian pokok penduduknya bertani.

Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia. Letak Indonesia yang strategis baik dari segi geografis maupun astronomis, yaitu terletak antara dua benua Asia dan Australia dan diapit dua lautan, Lautan Pasifik dan Samudra Indonesia. Wilayah Indonesia terbentang dari Barat ke Timur Khatulistiwa sepanjang 5110 kilometer dan garis Meridien membujur dari Utara ke Selatan sepanjang 1888 kilometer.

Gugusan kepulauan Indonesia terletak diantara garis 60 Lintang Utara - 110 Lintang Selatan, dan diantara Garis Meredian 950 dan 1410 Timur Greenwich, dengan Iklim Tropis yang dimilikinya, menjadikan Indonesia mempunyai alam yang subur, yang sudah barang tentu sangat sesuai untuk daerah pertanian. Lautannya yang terhampar luas, yang lebih luas dari daratannya, mengandung begitu banyak ikan yang dapat dikonsumsi yang amat baik bagi usaha perikanan dan nelayan di Indonesia. Lautan Indonesia yang luasnya kurang lebih empat kali luas daratannya, memiliki kekayaan ikan sebanyak 4,5 juta ton ikan pertahunnya.¹⁾ Karena itulah selain bertani dan bercocok tanam, mata pencaharian pokok rakyat Indonesia, khususnya yang bertempat tinggal di pantai adalah menangkap ikan atau sebagai nelayan.

Di sektor kehutanan, hutan di Indonesia juga masih terbilang luas dan merupakan salah satu kekayaan hutan milik dunia, sebagai salah satu hutan tropis terbesar di dunia. Hasil hutannya begitu melimpah bahkan sebagian sudah dapat diekspor untuk konsumsi luar negeri. Disamping itu, Indonesia mengawetkan sejumlah kawasan hutan sebagai daerah lindung (suaka alam) dengan jumlah sekitar 5% dari luas seluruh hutan di Indonesia. Sampai tahun 1982 Indonesia telah mempunyai sekitar 200 lokasi suaka alam yang keseluruhannya berjumlah lebih dari 7 juta hektar. Karena itulah maka sebagian bermasyarakat Indonesia mempunyai mata pencaharian pokok pertanian, khususnya usaha tani. Mengingat sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting pertanian Indonesia, maka sejak awal berdirinya negara republik Indonesia (17 Agustus 1945), dibentuk organisasi yang akan menangani masalah pertanian di Indonesia.

Pada permulaan dibentuknya, organisasi atau kementerian yang menangani masalah pertanian diberi nama Kementerian Pertanian. Organisasi ini dibentuk tepat dua hari setelah Kemerdekaan Indonesia diproklamirkan (19 Agustus 1945) dengan Ir. R.P. Surachman Tjokroadisurjo sebagai Menteri Kemakmuran pertama. Melihat situasi Jakarta yang masih kacau, apalagi dengan kedatangan kembali Tentara Belanda yang ingin merebut kembali kemerdekaan yang berhasil kita peroleh, kemudian didirikan cabang Kementerian Kemakmuran di Magelang yang dipimpin oleh R.M. Reksohadiprojo. Dan pada bulan Juli 1947, kantor tersebut pindah ke Borobudur dan selanjutnya ke

Yogyakarta sebagai Ibukota RI setelah Belanda berhasil menguasai Jakarta pada tahun 1946.

Dengan pulihnya pemerintahan RI di Yogyakarta setelah diakuinya kedaulatan RI tanggal 27 Desember 1947, pada 21 Januari 1950 dibentuklah Kementerian Pertanian yang pertama dibawah pimpinan Menteri Sadjarwo dengan Ir. Gunung Iskandar sebagai Sekretaris jenderal (yang terus menjabat sebagai Sekretaris jenderal dalam Kementerian Pertanian RI sampai tahun 1958). Sementara itu, di Jakarta terdapat Kementerian Kemakmuran dari pemerintah RIS (Republik Indonesia Serikat) dimana Ir. Juanda menjabat sebagai Menteri.

Setelah terbentuk pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta dan meliputi seluruh wilayah Indonesia (kecuali Irian Barat), maka pada tanggal 6 September 1950 terbentuklah Kementerian Pertanian yang pertama dalam negara kesatuan RI dengan Mr. Tandiono Manu sebagai Menteri. Kementerian Pertanian ini terdiri dari jawatan-jawatan yang bergerak dalam bidang perkebunan, kehutanan dan perikanan. Selain itu terdapat pula beberapa kantor yang tugasnya meliputi hal-hal yang berkaitan dengan dunia pertanian dan peternakan.

Dengan terbentuknya Kabinet Kerja I tanggal 10 Juli 1959, nama Kementerian Pertanian diubah menjadi Departemen Pertanian, yang dipimpin oleh Kolonel Dr. Aziz Saleh. Di samping itu, dalam organisasi Departemen ini jabatan Sekretaris Jenderal dihilangkan dan diganti dengan beberapa pembantu utama, yaitu pembantu utama perencanaan, pembantu utama tenaga, pembantu utama perlengkapan, dan pembantu utama perbelanjaan.

Pada 6 Maret 1962, Departemen Pertanian digabung dengan departemen Agraria menjadi departemen Pertanian dan Agraria dengan menteri Sadjarwo SH. Departemen ini berada di bawah naungan Kompartemen Pembangunan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator, yaitu Chairul Saleh.

Selanjutnya dengan terbentuknya Kabinet Dwikora pada 27 Agustus 1964, Departemen Pertanian dan Agraria menjelma menjadi lima departemen, yaitu Departemen Pertanian, Departemen Per-

kebunan, Departemen Perikanan, Departemen Agraria, Departemen dan Kehutanan.

Tiap-tiap departemen tersebut dikepalai oleh seorang menteri yang berada di bawah satu kompartemen, yaitu Kompartemen Pertanian dan Agraria dengan seorang menteri koordinator. Sejak saat itu sampai terbentuknya Kabinet Pembangunan, Departemen Pembangunan, Departemen Pertanian tetap bernama Departemen Pertanian.

Terbentuknya Kabinet Pembangunan pada tahun 1967, membawa perubahan-perubahan di dalam organisasi Departemen Pertanian. Beberapa departemen yang pada masa masa Kabinet Dwikora antara lain Departemen Perikanan dan Departemen perkebunan menggabungkan diri ke dalam Departemen Pertanian dan menjadi satu Direktorat Jenderal di bawah Departemen Pertanian. Disamping itu dibentuk pula unit-unit lain, seperti Sekretaris Balai Penelitian Bimbingan Massal, Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.

Tahun 1974 berdasarkan Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974, di dalam Departemen Pertanian dibentuk dua unit baru, yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan Badan Pendidikan, latihan dan Penyuluhan Pertanian. Dengan terbentuknya kedua badan tersebut, maka lembaga-lembaga penelitian yang pada mulanya berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal-Direktorat Jenderal dialihkan di bawah pengelolaan kedua badan tersebut. Selain itu, kecuali direktorat Jenderal perkebunan, Direktorat Jenderal yang lain mempunyai sebuah Direktorat lagi yang akan menangani hal-hal yang lebih khusus sesuai dengan Direktorat Jenderal masing-masing.

Demikianlah antara lain perkembangan-perkembangan yang terjadi di dalam organisasi Departemen Pertanian yang terus mengalami peninjauan kembali dalam setiap lima tahun sekali. Sesuai dengan tujuan dibentuknya organisasi, maka sejak dibentuknya organisasi dengan nama Kementerian Kemakmuran (14 Juli 1947) hingga menjadi Departemen Pertanian, maka tugas-tugas Departemen pertanian adalah mempertinggi kehidupan masyarakat pada umumnya dan tingkat hidup petani pada khususnya. Dan sesuai dengan tugas dan tujuan tersebut, sejak awal Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) pertama, Pemerintah mulai melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk

memajukan usaha pertanian di Indonesia, baik di bidang usaha tani atau perkebunan, perikanan, kehutanan maupun peternakan.

Dalam bidang usaha tani atau perkebunan, Pemerintah berusaha mengadakan kegiatan pendidikan pertanian dalam upaya meningkatkan usaha dan keahlian para petani. Kegiatan pendidikan dilakukan dengan memberikan penerangan dan penyuluhan kepada para petani tentang bagaimana cara-cara bercocok tanam yang baik mulai dari memilih benih, memelihara sampai kepada cara melakukan panen yang baik. Mereka juga diperkenalkan kepada sarana-sarana pertanian yang modern untuk membantu mempermudah kerja para petani dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Disamping itu, mereka juga diberi bantuan modal dengan cara memberikan pinjaman kepada mereka dengan bunga yang rendah, seperti Kredit Bimbingan Masyarakat (Bimas), Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP) bagi Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam upaya mengadakan alat-alat prosesi dan gudang dalam rangka perbaikan-perbaikan kegiatan pasca panen. Selain itu terdapat pula Kredit Pengadaan dan Penyaluran Benih dalam rangka memperbanyak pengadaan benih padi unggul atau bermutu di kalangan tani. Kredit Mini dalam rangka membantu pembelian alat penyemprot hama untuk pengamanan produksi pangan dan lain sebagainya. Dalam rangka meningkatkan hasil usaha pertanian tersebut, Pemerintah juga melaksanakan apa yang disebut dengan Panca Usaha Tani. Panca Usaha Tani merupakan kegiatan-kegiatan pertanian yang meliputi penggunaan jenis bibit unggul yang bermutu, pengurusan pengairan (irigasi) yang baik, bercocok tanam yang baik, penggunaan pupuk yang tepat waktu jenis dan jumlahnya dan pemberantasan hama dan penyakit.

Untuk memberantas hama dan penyakit tanaman, kemudian dibentuk suatu pasukan yang bertugas melakukan pemberantasan hama dan penyakit tanaman melalui penyemprotan pestisida yang dinamakan Brigade Proteksi Tanaman (BPT). Selain itu dalam upaya memberantas hama dan penyakit tanaman yang dibentuk Satuan Udara Pertanian, yang bertugas memberantas hama dan penyakit tanaman melalui penyemprotan hama dari udara dengan menggunakan pesawat udara.

Sebagaimana para petani, penyuluhan bagaimana cara meningkatkan hasil produksi juga diperkenalkan kepada para nelayan, peternak dan mereka yang berusaha dalam bidang kehutanan atau pemanfaatan hutan. Para nelayan juga diperkenalkan pada sarana-sarana penangkapan ikan yang modern. Mereka juga diberi pinjaman modal dengan bunga rendah, disamping itu juga diberi penerangan dan penyuluhan tentang bagaimana cara memelihara ikan yang baik, mulai dari memilih benih, memelihara sampai pada pengaturan penangkapan ikan yang baik.

Sedangkan dalam bidang peternakan, selain diberi penyuluhan mengenai pemeliharaan ternak yang baik, juga diadakan pembinaan bibit ternak dan unggas, pemberantasan dan pencegahan serta pembinaan makanan ternak. Begitu pula dengan bidang perikanan untuk meningkatkan hasil produksi dibangun pelabuhan-pelabuhan perikanan di bawah produksi masing-masing serta perlengkapan fasilitas pemasaran.

Masih dalam upaya memajukan usaha tani dan nelayan, Pemerintah membentuk koperasi-koperasi bagi petani dan nelayan untuk menyalurkan hasil produksi mereka, sehingga para petani dan nelayan tersebut tidak perlu lagi menjual hasil produksi mereka kepada tengkulak yang dapat merugikan petani dan nelayan.

Kemudian dalam usaha membina para petani dan nelayan telah dibentuk suatu kelompok yang dinamakan Kelompoktani-nelayan. Kelompoktani-nelayan merupakan suatu perkumpulan petani-nelayan yang terikat secara non formal atas dasar keserasian, kesamaan kondisi sosial, ekonomi dan sumber daya, keakraban, kepentingan bersama dan saling percaya mempercayai.²⁾ Kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan antara lain membentuk kelompok belajar, saling memberikan informasi kepada sesama petani-nelayan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan profesi mereka dan yang sekiranya dapat membantu kemajuan petani dan nelayan.

Dalam kelompok tani-nelayan tersebut terdapat ketua yang memberikan pengarahan dan pembinaan kepada Kelompok tani-nelayan, yang disebut dengan Pemuka tani-nelayan sebagai sesepuh perkumpulan-perkumpulan di bawahnya. Anggota pemuka tani-nelayan

dipilih dari orang-orang yang mempunyai ketrampilan khusus, dengan tugas utama sebagai penasehat dan penghubung antara Kelompok tani-nelayan dengan pihak-pihak lain.

Selain itu terdapat pula Kontak tani-nelayan Andalan. Kelompok Kontak tani-nelayan Andalan ini merupakan kumpulan dari Kontak tani-nelayan yang diandalkan para kontak tani-nelayan lainnya pada suatu wilayah tertentu seperti kabupaten, provinsi dan tingkat nasional. Tugas dari Kelompok tani-nelayan Andalan tersebut selain sebagai pembawa aspirasi para petani dan nelayan di daerahnya. Kelompok ini juga mempunyai tugas membantu pemerintah dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan sektor pertanian.

Setelah menjalani hampir lima tahapan Repelita, kegiatan - kegiatan yang telah dilakukan asejak Repelita ke I telah memperlihatkan hasil-hasil yang mengembirakan. Sekarang ini jumlah hasil produksi baik itu produksi pangan (beras), produksi ikan, produksi daging ternak maupun produksi hasil hutan, rata-rata telah menunjukkan jumlah peningkatan. Produksi beras misalnya setelah Repelita I jumlah produksi telah meningkat sebanyak 4,5% setahunnya.³⁾ Bahkan keberhasilan dibidang pangan tersebut, Pemerintah Indonesia berhasil memperoleh penghargaan dari organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau *Food and Agriculture Organization (FAO)*.

Dewasa ini tingkat kehidupan dan kesejahteraan para petani dan nelayan telah dapat memenuhi keperluan mereka akan perlengkapan-perengkapan pertanian atau penangkapan ikan sendiri. Kehidupan sosial ekonomi mereka sudah mambaik, dengan rumah-rumah yang baik, anak-anak yang sehat karena kebutuhan gizinya terpenuhi, dan mereka terjamin.

Saat ini telah banyak petani dan nelayan yang telah berhasil mengembangkan usahanya, bahkan telah banyak pula dari petani dan nelayan tersebut yang dapat membantu petani-petani lain yang belum mampu berdiri sendiri.

Sejalan dengan meningkatnya pembangunan sektor pertanian, Pemerintah memandang perlu untuk menetapkan adanya suatu hari

peringatan di sektor pertanian. Hal ini dimaksudkan sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil yang telah diperoleh dan untuk meningkatkan, mendalami dan memahami berbagai masalah yang berkaitan dengan dunia pertanian, yang terpusat pada satu tanggal 21 Juni sebagai hari peringatan sektor pertanian, yang disebut sebagai "Hari Krida Pertanian".

Penetapan 21 Juni sebagai Hari Krida Pertanian dilakukan Pemerintah pada tahun 1973, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 297/Kpts/Um/19783, yang menetapkan bahwa tanggal 21 Juni sebagai satu-satunya hari peringatan disektor pertanian. Dan atas petunjuk Presiden, hari peringatan tersebut dinamakan "Hari Krida pertanian".⁴⁾

Selanjutnya pada tahun 1983, ketetapan tersebut dipertegas lagi oleh Depatermen Pertanian melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 270/Kpts/Um/6/1983, yang menetapkan bahwa setiap tanggal 21 Juni Hari Krida Pertanian perlu diperingati dan dihayati oleh masyarakat luas pada umumnya dan masyarakat pertanian pada khususnya.⁵⁾

Dipilihnya 21 Juni sebagai Hari Krida Pertanian didasarkan pada keadaan astronomi bumi pada bulan tersebut. Ada dua alasan mengapa tanggal 21 Juni ditetapkan sebagai Hari Krida Pertanian. Alasan pertama, bahwa pada tanggal 21 Juni ditinjau dari segi astronomi, matahari yang memberikan tenaga kehidupan bagi tumbuh-tumbuhan, binatang dan manusia, berada pada garis Balik Utara ($23\frac{1}{2}^{\circ}$ LU), di mana pada saat itu di Indonesia tengah terjadi pergantian musim. Di sebagian besar wilayah Indonesia telah berakhir musim kemarau, dan dimulainya awal musim penghujan. Biasanya pada saat demikian dalam keadaan proses produksi tanaman juga berakhir, bahkan akan mempersiapkan produksi selanjutnya. Dengan demikian dalam keadaan seperti itu hampir semua kegiatan para petani dan nelayan beserta keluarganya telah mencapai puncak keberhasilan jerih payahnya berupa panen raya. Panen raya ini meliputi baik tanaman pangan, perkebunan, peternakan maupun perikanan. Hasil pertanian seperti cengkeh, lada, pala dan juga ikan "depik" yang terdapat di Aceh Tenggara di panen pada sekitar bulan Juni sampai Juli. Pada saat demikian pada umumnya masyarakat pertanian menyatakan syukur atas

hasil yang telah diperoleh dan berdo'a agar produksi yang akan datang dapat lebih baik lagi.

Alasan kedua berdasarkan sistem pembagian musim yang disebut Pranata Mangsa. Pada akhir abad ke 19, mulai diperkenalkan apa yang disebut dengan Pranata Mangsa, yaitu suatu sistem pembagian musim (12 musim) yang diuraikan secara lengkap meliputi hujan, angin, serangga, penyakit-penyakit unggas dan lain sebagainya. Dalam pembagian sistem tersebut, tanggal 21 Juni merupakan satu permulaan musim yang merupakan permulaan dari siklus 12 musim tersebut, dimana dalam dunia pertanian masa itu merupakan masa panen dan merupakan masa yang baik untuk penanaman kembali.

Dengan demikian pada bulan-bulan sekitar bulan Juni merupakan bulan-bulan yang penting dalam masyarakat pertanian. Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah bila pada bulan tersebut seluruh masyarakat pertanian mengadakan suatu upacara peringatan sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang telah dilimpahkanNya kepada kita semua, terutama masyarakat pertanian. Berdasarkan kedua hal tersebut maka tanggal 21 Juni dipilih sebagai hari peringatan di sektor pertanian.

Sesungguhnya masyarakat pertanian sendiri telah mempunyai hari-hari peringatan tertentu yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam dunia pertanian. Hal tersebut telah diwariskan oleh nenek moyang mereka secara turun temurun, dan telah berakar menjadi suatu tradisi di kalangan masyarakat tani. Tetapi peringatan-peringatan tersebut masing-masing terpisah satu sama lain. Ada perbedaan hari peringatan antara masyarakat tani dan nelayan, seperti upacara sedekah bumi, bersih desa dan lain-lain, yang biasa dilakukan pada saat akan memulai penanaman atau setelah melakukan panen pada masyarakat yang melakukan usaha tani. Sedangkan pada masyarakat nelayan, hari-hari peringatan yang mereka adakan berbeda dengan yang melakukan masyarakat tani dan disesuaikan dengan adat istiadat mereka sebagai nelayan.

Dengan demikian dalam masyarakat pertanian terdapat berbagai upacara peringatan yang dilakukan secara terpisah-pisah, padahal tujuan dari upacara-upacara peringatan tersebut pada dasarnya sama,

yaitu sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunianya berupa hasil panen yang telah mereka peroleh. Upacara tersebut juga merupakan sarana untuk mengoreksi diri sendiri atas kekurangan-kekurangan yang dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang. Untuk menyatukan hari-hari peringatan tersebut dengan tanpa mengurangi makna dan tujuan dari peringatan tersebut, dan dalam rangka meyatukan perasaan berbagai pihak yang hidup dan bergerak di bidang pertanian, hingga dengan demikian dapat memperkuat landasan bagi pembangunan pertanian sebagai salah satu faktor penting pembangunan Indonesia pada umumnya dan pembangunan di bidang pertanian pada khususnya, maka oleh pemerintah dilakukan pengintegrasian terhadap semua hari-hari di lingkungan pertanian pada satu tanggal yaitu 21 Juni, dengan nama Hari Krida Pertanian.

Selain sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua keberhasilan yang telah dilimpahkanNya, pada hakekatnya Hari Krida Pertanian merupakan hari mawas diri, kebanggaan, penghargaan dan hari krida atau dharma. Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa melalui Hari Krida Pertanian dapat ditanamkan pengertian dan kesadaran tentang penggunaan dan peranan pertanian bagi masyarakat dan negara. Di samping itu Hari Krida Pertanian juga merupakan dorongan kepada masyarakat, terutama masyarakat pertanian untuk mendukung dan meningkatkan pembangunan, khususnya pembangunan sektor pertanian.

Melalui Hari Krida Pertanian hendaknya masyarakat pertanian manusia yang menggunakan kekayaan alam, seperti matahari, air, iklim, bumi, tumbuh-tumbuhan, binatang dan zat-zat mineral yang terkandung di dalam bumi dapat menyatakan rasa syukurnya atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya masyarakat pertanian diharapkan untuk memohon agar pada tahun-tahun berikutnya dapat memperoleh rahmat yang lebih besar dan lebih mencukupi.

Pada peringatan Hari Krida Pertanian ini, masyarakat pertanian dapat beristirahat sejenak dan menikmati hasil yang mereka peroleh sebagai jerih payah mereka selama ini. Selain itu mereka juga diharapkan untuk tetap mawas diri, dengan cara melakukan evaluasi atas hasil usahanya selama ini, meneliti kekurangan-kekurangan serta

mencari penyebab-penyebab dari kekurangan yang ada dan menetapkan atau menentukan tindakan apa yang harus dilakukan dalam rangka memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut untuk kemajuan usahanya pada masa yang akan datang.

Pada Hari Krida Pertanian, masyarakat pertanian dapat beristirahat sejenak dan berbangga hati sejenak atas prestasi yang telah berhasil mereka peroleh setelah setahun penuh bekerja tanpa mengenal lelah. Saat ini masyarakat pertanian dapat berbangga hati atas peranan yang telah mereka lakukan dan kewajiban serta tanggung jawabnya sebagai penghasil yang sangat penting dalam pembangunan negara.

Pada Hari Krida Pertanian lah masyarakat pertanian berkesempatan untuk memberikan dan menerima penghargaan atas segala cipta, karsa dan karya yang telah mereka hasilkan untuk kepentingan pertanian di negara kita. Penghargaan tersebut seperti penghargaan kepada penemu-penemu jenis padi baru yang lebih tahan hama dan lebih baik mutunya. Penghargaan terhadap penemuan jagung metro, penemuan tebu Ps4, ikan mujair yang berukuran lebih besar, tembakau Ikhassa dan lain sebagainya, yang pada pokoknya merupakan bukti dari kemajuan di bidang pertanian.

Tujuan pemberian penghargaan ini kecuali menarik simpati dan partisipasi masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun masyarakat pertanian sehingga mereka mau mendukung dan mengembangkan penemuan tersebut. Hal ini juga dilakukan untuk mendorong munculnya cipta, karya dan karsa yang baru yang lebih baik dan lebih besar yang tentunya berguna bagi terwujudnya masa depan pertanian yang lebih baik dan lebih meyakinkan.

Pada Hari Krida Pertanian, masyarakat pertanian dapat berbudi dharma dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan nyata yang bermanfaat bagi kepentingan keluarga, desa dan tanah air, seperti melakukan penghijauan, melakukan perbaikan irigasi, melakukan penyebaran bibit ikan di sungai-sungai dan danau-danau, pembukaan modal bagi investasi koperasi, perbaikan prasarana produksi dan lain sebagainya. Pada Hari Krida Pertanian ini, masyarakat pertanian juga dapat berkrida dan berdharma sebagai pencerminan yang positif dan konstruktif dari rasa syukur dengan melakukan kegiatan-kegiatan

seperti memberi sedekah, membantu petani-petani atau nelayan-nelayan lain yang membutuhkan bantuan dan lain-lain.

Sesuai dengan tujuan dan hakekat dari peringatan Hari Krida Pertanian, dalam setiap peringatan diselenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengedepankan jiwa Hari Krida Pertanian, yaitu bersyukur, mawas diri, berbangga hati, penghargaan dan berkrida atau berdharma. Setiap peringatan diselenggarakan secara sederhana, khidmat tetapi cukup meriah, yang dilaksanakan mulai dari tanggal 21 Juni dan mencapai puncaknya tanggal 21 Juli. Dalam setiap peringatan dibuat suatu tema yang sesuai dengan program utama yang hendak dicapai pada tahun yang bersangkutan, dan bernafaskan peningkatan gairah dan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan Lima Tahun (Pelita), khususnya peningkatan sektor pertanian.

Hari Krida Pertanian merupakan hari yang sangat berarti bagi masyarakat pada umumnya, maka Hari Krida Pertanian diperingati oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat pertanian, termasuk instansi-instansi dan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pembangunan sektor pertanian. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan hari peringatan tersebut dibagi menjadi dua bagian, kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah dalam rangka peringatan Hari Krida Pertanian secara nasional adalah dengan mengadakan suatu upacara bendera. Upacara ini dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah dan lembaga-lembaga pertanian baik yang berada di pusat maupun di daerah-daerah. Upacara dihadiri oleh aparat-aparat pemerintah, unsur tani serta organisasi-organisasi profesi, asosiasi atau pengusaha yang berkaitan dengan dunia pertanian. Dalam upacara ini, selain dilakukan acara pengibaran Sang Saka Merah Putih, juga diselenggarakan acara do'a bersama sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai dalam pembangunan pertanian.

Kemudian pemerintah mengadakan kegiatan penyuluhan dan penerangan serta gerakan penanaman keseluruhan lapisan masyarakat dengan tujuan untuk menanamkan kesadaran dan pengertian kepada

masyarakat tentang pentingnya sektor pertanian bagi negara Indonesia, dan pentingnya sektor pertanian bagi negara Indonesia, dan pentingnya memajukan usaha pertanian. Dalam rangka tujuan tersebut, maka diadakanlah kegiatan-kegiatan kampanye usaha meningkatkan pertanian antara lain melalui wawancara di televisi (TVRI), wawancara di radio (RRI), temu pers, teks pidato menteri dan pejabat tinggi lainnya dan lain sebagainya.

Selain itu diselenggarakan display atau pameran sederhana oleh berbagai organisasi dan asosiasi di lingkungan pertanian berupa pameran foto-foto dan data-data mengenai keberhasilan yang berhasil dicapai dalam pembangunan pertanian. Mengadakan kegiatan bakti sosial, antara lain berupa kunjungan ke pantai-pantai jompo, ke rumah-rumah yaitu piatu, mengadakan pasar murah, khitanan massal serta kegiatan-kegiatan bakti sosial lainnya.

Di samping itu, dalam rangka kegiatan peringatan musyawarah antara petani, pemerintah dan pengusaha. Tujuan dari kegiatan ini selain untuk mempertemukan pengusaha dengan petani sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara petani dan pengusaha, juga dalam rangka memasarkan hasil produksi pertanian. Kegiatan ini juga bertujuan untuk membantu meningkatkan penghasilan petani dan juga bertujuan untuk membantu meningkatkan penghasilan petani dan membantu menghindari para tengkulak yang dapat merugikan petani.

Kemudian pemerintah juga mengadakan kegiatan seminar sehari mengenai penggalan dan penjiwaan tema Hari Krida Pertanian. Dalam seminar ini dibahas tentang apa tujuan dari tema yang dibuat dan mengapa tema tersebut dipilih, dengan tujuan untuk merangsang masyarakat terhadap tujuan dari tema dan program yang dibuat pada tahun yang bersangkutan. Untuk merangsang dan mendorong masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian terutama masyarakat petani menghasilkan karya-karya yang lebih baik, dalam setiap peringatan Hari Krida Pertanian, pemerintah juga mengadakan pemberian penghargaan yang dinamakan Satya. Penghargaan ini diberikan antara lain kepada petani atau nelayan teladan, penyuluh pertanian teladan dan orang-orang yang berhasil menemukan atau membuat penemuan baru yang bermanfaat demi kemajuan pertanian.

Sebagaimana kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pemerintah, maka kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat juga tidak lepas dari tujuan dan hakekat dari Hari Krida Pertanian, yaitu bersyukur, mawas diri, berbangga hati, penghargaan dan berkrida atau berdharma. Sesuai dengan hakekat tersebut, di dalam masyarakat, khususnya masyarakat pertanian diselenggarakan kegiatan sembahyang bersama oleh para petani dan nelayan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini, yaitu sebagai rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas hasil yang telah dicapai dan memohon hasil yang lebih baik pada masa-masa yang akan datang.

Selain itu, dalam rangka berkrida atau berdharma, dalam setiap peringatan Hari Krida Pertanian, masyarakat pertanian mengadakan kegiatan gotong royong dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memajukan pertanian, seperti perbaikan irigasi, melakukan penanaman kembali hutan-hutan (reboisasi), mengadakan pemupukan, melakukan pengumpulan dana untuk membantu petani atau nelayan lain yang membutuhkan dana dan lain sebagainya.

Dalam rangka peringatan Hari Krida Pertanian ini masyarakat juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pameran yang memperlihatkan hasil-hasil kemajuan pertanian daerah mereka, seperti pameran foto-foto dan data-data mengenai kemajuan pertanian di daerah mereka masing-masing. Dalam kegiatan ini juga diadakan lomba ketangkasan mengenai pertanian dengan tujuan untuk menguji keterampilan petani tentang dunia pertanian dan untuk merangsang mereka menghasilkan karya-karya baru atau inovasi baru di bidang pertanian. Sebagai perangsang untuk aktivitas ini, bagi mereka yang berhasil dalam kegiatan tersebut mendapat penghargaan atas keberhasilannya tersebut.

Di samping kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dalam rangka mempererat hubungan masyarakat pertanian, pada setiap peringatan Hari Krida Pertanian juga diselenggarakan pertandingan-pertandingan olahraga antar sesama petani atau nelayan. Pertandingan olahraga tersebut seperti pertandingan bola volley, catur, bulu tangkis, dan olahraga rakyat lainnya yang mereka kenal.

Masih dalam usaha mempererat hubungan antar sesama petani nelayan, dalam setiap peringatan Hari Krida Pertanian diselenggarakan

acara khusus berupa pertemuan petani-nelayan tingkat nasional yang disebut dengan Pekan Nasional Pertemuan (Penas) Kontaktani-nelayan. Dalam pertemuan ini diadakan tatap muka dan temu wicara antara petani-nelayan di seluruh nusantara dengan pemerintah. Di sini mereka dapat menceritakan kemajuan-kemajuan pertanian di daerah mereka masing-masing, bertukar pikiran dan pengalaman antara sesama petani-nelayan yang dapat menambah pengetahuan mereka serta mengajukan usul kepada pemerintah demi kemajuan pertanian di daerah-daerah asal mereka. Dalam pertemuan nasional ini juga diselenggarakan kegiatan unjuk tangkas tingkat nasional untuk menguji sejauhmana tingkat pengetahuan mereka di bidang yang mereka geluti sebagai petani. Berkat kerjasama dalam pertemuan nasional tersebut, kontaktani-nelayan Indonesia sudah banyak yang mendapat kesempatan berkunjung ke negara-negara lain untuk mengadakan studi perbandingan, bertukar pikiran, informasi dan pengalaman. Dengan demikian mereka dapat menimba ilmu pengetahuan dari petani-petani di negara-negara yang sistem pertaniannya sudah lebih maju dari Indonesia, seperti Thailand, Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Belanda, Bangladesh dan negara-negara lainnya.

Demikianlah antara lain kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan dalam peringatan Hari Krida Pertanian, yang berlangsung mulai tanggal 21 Juni dan berakhir pada tanggal 21 Juli setiap tahunnya.

Saat ini telah banyak keberhasilan-keberhasilan yang telah dapat dicapai dalam pembangunan pertanian. Namun demikian tidaklah berarti bahwa pembangunan pertanian berhenti sampai disitu saja. Masih banyak tantangan dan hambatan yang masih harus dihadapi dan dipecahkan di masa-masa yang akan datang.

Masalah perikanan misalnya, yang sampai saat ini baru 21% dari jumlah ikan yang ada di perairan umum dan laut di negara kita yang berhasil digali dan dimanfaatkan.⁶⁾ Karena itu masih perlu diadakan peningkatan pengelolaan sumber perikanan laut untuk mendorong pengembangan usaha-usaha perikanan nasional berskala kecil yang dilakukan oleh para nelayan dan petani ikan tradisional.

Dewasa ini walaupun telah banyak petani dan nelayan kita yang telah berhasil, tetapi disisi lain kita masih melihat petani-nelayan kita

yang masih belum sempat menikmati kemajuan-kemajuan yang telah dicapai rekan-rekannya. Belum lagi beberapa masalah yang menjadi kendala kemajuan di bidang pertanian seperti, pencemaran lingkungan, penerbangan hutan secara liar dengan menggunakan zat-zat beracun yang dapat mencemarkan dan mematikan ikan-ikan, baik itu ikan air tawar atau ikan laut. Pencemaran-pencemaran dan beberapa kendala tersebut pada akhirnya dapat mengurangi jumlah hasil produksi pertanian.

Demikian pula dengan masalah kualitas produksi beras, dimana kita masih harus menghadapi saingan kualitas produksi dari negara-negara lain, sehingga kita masih harus berusaha keras untuk dapat meningkatkan hasil produksi beras kita agar dapat mencapai standar mutu yang sama dengan negara-negara penghasil beras lainnya. Dan yang lebih penting yaitu masalah bagaimana melestarikan predikat swasembada pangan yang telah berhasil kita peroleh, serta masalah-masalah lain yang masih harus kita hadapi di masa datang. Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah bila kita terus memperkuat unsur-unsur dan mata rantai produksi yang dianggap masih rawan dan rapuh, untuk diperbaiki dan ditingkatkan lebih baik lagi.

Kita menyadari bahwa upaya meningkatkan produksi pertanian tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja, tetapi hal tersebut juga merupakan tanggungjawab kita semua. Terutama para petani dan nelayan beserta keluarganya, masyarakat tani-nelayan, organisasi-organisasi tani-nelayan, organisasi swadaya masyarakat, organisasi yang bergerak dalam bidang pertanian serta lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan dunia pertanian. Melalui Hari Krida Pertanian sudah sepatutnyalah apabila kita memupuk rasa kebersamaan yang lebih baik lagi untuk mencapai prestasi di bidang pertanian yang lebih tangguh untruk masa datang.

Himbauan ini sesuai dengan tema yang dipilih pada setiap peringatan Hari Krida Pertanian setiap tahunnya, dan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama berlangsungnya Hari Krida Pertanian. Hal ini juga merupakan perwujudan dari hakikat Hari Krida Pertanian yakni bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, mawas diri, berbangga hati sejenak, memperoleh penghargaan atas prestasi yang dicapai serta berkrida atau berdharma. Marilah kita tanamkan dan

masyarakatkan kegiatan-kegiatan pembangunan sektor negara Indonesia, sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur di masa datang.

Catatan

- 1 Departemen Pertanian, *10 Tahun departemen Pertanian 1968-1978*, Jakarta, 1978, hal. 32.
- 2 Departemen Pertanian, *Pedoman Pembinaan Kelompok tani nelayan*. Jakarta, 1988/1989, hal. 5.
- 3 Op. cit., hal. 4.
- 4 Departemen Pertanian, *Hari Krida Pertanian 21 Juni*, Jakarta, 1974, hal. 1.
- 5 *Lembaran Informasi Pertanian (LIPTAN) No. 099/88*.
- 6 *Lembaran Informasi Pertanian (LIPTAN) No. 07/86*.

Daftar Pustaka

1. Departemen Pertanian, *Hari Krida Pertanian 21 Juni*, Jakarta, 1974.
2. Departemen Pertanian, *Pedoman Pembinaan Kelompok tani nelayan*, Jakarta, 1988/1989.
3. Departemen Pertanian, *10 Tahun Departemen Pertanian 1968-1978*. Jakarta, 1978.
4. Endang Wulandari, *Inventarisasi Arsip Pertanian (sripsi tidak diterbitkan)*, Fakultas Sastra UI, Program Diploma Ilmu Kearsipan.
5. *Lembaga Informasi Pertanian (LIPTAN) No. 004/86*.
6. *Lembaran Informasi Pertanian (LIPTAN) No. 007/86*.
7. *Lembaran Informasi Pertanian (LIPTAN) No. 099/88*.

HARI IBU

Setiap 22 Desember bangsa Indonesia memperingati Hari Ibu, hari yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia, khususnya kaum wanita.

Sebagaimana kita ketahui, ibu merupakan sosok yang mempunyai kedudukan mulia dalam kehidupan manusia. Mereka tidak hanya mempunyai peranan besar dalam keluarga atau rumah tangganya, tetapi juga mempunyai peranan besar bagi kalangan hidup dan kemajuan suatu bangsa.

Dari rahim ibu lahir generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Melalui tangan ibu pula mereka tumbuh menjadi generasi yang tangguh, perkasa dan berjiwa kebangsaan, sehingga dapat dikatakan baik buruknya suatu bangsa tidak lepas dari peranan seorang ibu. Dengan sikap keprihatinannya yang mengalir tulus seperti air susu, mereka mengasuh dan membesarkan putra-putranya hingga menjadi pemimpin bangsa. Sementara itu tidak sedikit pula ibu-ibu yang di samping membesarkan, mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, turut pula membantu suami mencari tambahan keuangan keluarga.

Seorang ibu tidak hanya seorang istri, tetapi juga seorang yang melebihi dan memperlihatkan sejumlah kelebihanannya, dengan memberi kebahagiaan dan kesempatan bagi orang lain. Dengan demikian, betapa hebat dan gagahnya seorang ibu. Karena itu sudah selayaknya bila

diadakan "satu" hari sebagai penghargaan dan ungkapan terima kasih terhadap apa yang telah dilakukan dan diperjuangkan kaum wanita pada umumnya, dan kaum ibu khususnya. Dalam rangka tujuan tersebut, maka pada setiap tanggal 22 Desember diadakan peringatan Hari Ibu.

Menjelang akhir abad 19 terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat Indonesia yang pada akhirnya membawa perubahan pula pada kaum wanita Indonesia. Terbukanya negara ini terhadap ekonomi uang telah menimbulkan kesadaran masyarakat tentang kemajuan-kemajuan dan untuk mendapatkan kemajuan-kemajuan tersebut perlu adanya pendidikan.

Sementara itu, pada masa ini pula terjadi perubahan politik dalam pemerintah kolonial yaitu dengan munculnya gagasan Politik Etis (Politik Balas Budi), yang dikemukakan oleh seorang tokoh liberal, C. Th. Van Deventer. Menurut Van Deventer, setelah sekian lama menjajah dan mengeruk keuntungan dari bumi Indonesia, sudah sepantasnya bila Pemerintah Belanda membayar apa yang pernah diambil dari bumi Indonesia. Salah satu gagasan yang terkandung dalam Politik Etis tersebut, yaitu berupa pemberian pendidikan pada masyarakat Indonesia.

Gagasan Van Deventer tersebut mendapat dukungan dari kaum Demokrat Liberal, yang besar pengaruhnya di negeri Belanda sehingga Pemerintah kolonial Belanda terpaksa mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum pribumi. Selanjutnya muncullah sekolah-sekolah calon-calon pekerja yang terlatih dan terampil pada bidang-bidang pekerjaan yang diperlukan, yang pada akhirnya melahirkan pemuda-pemuda terpelajar.

Munculnya pemuda-pemuda yang berpendidikan, kemudian diikuti dengan organisasi-organisasi yang dipelopori oleh pemuda-pemuda pelajar tersebut. Pendidikan yang mereka peroleh membuka mata mereka tentang keadaan negerinya, kesengsaraan dan kemiskinan bangsanya akibat kekejaman Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga membangkitkan kesadaran mereka untuk menentang keadaan tersebut. Sebagai realisasinya, terbentuklah organisasi-organisasi yang dipelopori oleh pemuda-pemuda pelajar, seperti organisasi Budi Utomo

yang dibentuk pelajar-pelajar STOVIA di Batavia pada tahun 1908, organisasi Jong Sumateranen Bond (1917) oleh pemuda-pemuda pelajar asal Sumatera, Perhimpunan Indonesia (1908) oleh pelajar-pelajar Indonesia di negeri Belanda dan lain sebagainya.

Kesadaran tentang pentingnya pendidikan ternyata tidak hanya muncul pada kaum pria, tetapi juga pada kaum wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng (R.A) Kartini, seorang gadis bangsawan, putri Bupati Jepara.

Raden Ajeng Kartini yang merasakan sendiri penderitaan akibat kungkungan terhadap kaum wanita, Adat istiadat feodal, terutama di Jawa, yang menarik garis pemisah yang tegas antara pria dan wanita, menurut Kartini merupakan penindasan bagi kaum wanita.

Pada saat itu, seorang gadis terutama gadis-gadis letirunan bangsawan, tidak diperkenankan untuk mendapatkan pendidikan, baik dari golongan bangsawan rendah, baik dari golongan bangsawan tinggi maupun golongan bangsawan rendah. Kalaupun ada, itu hanya terdapat pada keluarga-keluarga tertentu yang sudah berpikiran maju antara lain keluarga R.A Kartini. Itupun hanya sampai pada batas usia tertentu, yaitu batas usia 12 tahun atau menjelang usia remaja. Setelah itu mereka harus menjalani pingitan sampai tiba saatnya untuk dinikahi dengan pria yang menjadi pilihan orang tuanya, yang kadang-kadang tidak mereka kenal samasekali. bahkan tidak jarang pria yang akan menjadi suami gadis-gadis tersebut sudah mempunyai seseorang atau beberapa istri.

Selama masa pingitan ini, seorang gadis dilarang berhubungan dengan duni luar. Mereka dijaga bagaikan sebuah boneka kristal di antara empat dinding tinggi. Selama itu pula mereka tidak mendapat kesempatan untuk belajar keterampilan.

Karena mereka tidak mempunyai pendidikan dan keterampilan, maka setelah menikah mereka tergantung sepenuhnya kepada suami. Akibatnya suami dapat berlaku sewenang-wenang pada istri. Mereka dapat menceraikan si istri kapan saja mereka mau. atau mereka dapat mencari wanita lain sebagai istri tanpa menceraikan istri yang telah ada. Hal ini menimbulkan pemberontakan dalam diri Kartini, yang banyak dituangkan dalam surat-suratnya kepada sahabat-sahabatnya,

yang kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku dengan judul " Habis Gelap Terbit Terang" pada tahun 1911.

Kartini menginginkan gadis-gadis diperbolehkan mendapat pendidikan seperti kaum pria. Pendidikan itu tidak terbatas pada pendidikan umum saja. Melainkan juga pendidikan kejuruan, sehingga wanita dapat memperoleh keterampilan yang berguna bagi dirinya untuk mencari nafkah sendiri. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, kemudian kartini membuka kelas kecil yang khusus diperuntukkan bagi gadis-gadis. Kelas ini mengambil tempat di sekitar rumah Kartini atas izin suami beliau. Di kelas kecil ini para siswa selain mendapat pelajaran membaca dan menulis juga mendapat pelajaran memasak, kerajinan tangan dan menjahit, tentunya sangat bermanfaat bila kelak mereka berumah tangga.

Apa yang dilakukan Raden Ajeng Kartini, kemudian diikuti wanita-wanita dari daerah lain di Indonesia, karena nasib Kartini tidak jauh berbeda dengan nasib mereka. Di Jawa Barat misalnya, pada tahun 1904 berdiri sekkolah Istri yang kemudian menjadi Keutamaan Istri didirikan oleh Raden Dewi Sartika. Kemudian Maria Walanda Maramis di Manado mendirikan sekolah dengan nama Percintaan Ibu Terhadap Anak Temurunnnya (PIKAT) pada tahun 1917, dan Rahman El Junusiah menderikan Sekolah Diniyah Putri (Diniyah Putri Scool) di Padang Panjang, Sumatra Barat dan masih banyak lagi sekolah-sekolah putri lainnya.

Berawal sari usaha-usaha perorangan ini, dimulailah apa yang kemudian disebut sebagai gerakan wanita Indonesia. Apalagi setelah diterbitkannya surat-surat Kartini pada tahun 1911, semakin banyak berdiri sekolah-sekolah untuk kaum putra. Apa yang ditulis Raden Ajeng Kartini dalam surat-suratnya tersebut, telah menimbulkan kegairahan dan membangkitkan semangat tentang gerakan eman sipasi wnita. Akibatnya mereka mulai berpikir untuk membentuk perkumupula-perkumpulan wanita.

Ternyata keinginan kaum wanita ini mendapat dukungan pemuda-pemuda pelajar yang memang sudah mempunyai pandangan lain terhadap kaum wanita. Kemudian atas bantuan pemuda-pemuda pelajar STOVIA yang tergabung dalam Budi Utomo, dibentuk sebuah

organisasi wanita dengan nama Putri Mahardika, pada tahun 1912 di Jakarta.

Putri Mahardika merupakan organisasi wanita pertama. Tujuan pokok organisasi tersebut, adalah memberikan penerangan dan nasehat yang baik kepada kaum putri Indonesia tentang pentingnya pendidikan, disamping berusaha menceritakan dan bantuan keuangan untuk membantu gadis-gadis yang ingin melanjutkan pendidikan tetap tidak mampu.

Setelah putri Mahardika, kemudian terbentuk perkumpulan-perkumpulan wanita lainnya. Perkumpulan-perkumpulan tersebut antara lain, Keutamaan Istri berdiri tahun 1913, Perwiyatan Istri pada tahun 1915, Wanito Susilo tahun 1918, Purborini tahun 1917 dan lain sebagainya.

Di samping organisasi yang sendiri, muncul pula organisasi-organisasi yang merupakan bagian dari organisasi-organisasi pemuda yang telah ada, seperti Ina Tuna, yang merupakan bagian wanita Sarekat Ambon, Aisyiah yang menjadi bagian wanita organisasi Muhammadiyah dan Wandoyao Utama, bagian wanita Serikat Islam.

Seiring dengan berkembangnya jumlah organisasi, tujuan organisasi-organisasi wanita yang ada juga berkembang. Tujuan organisasi-organisasi tidak lagi pada usaha yang bersifat meningkatkan martabat dan kesejahteraan kaum wanita saja, tetapi lebih dari itu ada juga organisasi-organisasi yang mengarah pada bidang politik dan ekonomi. Pada umumnya organisasi-organisasi yang demikian adalah organisasi yang merupakan bagian dari satu organisasi tertentu dan mereka mengikuti jejak organisasi induknya, seperti Ina Tunai, bagian wanita dari Sarekat Ambon.

Walaupun kemudian terdapat berbagai jenis perkumpulan, namun sampai tahun 1926 hampir semua organisasi wanita yang ada bertujuan untuk menunjukkan kedudukan kaum wanita serta mencoba mendobrak tembok yang mengukung mereka. organisasi-organisasi tersebut juga dapat menerima paham Indonesia bersatu dan kemudian bersama-sama menyetujui anjuran dan panggilan kebangsaan. Karena itu pada kongres Pemuda Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928, beberapa wanita turut hadir dan ikut pula menyumbangkan pikirannya demi persatuan dan kesatuan bangsa.

Dijiwai oleh semangat kebangsaan dalam Sumpah Pemuda, muncul keinginan di kalangan organisasi wanita untuk mengadakan suatu pertemuan dalam rangka membentuk persatuan dan kerjasama antara organisasi-oraganisasi yang ada. Atas inisiatif tujuh organisasi wanita, diselenggarakan Kongres Perempuan Indonesia pertama 22 sampai 25 Desember 1928, bertempat di Pendopo Joyosipuran, Yogyakarta. Beberapa wanita muncul sebagai tokoh penggerak kongres yang kemudian menjadi panitia inti. Mereka adalah, Ny. Soekonto dari Wanita Oetomo, Ny. Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa dan Nona Soeyatin dari Putri Indonesia. Sedangkan empat organisasi lain yang mempunyai andil besar dalam Kongres tersebut adalah, *Aisiyah*, *Jong Islamieten Bond Dames Afdeling*, Wanita Katholik dan Meiyes Kering (*Jong Java* bagian wanita).

Kongres dihadiri oleh wakil-wakil dari 30 organisasi wanita, antara lain Wanita Sejati, Wanita Mulyo, Wanita Kencono dan lain-lain. Salah satu hasil kongres yang terpenting, yaitu terbentuk federasi dengan nama Perserikatan Perhimpunan Perempuan Indonesia, yang disingkat menjadi PPII. Selain itu, kongres juga memutuskan beberapa hal yang sangat penting, seperti menerbitkan surat kabar, mendirikan study fond atau beasiswa untuk membantu gadis-gadis yang tidak mampu, memperkuat pendidikan kepanduan putri, mencegah perkawinan anak-anak, mengirimkan misi kepada pemerintah belanda agar secepatnya diberikan dana bagi para janda, agar tunjangan yang berdasar pensiun jangan dicabut dan agar sekolah-sekolah putri diperbanyak. Di samping itu kongres juga memutuskan untuk mengirim misi kepada Road agama agar setiap talak dibuat secara tertulis sesuai dengan peraturan agama.

Setelah kongres pertama, kemudian dilanjutkan dengan kongres-kongres berikutnya. Dalam setiap kongres disusun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan seperti peningkatan dan pengembangan kesejahteraan wanita khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta pembelaan negara.

Pada Kongres Perempuan Indonesia III di Bandung tanggal 23 sampai 27 Juli 1938, tanggal 22 Desember diputuskan sebagai Hari Ibu, karena tanggal tersebut dianggap sebagai simbol lahirnya

kesadaran wanita Indonesia tentang nasibnya, kewajibannya, kebudayaan dan keanggotaannya di dalam masyarakat. Sedangkan penetapan Hari Ibu sebagai hari nasional baru dilakukan pemerintah pada tahun 1959, setelah adanya usul dari Ny. Maria Ulfah Susanto, seorang tokoh pejuang wanita yang menjabat sebagai Direktur Kabinet Perdana Menteri, Kabinet Liberal. Berdasarkan usul tersebut, oleh pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor. 316 tahun 1959, yang menetapkan bahwa Hari Ibu tanggal 22 Desember diperingati sebagai hari nasional bersejarah bukan hari libur. Sejak saat itu Hari Ibu diperingati secara nasional oleh seluruh masyarakat Indonesia, tidak hanya kaum wanita saja. Dalam setiap peringatan diadakan kegiatan-kegiatan yang sipatnya meningkatkan kesejahteraan wanita, di samping menampilkan keberhasilan-keberhasilan yang dicapai kaum wanita, seperti kampanye peningkatan kesejahteraan ibu dan anak, pameran foto perjuangan dan kegiatan-kegiatan wanita, pameran hasil kerajinan tangan, lomba memasak, merangkai bunga dan lain sebagainya.

Sementara itu sejak dibentuknya PPII perjuangan wanita Indonesia makin terarah. Mereka kini tidak hanya berjuang dalam bidang pendidikan saja, tetapi sisegala aspek kehidupan mulai dari bidang sosial, ekonomi maupun politik sesuai dengan tuntutan jaman.

Mereka berusaha meningkatkan nasib dan kesejahteraan wanita melalui usaha-usaha mengupayakan perbaikan nasib wanita terutama buruh wanita, menunjukan kerajinan rumah tangga untuk menambah pemasukan keuangan, memperjuangkan pensiunan bagi janda dan anak, meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kaum wanita dan anak-anak dan lain sebagainya.

Mereka mengadakan basiswa dengan tujuan untuk membantu gadis-gadis tidak mampu yang masih mempunyai keinginan melanjutkan pendidikan, memperkuat pendidikan kepanduan putri, mengusahakan agar sekolah-sekolah putri diperbanyak dan mengusahakan pembertantasan buta huruf dengan target sasaran yang telah ditetapkan.

Pada masa perang kemerdekaan, wanita Iandonesia merasa terampil untuk ikut berjuang membela dan mempertahankan

kemerdekaan. kaum wanita tidak hanya berjuang di garis belakang melalui dapur umum, tetapi mereka juga ikut turun langsung dibgaris depan. Karena itu dibentuk laskar-laskar putri dan badan-badan perjuangan.

Di Jakarta selain berdiri Persatuan Wanita Indonesia(PERAWANI) yang juga dibentuk di beberapa daerah lain, di bentuk pula Wanita Indonesia (WANI) dan Laskar Putri Indonesia (LASWI). Jawa Tengah, Wanita Pembangaunan Perjuangan dan Laskar Putri Indonesia, dan di Jawa Timur dibentuk Barisan Putri.

Sementara itu di luar Jawa juga dibentuk laskar-laskar putri dan badan perjuang. Di Sumatera Utara misalnya, dibentuk Barisan Srikandi yang tersebar Sumatera Timur, Tapanuli sampai ke Aceh Timur. Di Sumatera BARat dibentuk Laskar Muslimat dan Laskar Sabil Muslimat. Sulawesi, Laskar Rakyat dan Laskar Banteng dan di Ambon dibentuk Barisan Perjuangan Indonesia. Pada umumnya kegiatan laskar dan badan perjuangan tersebut adalah berupa pengucapan salam pekik merdeka, mengibarkan bendera Merah PUTih, membantu Palang Merah Indonesia (PMI), membantu korban pertempuran di rumah sakit dan membantu mengadakan siaran radio. Bahkan Laskar Wanita di Bandung, dengan senjata seadanya ikut langsung terjun ke medan pertempuran.

Setelah berakhirnya perang kemerdekaan yang di tandai dengan ditandatanganinya perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB) pada tanggal 27 Desember 1949, kegiatan-kegiatan gerakan wanita Indonesia makin berkembang. Pada periode ini peranan politik pada pergerakan kaum wanita semakin menonjol, yang dapat terlihat dari keberhasilan kaum wanita Indonesia adalah menempatkan wakil-wakilnya pada lembaga-lembaga tinggi pemerintah, mulai dari Dewan Perimbangan Agung (DPA), Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) sampai kepada kedudukan Direktur Perdana Menteri, sepertinya. Suwarni Priggodigdo di DPA dan Ny. Maria Ulfah Susanto, yang merupakan Direktur Perdana Menteri pertama wanita.

Selain hal tersebut, kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan pada masa-masa awal setelah perang kemerdekaan, yaitu membentuk yayasan-yayasan atau badan-badan dalam rangka meringankan

penderitaan masyarakat terutama kaum wanita. Di samping itu juga melalui diperjuangkan kedudukan wanita dalam perkawinan dengan meritis adanya undang-undang perkawinan, yang akan mengatur hak dan kewajiban wanita di dalam perkawinan.

Badan-badan atau yayasan yang berahasil didirikan Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) antara lain, bank koperasi wanita yang didirikan pada tanggal 22 Desember 1953 di Jakarta, dengan nama "Bank Koperasi Wanita". Tujuan dari pendirian bank ini, yaitu untuk memperat hubungan dan kerjasama dalam rangka memperbaiki dan mempertinggi taraf hidup anggota, dengan cara memberi pinjaman pada anggota untuk keperluan-keperluan yang bermanfaat, seperti membuka warung, membeli rumah, membeli tanah dan lain sebagainya.

Sebelum itu, KOWANI telah pula mendirikan Yayasan Kemajuan Wanita Seri Sarma di Yogyakarta tahun 1951, dengan maksud untuk membiayai siswa wanita yang berasal dari kalangan rakyat jelata yang tidak mampu meneruskan pelajaran.

Selain itu juga mendirikan Yayasan Hari Ibu yang berkedudukan di Yogyakarta, yang mulai bekerja pada tanggal 15 Desember 1933. Maksud Pendirian Yayasan Hari Ibu ini adalah untuk melaksanakan salah satu dari tujuan Kongres Wanita Indonesia, yaitu mengadakan usaha-usaha kearah pembangunan dan kehidupan wanita yang layak. Dalam rangka tujuan tersebut, Yayasan Hari Ibu mengadakan asrama-asrama putri, memberi latihan kerja dan pendidikan kadar pembangunan masyarakat desa, serta mendirikan perpustakaan dan biro konsultasi wanita.

Di samping kegiatan-kegiatan tersebut, Yayasan Hari Ibu berhasil membangun sebuah gedung monumen di Yogyakarta yang diresmikannya 20 Mei 1956 dan diberi nama "Gedung Persatuan Wanita".

Selain di Yogyakarta, Persatuan Wanita juga didirikan di berbagai daerah dengan tujuan yang sama, yaitu untuk keperluan-keperluan Yayasan Hari Ibu, untuk penyelenggaraan kursus-kursus, seperti pemberantasan buta huruf, kerajinan wanita serta pembentukan kader wanita pembangunan masyarakat desa.

Selain mendirikan yayasan tersebut, KOWANI juga mendirikan Yayasan Kesejahteraan Anak untuk mengingatkan kesejahteraan anak, dan memberikan kursus kejuruan, seperti kursus pengadilan agama, sehingga wanita dapat pula menjadi anggota pengadilan agama.

Sementara itu, pada masa ini gerakan wanita Indonesia mulai menjalin hubungan dengan kaumnya dari berbagai organisasi di luar negeri, dengan tujuan untuk menjalin kerjasam dan mendapatkan masukan-masukan dari organisasi-organisasi wanita di negara-negara lain, tentang perkembangan wanita dan negara-negara mereka. Untuk tujuan tersebut, secara rutin KOWANI mengirim utusannya untuk menghadiri seminar-seminar dan konperensi yang diadakan organisasi-organisasi wanita internasional, di samping selalu mengadakan koordinasi untuk memelihara kesamaan sikap dalam menghadapi berbagai masalah.

Pada tahap selanjutnya, yakni pada masa Orde Baru (ORBA), kegiatan dan peranan KOWANI dikembangkan secara lebih terarah. Pada masa ini kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama wanita dan anak-anak lebih ditingkatkan, seperti mengusulkan dikeluarkannya undang-undang kesejahteraan anak-anak dan remaja, mengusulkan dikeluarkannya undang-undang pemberantasan undang-undang pemberantasan-perdagangan ibu dan anak dan mengajukan kembali undang-undang yang telah diajukan pada masa sebelumnya, tetapi belum terselesaikan.

KOWANI juga membentuk koperasi wanita dengan nama Koperasi Wanita Indonesia (KOWANI) pada tahun 1975, yang bertujuan untuk membantu wanita yang kurang modal. Mereka juga memberikan bimbingan dan penyuluhan berbagai industri rumah tangga kepada kaum wanita di desa dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat desa, memanfaatkan kemampuan wanita desa yang tidak bisa diabaikan begitu saja dalam pembangunan. Dengan demikian, diharapkan wanita di pedesaan dapat bekerja sesuai dengan kodratnya melalui sektor pertanian dan sektor kerajinan, yang hasilnya bisa dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam rangka memantapkan usaha tersebut, kemudian KOWANI menyelenggarakan lokakarya dengan tema "Melalui Peningkatan Kerajinan Kewira-

swastaaan Memantapkan Partisipasi Wanita dalam Pembangunan". yang diselenggarakan mulai 13 --17 Desember 1977 di Jakarta.

Masih dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, sejak tanggal 27 Desember 1972, KOWANI mencanangkan sebuah program yang kemudian mejadi program pemerintah, yaitu mengadakan gerakan Pembinaan Kesejahteraan keluarga (PKK), dengan 10 progaram pokok, yaitu (1) Penghayatan dan Pengamalan Panca Sila, (2) Gotong royong, (3) Pangan, (4) Sandagn, (5)Perumahan dan Tata Laksana Rumah tangga, (6) Pendidikan dan Keterampilan, (7) Kesehatan, (8) Pengembangan Kehidupan Berkoprasi, (9) Kelestarian Lingkungan Hidup, (10) Perencanaan Sehat.

Sementara itu dalam hubungan luar negeri yang telah di rintis sebelumnya, kegiatan pergerakan wanita kita dalam bidang ini terus berkembang. Selain ikut aktif dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan organisasi-organisasi internasional, seperti seminar, konperensi, lokakarya mengenai berbagai msalah yang berhubungan dengan peranan dan kesejahteraan wanita atau menghadiri undang-undang dari organisasi wanita dari negara-negara lian, melalui KOWANI negara kita mendapat bantuan dari badan-badan dunia dalam usaha meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat terutama kaum wanita dan anak-anak.

Demikian perjalanan panjang yang telah dilalui kaum wanita Indonesia dan peranan-peranan yang telah mereka lakukan selama ini. Saat ini setelah lebih setengah abad sejak diadakannya Kongres Perempuan Indonesia pertama tanggal 22 Desember 1928, yang menjadi simbol munculnya "kesatuan pergerakan wanita Indonesia", dan selanjutnya ditetapkan sebagai Hari Ibu, memang telah banyak kemajuan yang berhasil dicapai kaum wanita kita di segala aspek kehidupan baik sosial, ekonomi meupun politik.

Wanita-wanita Indonesia kini tidak hanya terpaku pada urusan keluarga dan dan rumah tangga saja, tetapi banyak juga aktif di dalam masyarakat baik dalam organisasi maupun meniti karir.

Dalam bidang sosial-budaya khususnya dalam bidang pendidikan, sudah bukan hal yang sulit lagi bagi wanita untuk mendapatkan pengajaran. Berkat kebijaksanaan pendidikan, yaitu memperluas

kesempatan pendidikan yang dimulai dari tingkat pendidikan dasar, maka wanita juga memperoleh kesempatan menikmati pendidikan. Bahkan data makro menunjukan bahwa peningkatan bersekolah lebih banyak dinikmati wanita dari pada pria.

Saat ini tidak jarang wanita-wanita yang berhasil mencapai tingkat pendidikan tinggi, yang dapat kita lihat dari banyak sarjana-sarjana wanita, seperti dokter, sarjana teknis ataupun profesor. Sedangkan pada wanita-wanita di pedesaan, melalui program pemberantasan buta huruf yang dilancarkan di desa-desa, sudah jarang wanita-wanita di desa yang buta huruf. Kini mereka sudah jarang wanita-wanita di desa yang buta huruf. Kini mereka sudah dapat membaca dan menulis yang tentunya sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan mereka, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan mereka.

Dengan semakin luasnya kesempatan memperoleh pendidikan, tentunya semakin luas keterlibatan wanita dalam pasar kerja, yang dapat kita lihat dari semakin banyaknya wanita-wanita yang bekerja di luar rumah.

Sekarang ini hampir semua jenis pekerjaan telah banyak melibatkan wanita. Kaum wanita tidak hanya bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang bersifat dibelakang meja dan tidak kasar. Tetapi turut terjun langsung ke lapangan. Tidak jarang kita melihat wanita yang bekerja sebagai ahli bangunan, supir bis, pilot, wartawan dan lain sebagainya yang pada mulanya merupakan pekerja khusus pria.

Masih dalam bidang ekonomi, telah banyak wanita-wanita kita yang telah menjadi pengusaha-pengusaha berhasil. Bahkan kaum wanita telah pula mempunyai organisasi pengusaha sendiri yang diberi nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI). Kegiatan kegiatan organisasi ini antara lain merintis kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak, mengikuti berbagai pameran didalam dan di luar negeri dan merintis penggunaan fasilitas bank mengembangkan usaha para anggota.

Melalui program Pendidikan Kesejahteraan keluarga, wanita-wanita desa telah berhasil mengembangkan diri. Dan melalui program ini juga, mereka yang pada mulanya tidak berani tampil dan mengeluarkan

pendapat, kini telah berani mengemukakan pendapat-pendapatnya. Desa-desa yang mulanya gersang dan kurang tanaman, -saat ini menjadi hijau dan semarak. Berkat hasil Pendidikan Kesejahteraan Keluarga pula, Pemerintah Indonesia berhasil mendapat penghargaan dari badan UNICEF dan WHO, atas keberhasilannya meningkatkan kesejahteraan ibu anak. Sedangkan dalam bidang politik, saat ini sudah banyak kaum wanita yang duduk dilembaga-lembaga tinggi pemerintah mulai dari tingkat kepala desa hingga ketingkat menteri negara. Bahkan untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan wanita, pemerintah membentuk menteri negara tersendiri untuk urusan peranan wanita dengan nama Menteri Muda Urusan Peranan Wanita.

Namun demikian, walaupun telah banyak keberhasilan yang dapat dicapai oleh gerakan wanita Indonesia, tidaklah berarti perjuangan kaum wanita berhenti sampai disitu saja. Masih banyak hal-hal yang mesti diperjuangkan dan ditingkatkan kaum wanita Indonesia. Karena sementara sebagian wanita telah menikmati kemerdekaan yang didambakannya, di sisi lain masih banyak wanita-wanita masih harus memperjuangkan nasibnya akibat ketidakadilan seperti masalah tenaga kerja yang dibayar murah dibandingkan pria dengan jam kerja yang sama, sikap sewenang-wenang terhadap tenaga kerja wanita, eksploitasi tenaga wanita dan anak-anak, masalah wanita tuna susila, masalah pemerkosaan dan lain sebagainya.

Kini menjadi tugas kita sebagai generasi muda terutama kaum wanita untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, dalam rangka meneruskan perjuangan wanita-wanita terdahulu kita. Melalui Hari Ibu marilah kita tingkatkan peranan dan perjuangan wanita dalam pembangunan. Dan melalui Hari Ibu kita tingkatkan kemampuan kaum wanita dalam pembinaan keluarga. Karena dengan lebih memantapkan tugas-tugas kodrati, kaum wanita akan dapat memberi sumbangan lebih besar bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa.

Zaman bisa berubah dan bisa berbalik-balik, namun kasih sayang ibu tidak pernah berubah maknanya. Seorang ibu bagaikan sebuah tanaman yang tumbuh dipinggir jalan untuk tempat berteduh siapa saja, yang menanam buah-buahan untuk siapa saja yang membutuhkan yang

sedemikian agung dan anggunnya, sehingga tak membutuhkan kata-kata untuk memindahkan ajarannya, demikian pujian penyair besar, W.S. Rendra terhadap ibu.

Daptar Pustaka

1. Leirissa, MA. R.Z., dkk., *Sejarah Pemikiran Tentang Sumpah Pemuda*. Jakarta : Depdikbud Proyek IDSN, 1985.
2. Notosusanto, Nugroho, dkk., *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984.
3. Tashadi. *R.A. Kartini*. Jakarta : Depdikbud Proyek IDSN, 1985.
4. Yayasan Hari Ibu (belum diterbitkan)
5. *Kompas*, 24 Desember, 1974
6. *Kompas*, 12 November, 1988.
7. *Kompas*, 24 Januari, 1989.

HARI PENDIDIKAN NASIONAL

Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei adalah salah satu dari sekian banyak hari besar nasional yang selalu diperingati bangsa Indonesia setiap tahun. Penetapan Hari Pendidikan Nasional dilakukan Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 1959 di Jakarta, dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sedangkan tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional dilakukan berdasarkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, sebagai rasa penghargaan dan untuk mengenang jasa-jasa beliau bagi dunia pendidikan Indonesia. Karena itulah tanggal 2 Mei yang merupakan hari lahirnya perintis pendidikan nasional ini ditetapkan sebagai hari lahirnya perintis pendidikan nasional ini ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Pengertian "Pendidikan " menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dengan pendidikan manusia menjadi beradab dan mampu mengendalikan diri.

Pendidikan terbagi atas dua bagian yaitu pendidikan formal dan informasi. Pendidikan formal diterima secara umum dan melalui lembaga resmi. Sedangkan pendidikan informal diterima manusia di

luar lembaga resmi, seperti melalui lingkungan keluarga, Pengalaman, lingkungan tempat tinggal dan lain sebagainya. Namun diantara keduanya saling terkait yang pada akhirnya memunculkan pola pikir manusia yang berbeda. Karena itu sering muncul pepatah yang mengatakan, "semakin tinggi ilmu seseorang akan semakin tinggi pula tingkat intelegensinya, dan akan semakin tinggi pula tingkat kemampuannya dalam menghadapi tantangan yang ada dan menyelesaikan permasalahan.

Bagi suatu bangsa pendidikan merupakan salah satu faktor penting bagi perjalanan hidup dan perkembangan suatu bangsa. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana bila suatu bangsa tidak mengenal pendidikan. Ia tentu akan menjadi bangsa yang statis dan terbelakang. Karena itu betapa pentingnya pendidikan bagi suatu bangsa, tidak terkecuali Indonesia. Demikian besarnya kesadaran bangsa Indonesia tentang pendidikan, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sengaja dibuat bab tersendiri tentang pendidikan yang tertuang dalam pasal 31 UUD 1945, bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu pengajaran nasional yang di atur dengan Undang-Undang. Mengenai sistim pendidikan itu sendiri dibentuk suatu perundang-undangan, yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang "Sistim Pendidikan Nasional".

Di Indonesia pendidikan bukan baru dikenal setelah kedatangan bangsa-bangsa barat, tetapi jauh sebelumnya bangsa Indonesia sudah mengenal pendidikan, walaupun tentunya berbeda dengan pendidikan yang diperkenalkan bangsa Barat.

Pada masa Hindu dan Budha masyarakat kita sudah mengenal apa yang di sebut pendidikan. Pada masa ini materi yang diajarkan lebih di fokuskan pada bidang keagamaan dan kesusastraan. Tetapi selain itu mereka juga mendapat pelajaran tentang bentuk-bentuk huruf. penggunaan huruf hidup, huruf mati dan semua perubahan huruf. Mereka juga mendapat pengetahuan mengenai angka tahun, nama bulan, perincian hari dan lain sebagainya.

Dalam proses belajar mengajar ini para murid juga mendapat pengetahuan tentang budi pekerti, pengetahuan tentang kebenaran dan

lain-lain yang berhubungan dengan ajaran Hindu dan Budha. Di samping itu mereka juga mendapat pengetahuan mengenai angka tahun, nama bulan, perincian hari dan lain sebagainya.

Sistem pendidikan yang dipakai pada masa Hindu dan Budha ini berbentuk sistim Gurukala, dimana siswa tinggal bersama gurunya di dalam suatu pertapaan. Cara pengajaran yang dilakukan dengan cara tanya jawab langsung antara guru dengan siswa. Cara demikian ini juga berlangsung antara sekelompok siswa dengan gurunya atau bisa pula terjadi secara individual antara guru dengan seorang murid.

Masuknya Islam ke Indonesia membawa perubahan pula pada dunia pendidikan di Indonesia. Ajaran Islam yang di bawa dan disebarkan pedagang-pedagang Islam mempengaruhi dunia pendidikan. Pendidikan yang mulanya berorientasi pada ajaran agama Hindu dan Budha, kini beralih pada ajaran-ajaran Islam.

Dalam hubungan pengajaran berbeda dengan ajaran Hindu dan Budha, agama Islam lebih banyak mengandung ajaran yang berkenaan dengan hidup masyarakat. Kalau ajaran agama Hindu dan Budha dalam ajarannya menekankan pada spekulasi yang mendalam mengenai hakekat konsep-konsep kebenaran yang beresipat natural. Maka dalam agama Islam konsep mengenai Tuhan sangat tegas dan ajaran berkenaan dengan itu cukup sederhana. Jika agama Hindu dan Budha memberikan penilaian tinggi kepada kesanggupan kepada umatnya untuk melepaskan diri dari hidup keduniawian, maka dalam agama Islam justru membimbing umatnya membimbing umatnya membina hidup dunianya dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya berdiri lembaga-lembaga pendidikan yang bertugas pokok penggali, menganalisa dan mengembangkan serta mengamalkan ajaran Islam yang berdasarkan Al Qur'an dan Al hadis, seperti mengenal huruf dan membaca Al Quran, pengetahuan mengenai ahlak atau budi pekerti dan lain sebagainya.

Pada awal pengaruhnya agama Islam di Indonesia, keadaan pendidikan Islam masih bersifat kedaerahan. Setiap daerah mempunyai sistim pendidikan dan pengajaran yang berbeda dengan daerah lainnya. Demikian pula lembaga pendidikannya. Lembaga-lembaga pendidikan yang ada antara lain berupa langgar yang biasa-

nya terdapat pada setiap desa. Di langgar ini para siswa secara satu persatu diajarkan cara membaca kitab suci Al Qur'an.

Kemudian madrasah, di mana di dalam medrasah materi yang diajarkan lebih luas lagi daripada di langgar. Disini para siswa tidak diajarkan lebih luas lagi dari pada di langgar. Disni para siswa tidak diajarkan secara seorang demi seorang, tetapi guru menerangkan di depan sekolah siswa.

Selain itu terdapat pula pesantren. Di dalam pesantren seorang guru yang disebut juga kiai mengajar agama kepada murid-muridnya atau santri-santrinya. Di pesantren ini para siswa tinggal dan belajar bersama di bawah bimbingan seorang atau lebih kyai. Yang menarik dari lembaga pendidikan pesantren ini, Siswa dipaksa untuk aktif, karena di dalam metode pengajarannya muridlah yang mengajukan materi kepada seorang guru untuk dijawab, diterjemahkan oleh guru kepada siswanya. Sebab itu seorang santri yang ulet dan rajin akan lebih cepat menyelesaikan pendidikan.

Sebelumnya kedatangan bangsa Portugis dan missioner-missioner secara pribadi telah pula memperluas atau mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Karena selalu dibukanya sekolah-sekolah sering di Indonesia memberikan pendidikan Kristen pada masyarakat Indonesia, yang nantinya menjadi ulama-ulama Kristen.

Begitu pula ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia memang mereka mendirikan sekolah-sekolah, namun sekolah tersebut semata-mata untuk tujuan tertentu Pemerintah Kolonial Belanda. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut hanya diperuntukkan bagi golongan-golongan tertentu sesuai dengan stratifikasi sosial dan ekonomi masyarakat yang ada. Sekolah-sekolah tersebut yaitu (1) Sekolah khusus untuk anak-anak Eropa, (2) Sekolah khusus untuk anak-anak Timur Asing, (3) Sekolah khusus untuk anak-anak pribumi bangsawan. Baru setelah terjadinya perubahan masyarkat politik membawa perubahan pula dalam dunia pendidikan.

Kedatangan bangsa barat ke Indonesia terutama bangsa Belanda kembali membawa pengaruh pada dunia pendidikan di Indonesia. Tetapi kerena tujuan utama mereka mencari keuntungan ekonomi, yang menjdi daerah jajahannya. Bagi mereka kebodohan rakyat Indonesia

justru menjadi tujuan mereka. Karenanya tidak banyak lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan Belanda. Kemudian terjadinya perubahan-perubahan membawa perubahan pula pada bidang pendidikan.

Pada menjelang akhir abad ke-19 terjadi perubahan-perubahan di dalam masyarakat Indonesia. Terbukanya negara ini bagi perekonomian merubah pandangan penduduk bumi putera dan bersamaan dengan itu muncul pula gagasan-gagasan tentang kemajuan. Dan untuk mendapat kemajuan-kemajuan tersebut perlu adanya suatu pendidikan.

Sementara itu di dalam pemerintah kolonial Belanda terjadi perubahan politik. Munculnya gagasan tentang politik etis (balas budi) oleh van de venter, yang salah satunya mengenai perlunya pendidikan bagi kaum bumiputera, menyebabkan pemerintah Belanda harus mendirikan sekolah-sekolah. Oleh sebab itu kemudian Pemerintah Belanda membuka sekolah-sekolah. untuk memberi keterampilan bagi masyarakat bumiputera. Karena sekolah-sekolah tersebut didirikan oleh Belanda, maka sistim pengajaran yang dipakai adalah sistim Eropa mempergunakan bahasa Belanda sebagai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar pada umumnya.

Pada tahap awal Pemerintah Belanda membuka sekolah khusus bagi rakyat biasa yang diberi nama "Sekolah Kelas Dua" (*Vervolg*), dan sekolah kelas satu atau setingkat dengan *Hollandsch Inlandsche Scool* (HIS), yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak golongan, yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak golongan atas.

Kemudian pada tahun 1907, atas perintah Gubernur Jenderal Van Heutz didirikan sekolah desa. Di sekolah ini anak-anak hanya sekedar mendapat pengetahuan membaca, menulis dan berhitung.

Sebagai lanjutan dari HIS, Pemerintah Belanda mendirikan sekolah dengan nama *Meer Uitgebreit Lager Onderwijs* (MULO). Kemudian mendirikan AMS (*Algement Middelbare School*) yang terbagi atas dua bagian, yaitu AMS A khusus untuk mempelajari Ilmu Penguatahuan Sosial (IPS), dan AMS B mempelajari tentang Ilmu Pengetahuan Alam (IPA). Sementara itu pada masa yang sama juga berdiri HBS (*Hogere Burger Scool*), yang khusus diperuntukkan bagi anak-anak Belanda dan bangsa Eropa lainnya.

Selain sekolah-sekolah tersebut yang bersipat umum, Pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah yang bertujuan untuk memberi keahlian pada bidang keterampilan tertentu. Untuk itu kemudian Pemerintah mendirikan Kweek Scool (Sekolah Guru) yang umumnya menerima murid-murid tamatan HIS. Kemudian Hogere Kweek Scool (HKS), sebagai lanjutan Kweek Scool dan Hollandsch Inlandsche Kweek Scool (HIS), sebagai lanjutan Kweek Scool dan Hollandsch Inlandsche Kweek Scool (HIK), yang menerima siswa-siswa HIS bagian rendah dan MULO Bagian atas.

Di bidang keterampilan teknik ; pemerintah Belanda mendirikan KWS (Konign Wihelmina Scool di Jakarta. Di Surabaya didirikan Koningen Emma Scool pada tahun 1912, yang lamla belajarnya lima tahun dengan mempunyai tiga jurusan yaitu Ilmu bangunan, ilmu pesawat dan teknik listrik.

Di bidang pertanian pemerintah membuka Cultuur Scool pada tahun 1911 di Bogor yang lama belajarnya tiga tahun, dan mempunyai dua jurusan, pertanian kehutanan. Pada tahun yang sama di Bogor dibuka pula Sekolah Menengah Pertanian Atas dengan nama Midalbare Landbow Scool. Yang berhak masuk sekolah ini adalah murid-murid tamatan MULO atau HBS tiga tahun.

Di samping sekolah dasar hingga menengah atas, bagi mereka yang ingin melanjutkan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pemerintah mendirikan sekolah tinggi - sekolah tinggi (universitas). Sekolah tinggi yang dibangun pemerintah antara lain, Sekolah Tinggi Hakim (Rechtschool) di Jakarta Pada tahun 1909, dengan lama berjalannya selama tujuh tahun.

Sebelum itu pada tahun 1902, di Jakarta sudah ada sekolah yang disebut dengan sekolah dikter yang sama derajatnya dengan HBS. Pada Pers reorganisasi sekolah ini diubah menjadi sekolah STOVIA (Scool Teroleiding Van Indische Artsen). Dan pada tahun 1913, pemerintah sekolah dokter yang di sebut dengan NIAS (Nederlands Indische Artsen Scool).

Khusus untuk masyarkat desa, bagi mereka yang telah menamatkan sekolah dua dijadikan bibit sebagai guru bantu sekolah desa dengan sistim magang. Di samping itu mereka juga di beri

kesempatan memperoleh kursus yang disebut CVO (Cursus Volaks Onderwijklid). Adapun lanjutan-lanjutan dari mereka yang berhasil lulus dari sekolah kelas dua adalah sebagai berikut :

- (a) Bisa mengikuti *Normaal Cursus* selama dua tahun bagi pemegang ijazah CVO. Setelah lulus mereka bisa menjadi pegawai negeri dan mempunyai wewenang untuk mengajar sampai kelas enam.
- (b) Bisa juga mengikuti *Normaal School (NS)* lama belajar empat tahun, bahasa yang dipakai adalah bahasa Belanda dan bahasa daerah. Setelah lulus mempunyai wewenang untuk mengajar sampai kelas tinggi.

Selain itu untuk anak-anak pribumi yang telah menamatkan sekolah kelas dua dan sekolah desa dapat pula melanjutkan pendidikannya ke sekolah "SCHAKEL" yaitu sekolah yang didirikan pemerintah yang fungsinya menghubungkan pengajaran bumi putera dengan pengajaran berat.

Demikian sekolah-sekolah yang berhasil didirikan pemerintah kolonial Belanda. Dari adanya sekolah-sekolah tersebut, pada akhirnya melahirkan pemuda-pemuda terdidik. Dan melalui pendidikan yang diterimanya selama ini membuka mata pemuda-pemuda Indonesia yang terdidik tentang pentingnya pendidikan. Karenanya kemudian muncul sekolah-sekolah yang didirikan oleh beberapa tokoh pemuda Indonesia, seperti sekolah-sekolah Sarekat Islam pada tahun 1921, sekolah Budi Utomo, sekolah Kerajinan Rumah oleh RMT. Utoyo pada tahun 1904 dan sebagainya.

Di bagian putri muncul Sekolah Kartini pada tahun 1904, sekolah Dewi Sarikat tahun 1904, sekolah Diniyah Putri di Padang Panjang tahun 1917 dan lain-lain. Tetapi sayangnya sekolah-sekolah ini belum bersifat nasional dan bercorak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan pendirian sekolah tersebut. Baru pada tahun 1992 muncul sekolah pertama yang mempunyai corak pendidikan nasional yang bernama Perguruan Taman Siswa.

Perguruan Taman Siswa pertama-tama berdiri di Kota Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Perguruan ini didirikan oleh seorang tokoh politik yang juga mempunyai perhatian besar pada dunia pendidikan. Beliau

adalah RM Suwardi Suryaningrat yang kemudian dikenal sebagai Kio Hajar Dewantara.

Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889. Ia adalah cucu dari Sri Paku Alam VIII. Karena keaktifannya dalam organisasi Indische Partij, pada tahun 1913 sempat membawa pemuda drop out Kweek Scool ini ke pembuangan di negeri Belanda. Dalam pembuangan itu ia memakai kesempatan untuk memperdalam pengetahuannya mengenai pendidikan hingga berhasil memperoleh akte guru pada tahun 1915. Di sini ia mulai mengenal tokoh-tokoh besar dunia pendidikan dan tertarik pada metode-metode yang di gunakan tokoh-tokoh tersebut, seperti J.J. Rousseau, Dr. Frobei, Dr. Montessori, Rabindranat Tagore, John Dewey, Kerschenteiner dan Driedrich Frobel. Tokoh-tokoh inilah yang nantinya mempengaruhi Ki Hajar Dewantara, yang kemudian berhasil merumuskan pertanyaan atas pengajaran nasional.

Setelah masa pembuangan pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara bekerja sebagai guru di sekolah-sekolah yang ada di negeri Indonesia, ia merasa kecewa dengan sistem pendidikan yang dipergunakan di Indonesia. Ki Hajar merasa kecewa bahwa sejak usia muda (6 tahun), anak-anak telah di didik menjadi atau seperti Belanda. Mereka kehilangan rasanya dari jiwa kerakyatan. Seringkali mereka harus membaca cerita-cerita bahasa Belanda yang dapat mengurangi kepercayaan atau kebanggaan terhadap bangsanya sendiri. Melihat keadaan yang demikian muncullah gagasan dalam dirinya untuk mendirikan sekolah sendiri yang akan di bina sesuai dengan cita-citanya.

Sebagai realisasi cita-citanya tersebut, pada tahun 1922 Ki Hajar Dewantara membuka sekolah perguruan yang di beri nama Perguruan Taman Siswa. Pendirian Taman Siswa bertujuan untuk memenuhi kepentingan rakyat Indonesia, karena sekolah-sekolah yang ada didirikan oleh pemerintah hanyalah untuk memenuhi kepentingan pemerintah baik dalam bidang politik ekonomi maupun politik. Dalam asas pengajarannya Ki Hajar Dewantara berusaha memadukan antara aliran pendidikan barat dan aliran kebaktian, dengan tujuan untuk membahagiakan bangsa dan membahagiakan manusia.

Di dalam Taman Siswa seorang guru atau pamong tidak hanya berkewajiban mengajar, tetapi ia juga wajib mendidik. di dalam

mengajar berarti memberi ilmu pengetahuan, sedangkan mendidik berarti menuntun tumbuhnya budi pekerti dalam hidup anak didik agar kelak menjadi manusia berprilaku dan beradab dan dan bersusila. Cara mengajar dan mendidik dengan menggunakan perintah, paksaan dan hukuman sebagaimana yang dipakai dalam pendidikan kolonial, tidak dipergunakan di dalam perguruan ini. Adapun sistem yang dipakai adalah dengan sistem atau metode among dan semboyan Tut Wuri Handayani, di mana seorang guru hanya berkewajiban sebagai pemimpin yang berdiri dibelakang, tetapi mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anak didik berjalan sendiri. Di samping itu seorang diharapkan dapat membangkitkan murid bila berada di tengah-tengah murid dan memberi contoh bila depan mereka. Dengan demikian di dalam sistem ini hak atas anak kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan pembawaannya diakui. Sedangkan dasar pendidikannya adalah kebudayaan, kebangsaan Indonesia dan berdiri di atas kaki sendiri. Bila diuraikan secara keseluruhan azas-azas pendidikan dan pengajaran Taman Siswa tersebut adalah sebagai berikut :

1. dan 2. Kemerdekaan untuk mengatur dirinya sendiri bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri
3. Menyinggung kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi dan politik
4. Mengandung dasar kerakyatan
5. Percaya pada kekuatan sendiri
6. Keharusan untuk belajar sendiri segala usaha.
7. Mengharuskan adanya kikhlasan lahir batin

Dasar-dasar pemikiran Ki Hadjar Dewantara ini yang kemudian banyak mempengaruhi undang-undang pendidikan yang berhasil di wujudkan pada tahun 1950. Pada tahun Ki Hadjar Dewantara di percayakan untuk mengetahui Badan Penasehat dan Pengajaran. Undang-undang mengenai pendidikan tersebut berhasil terwujud pada tahun 1950 yang kemudian dikenal dengan undang -undang No.4 tahun 1940. Dalam undang-undang ini sebagian besar cita-cita Ki Hadjar banyak tertuang yang kemudian dijadikan dasar bagi pendidikan dan pengajaran yang diselenggarakan Republik Indonesia. Dan sampai saat ini cita-cita Ki Hadjar tersebut tetap sesuai dengan sistem pendidikan

saat ini yang dasar-dasar pendidikan tertuang dalam undang-undang pendidikan No. 2 tahun 1989, sebagai mana yang diucapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada peringatan serataus tahun Ki Hadjar Dewantara.

Sebelumnya pada tahun 1945 Ki Hadjar Dewantara ketua Panitia Penyelidik Pengajaran yang akan bertugas menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan perubahan sitem pendidikan nasional. Dengan demikian uraian di atas menunjukkan betapa besarnya jasa-jasa yang telah diberikan Ki Hadjar Dewantara bagi pendidikan di Indonesia. Karena itu sudah sepatasnya bila kita sebagai bangsa Indonesia dapat menghargai perjuangan yang diberikan beliau dalam rangka tersebut, maka dipilahlah tanggal 2 Mei sebagai Hari Pendidikan Nasional.

Pendirian perguruan Taman Siswa dimulai dengan mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak yang di sebut "Taman Care", yang kemudian menjadi Taman Indra. Setelah itu di susul dengan berdirinya sekolah rendah dan sekolah lanjutan pertama. Sekolah rendah di bagi atas dua bagian yaitu taman anak usia dari tujuh tahun sampai dengan sembilan tahun (kelas 1 s/d 3) dan taman muda usia sepuluh tahun sampapai dengan tiga belas tahun (kelas 4 s/d 6). Sedangkan sekolah lanjutan pertama (SMP) disebut taman madya.

Dimulai dari Taman Siswa di Yogyakarta, perguruan taman siswa terus berkembang. Dalam waktu delapan tahun setelah berdirinya taman siswa yang pertama pada tahun 1922. Taman siswa telah mempunyai 40 cabang yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia, diantaranya 3 di Sumatera Timur dan 4 di Kresidenan Kalimantan Selatan. Setelah Taman Siswa ini dimulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas.

Sementara itu berdirinya jumlah sekolah-sekolah yang berdiri, seperti ruang pendidikan INS Kayutanam di Sumatera Barat, pada tahun 1926 oleh Muhammad Syafei. Perguruan Rakyat di Jakarta pada tanggal 11 Desember 1928, yang dipimpin oleh Mr. Sunario dan A. Monomutu Wilson. Kesatrian Institut di Bandung oleh E.F.E. Douwes Dekker pada bulan September 1922, Kanisiun dan sebagainya.

Demikianlah perjalanan panjang yang telah dilalui dunia pendidikan Indonesia. Saat ini setelah sekian tahun sejak di tetapkannya Hari

Pendidikan Nasional, pada tahun 1959 telah banyak kemajuan-kemajuan yang berhasil di peroleh dalam bidang pendidikan.

Saat ini sekolah-sekolah sudah semakin banyak yang tersebar di seluruh tanah air, mulai dari kota-kota besar hingga pelosok desa. Pendidikan saat ini bukan lagi suatu hal yang sulit dicapai bagi masyarakat. Setiap orang dapat menikmati pendidikan baik pria maupun wanita, golongan bangsawan atau rakyat biasa, golongan berada maupun menengah ke bawah. Bahkan dalam waktu pemerataan pendidikan, pemerintah telah melancarkan suatu program wajib belajar yang mengharuskan setiap putra Indonesia memperoleh pendidikan, paling tidak pendidikan dasar.

Demikianlah perjalanan panjang yang telah dilalui dunia pendidikan Indonesia kini setelah sekian tahunsejak didirikannya perguruan Taman Siswa pada tanggal 8 Juli 1922, telah banyak kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai dalam dunia pendidikan .

Sekarang ini lembaga-lembaga pendidikan sudah semakin banyak jumlahnya. Hampir disetiap daerah propinsi memiliki sekolah-sekolah mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak hingga tingkat perguruan tinggi, bahkan pada tingkat desa atau kecamatan sudah terdapat sekolah mulai tingkat Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah Atas.

Sekarang sudah jarang kita melihat anak-anak yang tidak mendapat pendidikan. Pendidikan kini bukan lagi suatu barang yang sulit dijangkau. Bila sebelumnya pendidikan hanya bisa dinikmati golongan masyarakat tertentu, maka saat ini setiap orang dapat menikmati. Mereka dapat sekolah sesuai dengan cita-citaya dan kemampuan mereka baik pria maupun wanita, golongan bangsawan, atau golongan rakyat biasa, golongan berada maupun sederhana. Bahkan dalam usaha meratakan pendidikan bagi seluruh masyarakat, pemerintah telah melancarkan program wajib belajar, yang mewajibkan setiap anak-anak Indonesia untuk mendapat pendidikan, paling tidak pendidikan dasar.

Dalam hal fasilitas pendidikan, kini hampir sebagian besar sekolah-sekolah telah mempunyai sarana pendidikan yang memadai baik sarana dalam proses mengajar, sarana olah raga, maupun sarana peribadatan.

Di bidang materi pengajaran dan sistim pendidikan terus di tingkatkan. Itu sebabnya Orde Baru secara bertahap terus menempatkan pendidikan pada prioritas tertinggi.

Begitu pula dengan mutu pengajaran, saat ini telah mengalami peningkatan. Sekarang ini jumlah dan mutu guru terus ditingkatkan. Bila sebelumnya seorang guru sekolah dasarnya hanya berpendidikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) yang setingkat dengan SMA, maka kini mereka harus mempunyai pendidikan yang lebih tinggi lagi. Dalam usaha ini juga, para guru-guru saat ini diberlakukan sistim kredit kerja dengan tujuan untuk merangsang kreatifitas guru, yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu anak didik.

Namun, walaupun telah banyak keberhasilan-keberhasilan yang dapat dicapai dalam dunia pendidikan, tidak berarti tidak ada masalah-masalah dalam pendidikan di negeri kita ini. Masih banyak persoalan-persoalan yang harus kita pecahkan dalam usaha usaha memajukan pendidikan negeri, dan masih banyak hal-hal yang mesti diperjuangkan dalam rangka meningkatkan pendidikan, baik mengenai metode pengajaran, mutu pengajaran maupun sarana dan fasilitas pendidikan.

Kita masih melihat gedung-gedung sekolah yang belum memenuhi sarana yang memadai. Masih ada sekolah-sekolah yang tidak mempunyai bangku dan meja yang cukup, penerangan yang kurang memenuhi syarat dan lokasi gedung yang tidak strategis dimana pada waktu-waktu tertentu murid memaksa untuk masuk karena banjir.

Dalam hal metode pengajaran, masih ada metode-metode pengajaran yang mesti ditinjau kembali, seperti metode Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) yang diprogramkan pada murid-murid yang sudah jauh berada di pedesaan tentulah sulit, karena mereka terus membawa alat-alat yang diperlukan sesuai dengan metode CBSA tersebut.

Belum lagi masalah pengurusan di SMA dengan sering cepat berubah, masalah terlalu banyaknya mata pelajaran di Sekolah Lanjutan Atas atau perguruan tinggi akibat adanya mata pelajaran "titipan" dan sebagainya.

Kini menjadi tugas kita sebagai generasi penerus untuk melanjutkan perjuangannya tokoh-tokoh pendidikan kita dan memperbaiki

kekurangan-kekurangannya yang masih banyak dalam dunia pendidikan di Indonesia. Melalui Hari Pendidikan Nasional marilah kita tingkatkan pendidikan di negeri ini. Dan melalui Hari Pendidikan Nasional mari kita mencerdaskan bangsa. Sebab, kekuatan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan di lingkungan bangsa yang bersangkutan.

Sedangkan mengenai mutu pengajaran, walaupun sebagian beberapa guru sadar akan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Tetapi masih banyak guru-guru yang melalaikan tugasnya demi mencari tambahan kekurangan keluarga, yang pada akhirnya akan mempengaruhi untuk pendidikan anak. Karena itu masih dipirkan mengenai kesejahteraan guru, terutama guru-guru dipedesaan.

Daftar Pustaka

Buku :

1. *Karya Ki Hadjar Dewantara Bagian I*, Pendidikan Yogyakarta : Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa, 1977.
2. Sedyawati Edi dkk., *Sejarah Pendidikan di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-bangsa Barat*, Jakarta : Proyek IDSN Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan : Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Budaya, 1991.
3. Soeratman Darsiti., *Ki Hadjar Dewantara*, Jakarta : Proyek IDSN Ditjen Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989

Surat Kabar

Kompas, 2 Mei 1989.

Kompas, 28 Oktober 1989.

Kompas 4 Februari 1989

HARI ANAK NASIONAL

Hampir satu dasawarsa belakangan ini, 23 Juli dirayakan sebagai "Hari Anak Nasional". Berbagai kegiatan telah dilakukan yang melibatkan anak-anak mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai sekolah Lanjutan Atas. Pernyataan itu didasarkan pada pemikiran bahwa dalam kehidupan manusia ini, masa kanak-kanak merupakan masa peletakan landasan yang kokoh bagi terwujudnya manusia seutuhnya. Anak-anak jelas menjadi sumber daya insani dan model pembangunan bangsa yang akan datang untuk mencapai ke sejahteraan jasmani dan rohani. hal ini sejalan dengan ucapan Presiden Republik Indonesia dalam ceramah berkala kesejahteraan Anak yang antara lain mengemukakan bahwa kesejahteraan anak anak mengandung makna yang mendalam. Anak harus merasa bahagia dan merasa mendapatkan perlindungan, pendidikan dan bimbingan sehingga anak-anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia Indonesia seutuhnya.

Usaha untuk mencapai kesejahteraan anak ini, berjalan seiring dengan upaya pelestarian dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Karena di dalam kehidupan keluarga dan masyarakat dan anak-anak mempunyai fungsi sebagai penerus dan pewaris. Sejalan dengan fungsi tersebut maka generasi anak merupakan generasi muda penerus dan pewaris perjuangan menuju cita-cita perjuangan bangsa.

Jadi kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada kualitas generasi mudanya.

Hari anak diperingati dan dirayakan berdasarkan orientasi Lembaga UNICEF (United Nation Children Fund). Adapun titik perhatian UNICEF meliputi gambaran situasi anak-anak, dan memberikan gambaran keadaan serta perkembangan negara-negara sedunia di bidang kehidupan anak-anak. Dalam Hal ini James P. Grant yang bertindak sebagai Direktur Eksekutif Dana, berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan informasi kepada semua negara, bagaimana situasi dan kondisi masing-masing negara, tentang tingkat kehidupan dan kesejahteraan anak di negara-negara tersebut.

Dalam majalah *Situasi Anak-Anak di Dunia*, edisi 1984, diketahui Negara Indonesia sebagai negara ke-5 dengan penduduk terbesar di dunia, ternyata masih menghadapi tingkat kematian yang cukup tinggi, khususnya kematian anak Balita. Dijelaskan bahwa salah satu sebab utama adalah kira-kira sepertiga sampai setengah dari jumlah anak-anak Indonesia menderita kekurangan gizi. Sehubungan dengan itu pemerintah dan masyarakat berusaha keras untuk meningkatkan kualitas kehidupan yang meliputi keluarga dan masyarakat demi mencapai kesejahteraan yang "ideal".

Didasari pada kenyataan bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa tergantung pada kualitas generasi mudanya, sedang kualitas generasi muda itu sendiri dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan dan usaha, maka usaha atau upaya-upaya Bangsa Indonesia untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih maju dan lebih tinggi tingkat kesehatan Ibu dan Anak.

Sejalan dengan itu pula Presiden selalu mengingatkan pada setiap Hari Anak Nasional kepada seluruh rakyat Indonesia, khususnya para ibu agar lebih memfokuskan perhatiannya kepada kesejahteraan anaknya. Kesejahteraan mana, erat kaitannya dengan masalah "Kesehatan" yang mencakup kesehatan Jasmani dan Rohani.

Pentingnya Hari Anak Nasional ini diperingati karena ada hubungannya dengan proses Pembangunan Nasional. Artinya berjalannya suatu proses perkembangan di suatu negara, salah satu faktor penentunya adalah kesejahteraan dari seluruh rakyatnya.

Kesejahteraan bisa dicapai apabila manusia umumnya selaku subyek pembangunan selalu dalam keadaan sehat. Di sini anak merupakan potensi pembangunan sehingga sudah selayaknya apabila anak menjadi pusat perhatian dalam pembangunan kesehatan. Demikian pentingnya kedudukan anak dalam pembangunan kesejahteraan bangsa maka diperlukan *PENCANANGAN HARI ANAK NASIONAL*.

Pertimbangan untuk menetapkan Hari Anak Nasional adalah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak sebagai penerus cita-cita bangsa. Selain itu sebagai wahana untuk lebih meningkatkan peran serta dan kegiatan masyarakat maupun pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan anak menuju terwujudnya tingkat kesejahteraan anak yang optimal. Hal itu sejalan dengan strategi global yang telah dicanangkan oleh WHO dalam Deklarasi Alma Ata tahun 1978 yaitu "*Health For All By The Year 2000*". Yakni suatu keadaan yang diartikan sebagai suatu kondisi masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memperoleh derajat kesehatan, yang memungkinkan setiap manusia bisa hidup produktif. Baik secara sosial maupun ekonomi menjelang tahun 2000. Untuk itulah maka kesehatan anak sejak dalam kandungan sampai dengan ia berumur 21 tahun merupakan "Hak Anak Yang Mendasar".

Berdasarkan hal di atas, telah dibuat Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang diundangkan pada tanggal 23 Juli. Kemudian untuk mensinkronkan gagasan dan tujuan yang ingin dicapai, maka Presiden dengan Surat Keputusan nomor 4 tahun 1984 telah menetapkan 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Sesuai keputusan Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (MENKOKESRA) mulai tahun 1985 mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan penyelenggaraan Hari Anak Nasional. Sedangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ditugasi untuk mengatur pelaksanaan penyelenggaraannya yang dimulai sejak tahun 1985 tersebut.

Memang sejak empat Pelita yang lalu upaya pembangunan di bidang kesehatan telah mengutamakan pemerataan. Kemudian pada Pelita V ini, ditambah dengan peningkatan mutu pelayanan. Sehubungan dengan itu pada Hari Kesehatan Nasional tahun 1986 Presiden telah mencanangkan "Posyandu" sebagai strategi nasional

untuk mencapai tujuan “Desa Warsa Anak Indonesia 1986-1996” sebagai perwujudan dari upaya pemerataan pelayanan kesehatan.

Penyelenggaraan Hari Anak Nasional, dilaksanakan oleh Pemerintah bersama-sama masyarakat dengan menitik beratkan pada upaya untuk mewujudkan perkembangan anak secara optimal yang meliputi aspek jasmani, rohani maupun sosialnya.

Sejalan dengan itu maka kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi berbagai bidang ketrampilan maupun aspek-aspek yang mendatangkan kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan dan sebagainya bagi dunia anak. Hal itu diharapkan akan berdampak positif kepada kesejahteraan dan kebahagiaan serta peningkatan martabat kehidupan anak sebagai manusia di kemudian hari.

Sejak perayaan Hari Anak Nasional 1985, berbagai kegiatan telah dilakukan dengan melibatkan hampir seluruh anak-anak dari “berbagai lapisan”. Melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan itu tidak secara langsung kita dapat mengukur tingkat kualitas generasi muda. Seperti penyelenggaraan upacara Pengibaran Bendera Merah Putih yang bertujuan memupuk rasa tanggung jawab perorangan dan kelompok dalam melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kegiatan yang dilakukan pada upacara bendera ini, dititik beratkan untuk memperoleh ketertiban dan kehidmatan dalam meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bersama dan perorangan serta rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa.

Perayaan Hari Anak Nasional 1985 tersebut diselenggarakan berdasarkan program dan petunjuk teknis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang antara lain berisi : Tema perayaan adalah “Anak Dan Keluarga Menuju Masa Depan Yang Cerah” atau “Anak Sejahtera Menjamin Masa Depan Yang Lebih Cerah”. Sasarannya adalah mulai dari anak balita sampai SLTA dan anak-anak lain yang berusia dibawah 21 tahun. Kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan anak yang meliputi kesehatan, pendidikan, kerohanian/keagamaan, informasi/komunikasi dan sosial.

Bentuk kegiatan disesuaikan dengan umur anak sebagai sasaran kegiatan, antara lain dengan pemeriksaan kesehatan di Puskesmas dan sekolah-sekolah, lomba cerdas dan kreatif, panggung gembira, karnaval

dan sebagainya. kegiatan-kegiatan tersebut pada umumnya dititik beratkan pada pelaksanaan di daerah-daerah sesuai kondisi masing-masing dan diatur oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada perayaan Hari Anak Nasional 1986, segala program kegiatan dan kepanitiaan masih diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan petunjuk Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra). Pada perayaan Hari Anak Nasional 1986-1996, berdasarkan usul Menko Kesra. Disamping itu Hari Anak Nasional 1986 ditandai pula dengan "Gerakan Imunisasi kepada Anak Balita".

Perayaan dan Peringatan Hari Anak Nasional 1986 ini bertema "Peningkatan Kesejahteraan Anak Indonesia Menuju Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia Dalam Rangka Pembangunan di Masa Depan". Adapun kegiatan yang diselenggarakan, bersifat sederhana dan mengutamakan kegiatan dari anak oleh anak dan untuk anak. Sesuai sifatnya, maka disamping kegiatan-kegiatan seperti berbagai lomab dilaksanakan pula berbagai potongan harga atau keringanan untuk pembelian obat untuk anak, karcis tanda muk taman hiburan, pembelian buku dan sebagainya.

Pada tahun 1987, Peringatan Hari Anak Nasioanal bertema "Peran Serta Keluarga dan Masyarakat Dalam Peningkatan Pelayanan Paripurna Kesejahteraan Anak". Kemudian atas petunjuk Presiden tema tersebut disederhanakan menjadi "Saya Anak Indonesia" dengan sebhema "Hidup Bersih dan Sehat". Selanjutnya thema "Saya Anak Indonesia" ditetapkan menjadi thema sentral peringatan Hari Anak nasional untuk tahun-tahun berikutnya sedangkan subtema dapat disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Kegiatan-kegiatan dalam Hari Anak Nasional 1987, makin meningkat dan dibagi dalam tiga bidang yaitu :

(1) Didang Kegiatan Humas, Publikasi dan Penerbitan

Dalam bidang kegiatan ini informasi publikasi dan penerbitan mengenai anak meliputi pertumbuhan dan perkembangan serta berbagai aspek yang berhubungan dengan anak digalakkan. Dengan begitu diharapkan masyarakat luas dapat mengerti dan

memahami usaha-usaha yang diadakan untuk mencapai tujuan kesejahteraan bagi anak.

(2) Bidang Kegiatan Peningkatan Peranserta Masyarakat dan Lomba

Di bidang kegiatan ini, lembaga-lembaga sosial seperti yayasan-yayasan, panti-panti asuhan anak, lembaga masyarakat, diajak untuk turut serta dalam berbagai kegiatan lomba yang melibatkan anak, mulai dari usia balita sampai SLTA. Bahkan lembaga-lembaga tertentu lebih meningkatkan lagi lomba-lomba yang sasarannya adalah anak 0—5 tahun (balita).

(3) Bidang Kegiatan Acara Puncak

Anak dan para orang tua (masyarakat) yang terlibat langsung dalam kegiatan Hari Anak Nasional 1987, secara bersama-sama dan serempak mengadakan penghormatan dan pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 23 Juli dilanjutkan dengan berbagai acara hiburan.

Selain ketiga bidang kegiatan yang merupakan kegiatan tetap pada setiap Hari Anak itu diadakan pula suatu Bidang kegiatan Temu Ilmiah. Berbagai Instansi dan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta terangsang untuk mengadakan pertemuan-pertemuan guna membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak dan keluarga. Diantaranya dengan menyelenggarakan “Temu Karya Nasional Peningkatan Peran Serta Keluarga dalam Mewujudkan Kesejahteraan Anak melalui Strategi Kelangsungan Hidup, Tumbuh Kembang dan Perlindungan Anak”. Temu Karya tersebut diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 6 sampai 11 Juli 1987, yang dihadiri oleh berbagai ahli.

Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional tahun 1988, ditunjuk Menteri Sosial RI sebagai penanggung jawab penyelenggaraannya. Tema perayaan tetap “Saya Anak Indonesia” dengan subthema “Kesetiakawanan Sosial. Kemudian pada Hari Anak Nasional 1989 sebagai panitia pelaksana pusat adalah Departemen Agama Republik Indonesia dengan penanggung jawab Menteri Agama. Pada peringatan di tahun 1989 itu, subtemanya adalah “Pembinaan Anak Sejahtera Beriman dan Bertaqwa”.

Tujuan yang dirumuskan adalah meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan anak. Disamping itu mengembangkan tindak lanjut program-program dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan Hari Anak sebelumnya serta membulatkan tekad para pengemban kesejahteraan anak terutama para pemimpin organisasi keagamaan untuk mewujudkan hak-hak anak dalam rangka meningkatkan kualitas anak Indonesia yang sejahtera lahir dan batin, dalam kehidupan di dunia dan akhirat.

Selanjutnya dalam perayaan peningkatan Hari Anak Nasional 1990 bertema "Saya Anak Indonesia" dengan subtemanya adalah "Demi Kesejahteraan Dan Kecerdasan Anak". Sesuai tema dan subtema tersebut nampaknya Pemerintah dan masyarakat semakin berusaha untuk meraih dan mewujudkan kesejahteraan bagi anak dalam arti yang selus-luasnya dan sedalam-dalamnya. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti Temu Karya Kesejahteraan Anak, Lomba Cerdas dan kreatif, rapat kerja Nasional Kesejahteraan Anak, semuanya diarahkan demi mencapai kesejahteraan bagi anak lahir dan batin.

Dalam kegiatan Temu Karya Kesejahteraan Anak diadakan Seminar Tentang Anak. Seminar itu telah menampilkan berbagai makalah di antaranya ialah *Anak dan Ilmu Pengetahuan, Anak dan Kesehatan, Anak dan Agama, Anak dan Pergaulan, dan Anak dan Media Massa*, dan lain-lain. Semuanya itu diadakan karena anak merupakan potensi pembangunan yang kelak akan mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu sudah selayaknya apabila anak menjadi pusat perhatian dalam pembangunan kesehatan yang diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesehatan jasmani, rohani dan sosialnya seoptimal mungkin.

Untuk dapat mewujudkan cita-cita mensejahterakan anak Indonesia seperti yang dirumuskan dalam Dasa Warsa Anak Indonesia 1986 --1996 yang dicanangkan Presiden pada 23 Juli 1986, perlu diusahakan agar hak-hak anak sebagai tunas bangsa dapat dipenuhi sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan hal itu maka pada peringatan Hari Anak Nasional 1991 yang juga bertema "Saya Anak Indonesia" dan Subtema "Saya

Anak Indonesia Sehat dan Gembira” diupayakan agar bidang kesejahteraan anak termasuk kesehatan anak dapat didasari dan dilaksanakan sebagai tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Dalam upaya peningkatan kualitas anak sebagai generasi penerus bangsa dapat ditinjau dari dua segi, yakni :

(1) Peningkatan Kualitas Anak Nasional dari Segi Konsep (program)

Usaha peningkatan kualitas anak dari segi ini terlihat pada peringatan-peringatan Hari Anak Nasional (HAN) dari tahun (1986 sampai 1996). Tema-tema yang diadakan dalam peringatan HAN di tahun-tahun tersebut difokuskan pada bagaimana meningkatkan kualitas anak nasional untuk mencapai kesejahteraan anak secara optimal. Di tahun 1986 temanya adalah “Meningkatkan kesejahteraan anak menuju peningkatan kualitas manusia Indonesia di masa depan”. Tahun 1987 titik perhatian tercurah pada pengembangan perilaku hidup bersih dan sehat. Tahun 1988 perhatian diarahkan kepada penurunan tingkat kematian bayi dan anak-anak balita, tahun 1989 memusatkan perhatian pada pembinaan keimanan dan ketaqwaan. Tahun 1990 suatu saran yang sangat ditekankan kepada semua orang tua yaitu keharusan membina anak-anak sedini mungkin, karena masa depan adalah di tangan anak-anak bangsa Indonesia. Kemudian di tahun 1991 bertema Saya Anak Indonesia Sehat dan Gembira. Dengan suatu pesan khusus meningkatkan kesadaran masyarakat umumnya dan orang tua khususnya tentang pentingnya keberadaan anak, haknya untuk tumbuh dan berkembang sebagai calon penerus bangsa serta selalu menyetatkan dan menggembirakan anak dan lingkungannya.

(2) Peningkatan kualitas Anak Nasional dari Segi Praktis (Tindakan)

Dari segi tindakan diharapkan adanya kerjasama antara pihak pemerintah, swasta dan orang tua, sehingga tercapailah apa yang telah dikonsepsikan. Meskipun dalam pelaksanaan antara konsep dengan pelaksanaan programnya.

Khusus untuk anak-anak Balita, pemerintah mengadakan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Pada Posyandu ini bentuk pelayanan diutamakan untuk kesehatan ibu dan anak. Dan di Posyandu inilah tempat para ibu dan anak. Dan di Posyandu inilah tempat para ibu

menanyakan hal-hal penting yang berhubungan dengan peningkatan kesehatan anaknya sekaligus ibu itu sendiri.

Hal-hal yang penting ditekankan pada usaha peningkatan kualitas Anak Nasional oleh pihak Departemen Kesehatan atas nama pemerintah adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI).
- 2) Peningkatan Pemanfaatan makanan yang bernilai gizi tinggi bagi anak-anak.
- 3) Peningkatan Pencakupan Imunisasi dasar untuk pencegahan penyakit pada anak (cacar, BCG, DDT, Polio).
- 4) Peningkatan Pelaksanaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) melalui Pancawarga (ayah, ibu dan 3 anak).
- 5) Peningkatan Lingkungan fisik sehat sebagai salah satu faktor yang berpengaruh bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

Program ini ditujukan kepada seluruh Anak yang berada di wilayah Indonesia, yaitu anak-anak yang ada di kota-kota, desa-desa, pantai-pantai, lereng-lereng gunung dan di sekitar lembah-lembah. Anak-anak Indonesia ini tumbuh dan berkembang dengan bermacam-macam tradisi, kondisi dan adat istiadat. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah semua anak merupakan potensi pembangunan. Oleh sebab itu mereka menjadi pusat perhatian dalam pembangunan kesehatan. Mereka harus tumbuh dan berkembang seoptimal mungkin sesuai potensi yang dimilikinya, agar kelak menjadi warga negara dan anggota masyarakat yang mampu mencapai tingkat kehidupan yang layak, bahagia serta sejahteraan lahir dan batin dalam masyarakat yang aktif membangun. Kita harus memberi bekal kepada mereka berupa kecerdasan, keterampilan, irama dan taqwa serta semangat cinta Tanah Air dan Bangsa. Untuk mencapai itu berbagai usaha harus dilakukan, diantaranya anak harus mempunyai gizi yang baik dalam pertumbuhannya.

Faktor gizi dianggap penting dalam pembangunan Bangsa dan Negara karena kekurangan gizi tentu akan mendatangkan bencana. Kekurangan gizi juga dapat merosotkan mutu kehidupan. Bahkan menyebabkan angka kematian yang tinggi pada bayi dan anak-anak. Selain itu terganggunya pertumbuhan badan, menurunnya daya kerja,

gangguan pada perkembangan mental dan kecerdasan serta berbagai jenis penyakit lainnya. Keadaan seperti ini terang bukan hanya menyulitkan gerak pembangunan selanjutnya, melainkan merupakan hambatan yang sungguh-sungguh. Oleh sebab itu perlu disadari benar arti penting dari masalah pangan dan gizi ini terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena kualitas gizi dimasa kanak-kanak dan peningkatannya tentu akan menghasilkan manusia Indonesia yang berproduktivitas, mampu mengelola, berusaha dan memiliki ide-ide tentang proses pembangunan Indonesia di masa mendatang.

Dengan uraian di atas diharapkan kepada rakyat Indonesia khususnya para ibu sebagai pengasuh, agar senantiasa memperhatikan bahwa usia Balita dan Anak-anak merupakan usia dasar fisik kehati-hatian bagi pembentukan dan pertumbuhan dasar fisik serta kemampuan mental anak. Selanjutnya pembinaan proses kesehatan anak pada tingkat masa sekolah mulai dari TK sampai SLTA tidak boleh diabaikan. Karena itu setiap kali peringatan Hari Anak Nasional semangat dan tekad rakyat selalu disegarkan untuk membesarkan dan mengantarkan anak-anak menjadi generasi yang siap membangun kehidupan yang lebih baik dari generasi-generasi sebelumnya. Masa depan anak adalah masa kemajuan yang memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Masa itu penuh dengan aspirasi-aspirasi baru dan perubahan-perubahan yang cepat. Karena itu diperlukan kecerdasan dan keterampilan.

Di samping itu hal-hal yang menyangkut etika, moral dan kepribadian merupakan jawaban bagi keselamatan pembangunan dimasa depan itu. Sebab tanpa itu kemajuan akan dapat menghadapi manusia dengan manusia atau golongan dengan golongan dalam persaingan dan pertarungan yang keras seperti serigala yang saling bercakaran. Etika moral dan kasih sayang tersebut hanya dapat diperoleh dalam lingkungan keluarga, terutama melalui kedua orang tua.

Selanjutnya melalui berbagai lembaga dan organisasi sosial dapat banyak berupaya untuk meningkatkan pemeliharaan, perawatan, pengasuhan dan pendidikan anak. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kestabilan fungsi dan pribumi anak. Sebab di usia anak-anak lah dapat

ditentukan bahwa mereka adalah sumber dan kekuatan bagi kelancaran pembangunan Indonesia berikutnya.

Daftar Pustaka

1. Trastotenojo S. Moeljono, *Anak untuk Anak*, Yayasan Essentia Macmillan Press, London 1983.
2. _____, *Sistem Kesehatan Nasional*, Departemen Kesehatan RI, 1984
3. *Pedoman Pelaksana Hari Kesehatan Nasional*, (Tahun. 1988 dan 1991).
4. *Sambutan/Pengarahan Presiden dalam Hari Kesehatan Nasional* (12 November 1986 s/d 1990)
5. *Sambutan/Pengarahan Presiden dalam Hari Kesehatan Nasional* (12 November 1986).
6. *Sambutan Presiden pada Pembukaan Pertemuan Ke-VIII Para Menteri Kesehatan Negara-Negara Anggota WHO Wilayah Asia Tenggara* (3 Oktober 1989).
7. Grant P. James, *Majalah Situasi Anak-Anak di Dunia* (1982-1991).

HARI KOPERASI NASIONAL

Hari Koperasi Nasional 12 Juli merupakan salah satu hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada hari ini bangsa Indonesia merayakan dan memperingati lahirnya koperasi untuk pertama kalinya dalam sistem perekonomian Indonesia.

Koperasi sebagai salah satu sistem perekonomian rakyat memang telah ada sejak jaman kolonial. Akan tetapi ia baru ditetapkan sebagai salah satu soko guru perekonomian Indonesia setelah Indonesia menjadi negara yang berdaulat. Segera setelah proklamasi kemerdekaan RI, sehari kemudian diikuti oleh pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, terkandung tekad bangsa Indonesia yang pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat dengan menggali potensi alam yang ada. Hal tersebut dewasa ini berangsur-angsur mulai terwujud. Yakni berupa usaha untuk menciptakan sistem perekonomian seperti terkandung di dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945, yaitu koperasi sebagai salah satu penopang sistem perekonomian rakyat Indonesia.

Sebagai upaya awal dalam alam kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1946 diadakan pendaftaran kembali koperasi-koperasi yang masih ada ataupun yang baru didirikan. Selanjutnya para pemimpin koperasi berusaha meluruskan asas dan sendi dasar koperasi yang

sempat menyimpang karena situasi perjuangan saat itu. Diupayakan untuk mengadakan kesempatan tentang prinsip-prinsip koperasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan koperasi di Indonesia. Usaha tersebut di saat itu masih mengalami berbagai rintangan karena perang yang masih berkecamuk diberbagai tempat, ditambah lagi dengan blokade ekonomi yang dijalankan pihak Belanda.

Pada akhir tahun 1946 para pemimpin koperasi di Jawa Barat berusaha dengan sangat gigih untuk mengadakan suatu pertemuan di Ciparay yang bertujuan untuk membentuk Pusat Koperasi Priangan. Pusat Koperasi Priangan tersebut selanjutnya mengemban beberapa tugas diantaranya mengupayakan agar terselenggaranya suatu “Kongres Koperasi Seluruh Indonesia”.

Dengan dasar tersebut di atas Pusat Koperasi Priangan berhasil mengadakan Kongres Koperasi untuk pertama kalinya pada tanggal 11 sampai 14 Juli 1947 di Tasikmalaya Jawa Barat. Kongres ini disebut Kongres Koperasi I, pada tanggal 12 Juli Kongres memutuskan beberapa diantaranya :

- (a) menetapkan asas koperasi adalah gotong royong,
- (b) mendirikan Bank Koperasi Sentral,
- (c) memutuskan tanggal 12 Juli sebagai “Hari Koperasi Indonesia”, yang tiap-tiap tahun harus dirayakan.

Berdasarkan keputusan itulah maka bangsa Indonesia selalu merayakan dan memperingati Hari Koperasi tersebut secara Nasional.

Disamping keputusan-keputusan yang ditetapkan itu direncanakan pula untuk mendirikan sebuah tugu peringatan koperasi yang pada dewasa itu telah diletakkan batu pertama pembangunannya baru dimulai pada awal tahun 1950 dan peresmianya dilakukan pada tanggal 12 Juli 1950.

Sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan koperasi serta perkembangan-perkembangan yang dicapai rakyat Indonesia maka dewasa ini Hari Koperasi selalu diperingati. Peringatan Hari Koperasi tersebut tidak lain dijadikan sebagai momentum untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan-kemajuan yang dicapai dan sekaligus hambatan-hambatan yang ditemui dalam pengolahan perkoperasian. Selanjutnya dibuat dan ditetapkan program-program dan langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk waktu berikutnya.

Peringatan dan Perayaan Hari Koperasi itu diselenggarakan di tiap-tiap daerah secara serempak kemudian diselenggarakan secara nasional dan dipusatkan di suatu daerah tertentu. Sejak lima tahun berakhir ini Hari Koperasi Nasional diselenggarakan bersama-sama dengan Hari Krida Pertanian dan Hari Ulang Tahun Program Keluarga Berencana, yang terkenal dengan sebutan PERTASI KENCANA.

Dewasa ini perkembangan perkoperasian di Indonesia praktis sudah meluas disegala lapisan masyarakat. Yaitu meliputi petani, buruh/wanita, mahasiswa, ABRI, dan sebagainya.

Dalam proses perkembangan koperasi itu peranan pemerintah masih sangat menonjol. Hal ini bisa dimaklumi karena eksistensi koperasi Indonesia bersumber pada pasal 33 ayat 1, UUD 1945. Dari sini kemudian dijabarkan dalam pelbagai Undang-Undang Perkoperasian yang di dalamnya antara lain mengatakan bahwa "Koperasi bukanlah semata-mata sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melainkan sekaligus juga sebagai salah satu sarana pembangunan nasional. Dalam ulasa tentang perkoperasian di Indonesia Arifanial Chaniago menyatakan bahwa sayangnya dalam peranan koperasi sebagai sarana pembangunan nasional, sebagai koperasi digunakan sebagai "alat kebijaksanaan pemerintah. "yang sering terlanjur menjadi "alat pemerintah". Hal ini disinyalir sering terjadi terutama di tahun 1960 sampai 1965.

Ada sementara orang melupakan hakekat koperasi sebagai gerakan yang bertolak dari prakarsa masyarakat yang berupaya mencapai tujuan bersama berdasarkan prinsip-prinsip yang disepakati bersama pula. Sehingga asas dan sendi-sendi koperasi seringkali menyimpang dari relnya. Bahkan cita-cita dan citra koperasi dengan sengaja dirusak serta dihancurkan oleh mereka, yang mengakibatkan kesadaran koperasi yang masih rendah pada rakyat nyaris hilang dan pupus sama sekali.

Untuk menyimak situasi perkoperasian di Indonesia ada baiknya kita melihat perkembangan koperasi ini mulai dari berdirinya.

Kebangkitan Gerakan Koperasi

Ide koperasi sesuai dengan catatan yang ditemui, diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1896 oleh Raden Aria Wiria Atmaja, Patih Purwokerto. Di tahun itu ia mendirikan Hulp en Spaar Bank (Bank

Pertolongan dan Simpanan) yang bertujuan memberikan kredit kepada para pegawainya agar bisa terlepas dari cengkeraman lintah darat. Bank ini sering disebut Bank Priyayi karena hanya melayani pegawai pemerintah. Selanjutnya dikembangkan oleh Dewolf Van Westerrode, Asisten Residen Purwokerto menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Kredit Pertanian.

Setelah adanya koperasi yang diperkenalkan aparat pemerintah itu selanjutnya masyarakat mulai memprakarsai berdirinya berbagai jenis koperasi. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Pemerintah Belanda semakin mengendalikan koperasi dengan mengeluarkan berbagai peraturan. Apalagi ketika adanya tanda-tanda bahwa koperasi banyak dipergunakan sebagai wadah perjuangan politik oleh para pejuang kemerdekaan. Kemudian dalam zaman Jepang pemerintah pendudukan semakin kuat mengendalikan koperasi. Pada masa itu koperasi disebut “Kumiai” yang dijadikan sebagai alat Pemerintah dalam mengadakan dan distribusi barang.

Ketika diadakan persiapan-persiapan Kemerdekaan Indonesia para pendiri negara Republik Indonesia (RI) mencantumkan koperasi pada penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1), pasal 33. Koperasi dipandang sebagai sarana pengembangan ekonomi yang paling cocok dengan kepribadian Indonesia. Penjelasan itu dirumuskan oleh Bung Hatta, anatar lain, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan itu ialah koperasi “

Pencantuman koperasi pada konstitusi ini dengan sendirinya merupakan komitmen seluruh bangsa Indonesia untuk melaksanakannya. Sehubungan dengan itu perkembangan koperasi di Indonesia tidak terlepas dari suasana politik negara. Pada masa Indonesia memberlakukan UUD Sementara, pasal 38 mengambil alih pasal 33 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Koperasi disepakati sebagai bangunan perusahaan yang sesuai dengan perekonomian yang disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Dengan demikian pada masa Negara Kesatuan RIS dengan konstitusi UUDS ini koperasipun mempunyai landasan pijak yang kuat.

Setelah tahun 1950 situasi keamanan negara mulai membaik. Dengan keadaan itu bersama landasan yuridis yang ada mendorong

perkembangan perkoperasian semakin maju. Selain itu pemerintah juga memberi peluang dan iklim yang diperlukan bagi perkembangan koperasi. Hal itu antara lain dikemukakan wakil presiden Mohammad Hatta dalam peringatan Hari Koperasi tanggal 12 Juli 1951 sebagai berikut:”.....pasal 38 dari UUDS kita menyatakan dua macam kewajiban yaitu kewajiban pemerintah dan kewajiban rakyat.

Kewajiban pemerintah terletak pada ayat (2) dan (3) yang berbunyi, ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat..pml” Kewajiban rakyat adalah berusaha untuk menyempurnakan hidupnya dan perusahaan masyarakat dengan jalan koperasi.

Sehubungan dengan hal yang diutarakan itu maka dikeluarkan Peraturan Perkoperasian tahun 1949 no. 179. Dengan dasar Peraturan Perkoperasian tersebut, sejak tahun 1950-1960 perkembangan koperasi sangat pesat. Gambaran tentang perkembangan perkoperasian tersebut dapat terlihat dari adanya penyelenggaraan kongres-kongres koperasi.

Dalam rangka peringatan Hari Koperasi 12 Juli 1953, diadakan juga Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia di Bandung. Kongres tersebut merupakan Kongres Koperasi ke II yang berlangsung pada tanggal 15 - 17 Juli 1953. Dalam kongres tersebut hadir 206 orang utusan mewakili 83 pusat-pusat koperasi dari berbagai daerah di Indonesia. Daerah-daerah yang mengirim utusannya antara lain : Sumatra Utara, Sumatra Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi dan Sunda Kecil. Kongres yang dipimpin Niti Sumantri tersebut membuat beberapa keputusan berdasarkan prasaran-prasaran yang dikemukakan, di antaranya adalah (1) “mendirikan sebuah badan pemusatan pimpinan koperasi untuk seluruh Indonesia yang dinamakan “Dewan Koperasi Indonesia (DKI)”, dan (2) “mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia”.

Selain itu Hari Koperasi VII dan Kongres Besar Koperasi II tersebut merupakan momentum bagi pelaksanaan perubahan dasar ekonomi dengan menggunakan koperasi sebagai sisetim dan alat utama untuk mencapai kemakmuran rakyat bersama. Hal ini sesuai dengan

maksud pasal 38 UUD Sementara RI (pasal 33 UUD 1945).

Dengan adanya kesatuan pendapat yang menghasilkan keputusan Kongres seperti di atas kian mendorong perkembangan koperasi. Tatanan koperasi ini semakin kokoh lagi dengan disahkannya UU no. 79 tahun 1958 tentang perkumpulan koperasi pada tanggal 2 September 1958 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Undang-undang koperasi ini merupakan undang-undang yang pertama setelah Indonesia merdeka yang disusun berdasarkan keadaan kebutuhan dan kepribadian Indonesia sendiri.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk kembali ke UUD 1945, maka kedudukan UU no. 79/1958 yang disahkan berdasarkan UUD Sementara menjadi kehilangan pegangan. Sebagai gantinya dikeluarkan Peraturan Pemerintah no. 60 tahun 1959. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) tersebut salah satu fungsi koperasi adalah sebagai "alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin berdasarkan sosialisme ala Indonesia."

Peraturan Pemerintah no. 60/1959 tersebut, kemudian diikuti dengan beberapa kebijaksanaan sehingga koperasi semakin pesat perkembangannya. Hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah sebagai berikut.

- (1) Persyaratan untuk pendirian koperasi sebagai badan hukum sangat mudah.
- (2) Pemerintah banyak memberi bantuan/fasilitas kepada koperasi sehingga banyak orang mendirikan koperasi sekedar untuk mendapatkan fasilitas.
- (3) Banyak dikeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan koperasi.
- (4) Masyarakat berpenghargaan besar akan keberhasilan koperasi sebagai wahana sosialisme Indonesia yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Selanjutnya demi kemajuan koperasi dalam tahun 1960 dikeluarkan Instruksi Presiden no. 2 tahun 1960 tentang Badan Penggerak Koperasi (BAPENKOP) dan disusul pula Instruksi Presiden no. 3/1960 tentang Pendidikan Koperasi. Instruksi-instruksi

tersebut sekaligus merupakan kebijaksanaan Pemerintah dalam pembinaan dan usaha pengembangan gerakan koperasi yang pada hakekatnya merupakan bagian dari Demokrasi Terpimpin.

Di zaman Demokrasi Terpimpin diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop I) di Surabaya pada tanggal 21—27 April 1961. Pada Munaskop I ini, terbentuk Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI). Sayang sekali organisasi ini pada masa Demokrasi Terpimpin, dipengaruhi oleh suasana politik, sehingga kepengurusannya harus mencerminkan kekuatan progresif revolusioner berporoskan Nasionalis, Agama dan Komunis (Nasakom) dan harus berjiwa Manifesto Politik (Manipol).

Munaskop II diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai 10 Agustus 1965. Akan tetapi dengan pecahnya gerakan 30 September PKI 1965, berakhirlah pula tatanan koperasi yang selama itu dipengaruhi golongan politik tertentu.

Pada tahun 1966 Pemerintah kembali berusaha untuk mengembalikan citra koperasi. Dalam hal ini pembinaan terhadap koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip Tut Wuri Handayani, sehingga koperasi dapat berusaha sendiri membina kesejahteraannya. Tanggal 13 sampai 17 Juli 1966, diselenggarakan Munas I Gerakan Koperasi Indonesia (GERKOPIN), yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya : mendesak kepada pemerintah agar segera mengganti UU Perkoperasian no. 14/1965, dengan Undang-undang koperasi yang baru. Sebagai jawaban terhadap resolusi tersebut, dibentuklah suatu panitia perancang Undang-undang koperasi yang kemudian disahkan sebagai undang-undang no. 12 tahun 1967 tentang Perkoperasian oleh Pejabat Presiden RI Jendral Suharto tanggal 18 September 1967.

Demi penyesuaian diri dengan UU Koperasi yang baru Gerkopin menyelenggarakan Munas II Gerkopin pada tanggal 11 — 14 November 1968 di Jakarta. Selanjutnya dalam pelaksanaan keputusan yang telah dihasilkan Munas ini dan penertiban pengorganisasian koperasi telah diadakan suatu rapat yang dihadiri oleh 9 Induk Koperasi Tingkat Nasional. Di dalam rapat tersebut diputuskan antara lain membubarkan GERKOPIN dan sebagai gantinya membentuk Dewan Koperasi Indo-

nesia (DKI). Hal ini merupakan tonggak sejarah yang penting mengenai koperasi di masa orde baru.

Pada tahun 1973 gerakan koperasi menyelenggarakan Munas Koperasi yang disebut MUNASKOP IX di Jakarta pada tanggal 7 - 12 Juli 1973. Sebutan mana didasarkan pada penyelenggaraan Kongres Koperasi atau Musyawarah Koperasi sebelumnya, yaitu yang telah diselenggarakan berturut-turut sebagai berikut :

- (1) Kongres Koperasi I di Tasikmalaya 11 - 14 Juli 1947.
- (2) Kongres Besar Koperasi Seluruh Indonesia ke II di Bandung tanggal 15 — 17 Juli 1953.
- (3) Kongres Koperasi Seluruh Indonesia III di Jakarta tanggal 1 — 5 September 1956.
- (4) Musyawarah Koperasi Indonesia di Surakarta tanggal 6 - 10 September 1959.
- (5) Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) I, di Surabaya tanggal 21 — 24 April 1961.
- (6) Musyawarah Nasional Koperasi (Munaskop) II, di Jakarta tanggal 2 — 10 Agustus 1965.
- (7) Munaskop Gerkopin I di Jakarta tanggal 13 — 17 Juli 1966
- (8) Munaskop Gerkopin II di Jakarta tanggal 11 — 14 Nopember 1968
- (9) Munaskop yang disebut Munaskop IX di Jakarta tanggal 7 sampai 12 Juli 1973

Munas-munas tersebut kemudian dilanjutkan dengan Munaskop X tanggal 7 - 8 Nopember 1977. Selanjutnya Munaskop XI tanggal 17 - 19 Januari 1983 di Jakarta yang antara lain memutuskan perlunya membentuk Departemen Koperasi agar pembangunan koperasi dapat berjalan sejajar dengan sektor-sektor ekonomi lainnya. Dengan dasar ini terbentuk Departemen Koperasi yang sebelumnya hanya merupakan Menteri Negara.

Departemen yang sudah terbentuk itu kemudian melanjutkan langkah-langkah kerja dan program pembinaan koperasi seperti yang telah dilakukan oleh Menteri Negara dan lembaga-lembaga lain pendahulunya terutama menjalin kerja sama Gerakan Koperasi dan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN).

Dalam rangka peringatan Hari Koperasi di alam orde baru, penyelenggaraannya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

(a) Dalam peringatan Hari Koperasi Nasional, sebagai landasan didalam pengembangan Koperasi di awal Orde Baru, Pemerintah RI telah mencanangkan tonggak-tonggak sejarah yang penting tentang koperasi. Setelah pemulihan keamanan atas ekses-ekses dari peristiwa G 30 S PKI, Pemerintah dan rakyat Indonesia berhasil menyusun dan mensahkan Undang-undang nomor 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Setelah itu mensahkan berdirinya Dewan Koperasi Indonesia, dan kemudian dilanjutkan dengan mendirikan gedung-gedung Latihan Perkoperasian baik ditingkat pusat maupun di daerah sebagai sarana untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tentang Perkoperasian. Selain itu untuk menjamin permodalan koperasi terbentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang kini telah ditingkatkan menjadi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi. Selanjutnya terbentuk Koperasi Unit Desa (KUD) ditahun 1973 dan dikembangkan berdasarkan INstruksi Presiden no. 4/1978, sebagai lembaga yang mengatur struktur perekonomian masyarakat di pedesaan.

Adanya tonggak-tonggak sejarah tersebut semaki mengokohkan koperasi seperti yang dapat dilihat dari pertumbuhannya dari Pelita ke Pelita berikutnya. Pertumbuhan dan perkembangan tersebut dapat dimonitor melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Koperasi pada setiap tahun baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

Seperti yang telah diutarakan di muka, bahwa di dalam Kongres Koperasi I Juli 1947 tanggal 12 Juli diputuskan sebagai "Hari Koperasi Indonesia", yang tiap-tiap tahun harus dirayakan. Atas dasar tersebut Hari Koperasi diperingati dan dirayakan dengan tujuan antara lain untuk meningkatkan peran serta dan swadaya masyarakat serta kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi. Perayaan peringatan Hari Koperasi terutama dilakukan oleh masyarakat Gerakan Koperasi di tiap-tiap daerah dan berlangsung secara sektoral.

Dalam rangka peringatan Hari Koperasi ke-36 tahun 1983 Departemen Koperasi yang sudah berfungsi membuat Pedoman

Peringatan Koperasi secara Nasional. Tema peringatan adalah “Mengkoperasikan Masyarakat Menuju Kehidupan Rakyat yang Sejahtera”. Ketentuan-ketentuan umum dalam penyelenggaraan peringatan Hari Koperasi ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan masing-masing. Peringatan diselenggarakan pada waktu yang bersamaan, baik ditingkat daerah/kabupaten, propinsi maupun di pusat. Di tingkat daerah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah mengadakan peringatan bersama-sama dengan Gerakan Koperasi di daerahnya. Sedang di tingkat pusat peringatan Hari Koperasi dilaksanakan dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional dan mencerminkan aspirasi-aspirasi Gerakan Koperasi secara keseluruhan.

Untuk menyukseskan peringatan Hari Koperasi diperlukan adanya kerja sama sebaik-baiknya antara Dekopin dan Gerakan Koperasi dengan Pemerintah Daerah dan Departemen Koperasi serta Instruksi-instruksi pemerintah lainnya. Selain itu unsur-unsur masyarakat perlu pula diikutsertakan dalam kegiatan tersebut.

Pada peringatan Hari Koperasi ke-36 tersebut, di tingkat pusat mulai diarahkan untuk melaksanakan peringatan bersama Hari Koperasi 12 Juli, Hari Krida Pertanian 21 Juni dan Hari Keluarga Berencana 29 Juni. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta berpartisipasi aktif dalam ketiga kegiatan tersebut serta mengembangkan dan lebih meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Bertolak dari arahan diatas, pada Hari Koperasi ke-37, Juli 1984, perayaan dilakukan bersama-sama dengan Hari Keluarga Berencana Nasional yang diadakan di Bandung. Selanjutnya peringatan secara nasional dipusatkan di salah satu daerah yang sudah ditentukan.

(b) Setelah tahun 1984, Peringatan Hari Koperasi dan Hari Keluarga Berencana lebih ditingkatkan lagi dan diberi nama **PERTASIKENCANA**. **PERTASIKENCANA** adalah kegiatan bersama antara tiga Instansi dalam menyelenggarakan Hari Ulang Tahunnya. Yaitu Departemen Pertanian (Hari Krida Pertanian), Departemen Koperasi/Gerakan Koperasi/Dekopin (Hari Koperasi), Badan Koordinasi Keluarga Berencana (Hari Keluarga Berencana). Dengan adanya gagasan untuk menyelenggarakan peringatan bersama itu

dicarilah suatu nama yang pantas untuk kegiatan tersebut muncullah nama "PERTASIKENCANA", yang diambil dari Pertanian, Koperasi dan Keluarga Berencana.

Sebenarnya upaya untuk mengadakan kegiatan peringatan secara bersama itu telah mulai diarahkan sejak tahun 1983. Bahkan jauh sebelum itu yakni diawal tahun 1970-an. Di Daerah Istimewa Yogyakarta telah merintis mengadakan upacara bersama pada tanggal 12 Juli dengan sebutan PERTASIGANA (Pertanian, Koperasi, dan Keluarga Berencana). Melihat manfaat yang besar terutama dalam upaya memperkuat keterpaduan kegiatan diketiga bidang itu adalah sama yakni demi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat, maka di tingkat pusat peringatan Hari Koperasi dan Hari Keluarga Berencana mulai diadakan bersama pada tahun 1984 di Bandung.

Bertolak dari keberhasilan dan manfaat yang dicapai dalam peringatan bersama ini, pada tahun 1985 acara puncak peringatan-peringatan bersama ini, pada tahun 1985 acara puncak peringatan nasional dilakukan oleh ketiga instansi berpusat di Kediri, Sulawesi Tenggara. Kegiatan di sini masih menggunakan sebutan PERTASIGANA seperti yang digunakan oleh beberapa daerah yang lain dan di Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1986 acara puncak (nasional) PERTASIGANA diselenggarakan di Kuamang, Jambi dan tahun 1987 diselenggarakan sekaligus dengan peresmian Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN).

Pada tahun 1988 peringatan diadakan di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan bersamaan dengan Pekan Nasional Kontak Tani dan Nelayan VII. Di sini nama PERTASIGANA dirobah menjadi PERTASKENCAN. Hal itu disebabkan kata GANA dianggap kurang tepat bagi masyarakat Sulawesi Selatan sehingga dicari nama yang lebih pas dan komunikatif untuk semua kalangan. Dengan demikian terciptalah nama yang disepakati bersama "PERTASIKENCANA".

Sejak saat itu sampai sekarang peringatan bersama berlangsung terus dan secara bergilir masing-masing instansi menjadi koordinator/ penanggung jawab penyelenggaraannya. Pada tahun 1989 penyelenggaraan PERTASIKENCANA 1990 diselenggarakan di Tasikmalaya, Jawa Barat dengan penanggung jawab BKKBN,

penyelenggara PERTASIKENCANA 1991 di Magelang, Jawa Tengah dengan penanggung jawabnya Departemen Pertanian dan PERTASIKENCANA 1992 diselenggarakan di Jakarta dengan penanggung jawab Departemen Koperasi.

Penyelenggaraan PERTASIKENCANA 1990, 1991, dan 1992, merupakan momentum yang dianggap sangat penting dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat pedesaan yang pada umumnya sebagai petani, nelayan yang menjadi pelaku utama pembangunan pedesaan. Momentum ini dianggap penting karena selain sebagai media untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan perkoperasian, pertanian dan keluarga berencana juga sebagai wadah untuk menjalin kerja sama dan keakraban diantara sesama petani/nelayan baik selaku anggota koperasi (KUD) maupun sebagai pengurus dan penggerak atau peserta keluarga berencana. PERTASIKENCANA 1992 adalah keterpaduan antara pelaksanaan Peringatan Hari Koperasi ke-45, Hari Krida Pertanian ke-20 dan hari Gerakan Keluarga Berencana Nasional ke-22, dalam rangka mengadakan persiapan untuk lepas landas memasuki Pelita VI.

Daftar Pustaka

1. GBHN, 1987, Tentang Perkoperasian.
2. *Undang-Undang No. 12, Tahun 1967, Tentang Pokok-pokok Perkoperasian*, Departemen Koperasi, Jakarta, 1985.
3. Arifanial Chaniago, *Perkoperasian di Indonesia*, PT. Angkasa, Bandung 1987.
4. DEKOPIN *Panca Windu Gerakan Koperasi*, 12 Juli 1947 - 12 Juli 1987.
5. Kamaralsyah SH, dkk, *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia*, DEKOPIN, Jakarta 1987.
6. Sagumin MD, *Koperasi Indonesia*, Yayasan Indayu, Jakarta 1985.

